Laporan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Provinsi DKI Jakarta

2023

Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi DKI Jakarta

Laporan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023

bappeda

Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Tim Penyusun

Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta:

Penanggung Jawab	:	Teguh Setyabudi, Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ketua Dewan Pengarah	:	Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Koordinator Pelaksana	:	Atika Nur Rahmania, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta
Ketua Tim Pelaksana	:	Andhika Ajie, Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah (PRID) Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris	:	Arimbi Putik Apsari, Kepala Subbagian Tata Usaha PRID Bappeda Provinsi DKI Jakarta
Kelompok Kerja (Pokja)	:	Dewi Satiasari, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pokja Pilar Pembangunan Sosial; Feirully Irzal, Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pokja Pilar Pembangunan Ekonomi; Deftrianov, Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pokja Pilar Pembangunan Lingkungan; Ahmad Anshori Wahdy, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Pokja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Endah Nugrahaning S., Ketua Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan PRID Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Pokja Pilar Pembangunan Sosial; Mushlih Muharrik, Ketua Satuan Pelaksana Ekonomi dan Pembangunan PRID Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Pokja Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pokja Pilar Pembangunan Lingkungan; Utami Indira Sari, Ketua Satuan Pelaksana Pemerintahan PRID Bappeda Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Pokja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.
Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta	:	Jaka Ramdani, Manajer Pilar Pembangunan Sosial; Dhimas Rachman Taufiq, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi; Annisa Utami Kusuma Negara, Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan; Fetty Wiyani, Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola; Herbeth Naftaly Eliasta, Desain Grafis; Farhan Sultan Rifqi, Programmer; Naufal Mu'afa, Pengolah Data.

Sekretariat TPB Provinsi DKI Jakarta
Gedung Balaikota Provinsi DKI Jakarta, Blok H lantai 21
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9,
Jakarta Pusat
Telp. +62 21 382 2061 Fax. +62 21 382 2061

Kata Sambutan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun 2023.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), atau yang lebih dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), telah menjadi komitmen global sejak tahun 2015. Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung pencapaian target SDGs melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 426 Tahun 2023 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian TPB Tahun 2023-2026.

Saat ini, pemerintah terus berupaya memulihkan capaian pembangunan melalui berbagai intervensi kebijakan, dengan harapan dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum adanya Pandemi COVID-19 atau bahkan lebih baik. Laporan ini menyajikan analisis mendalam terkait 17 Tujuan SDGs, yang mencakup kondisi terkini, tantangan, serta kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mencapai SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, laporan ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program-program yang sudah ada serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.

Penyusunan Laporan Pencapaian TPB/SDGs Tahun 2023 ini dapat terwujud berkat kontribusi dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kami menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan serta aktif dalam pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta. Semoga laporan ini dapat menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus bersinergi dan berupaya lebih optimal untuk meningkatkan capaian TPB/SDGs daerah, serta dapat berkontribusi terhadap pencapaian TPB/SDGs nasional.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, Desember 2024
Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Teguh Setyabudi

Ringkasan Eksekutif

Di tengah upaya pemulihan dari dampak Pandemi COVID-19, dan melambatnya perekonomian global, tahun 2023 juga dihadapkan pada tantangan eskalasi ketegangan geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi ekonomi Jakarta. Meski demikian, berbagai upaya yang dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aktor non pemerintah telah menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tetap tinggi pada tahun 2023 dan meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja. Selain itu, sejumlah indikator yang sebelumnya memburuk, seperti tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, kini mengalami perbaikan, meski belum kembali ke level sebelum pandemi.

Jika dilihat secara keseluruhan, capaian mayoritas indikator TPB Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang cenderung membaik. Berdasarkan analisis terhadap 154 indikator yang diadopsi pada RAD TPB 2023-2026, hanya 99 indikator yang tersedia datanya pada periode penyusunan laporan. Dari jumlah tersebut, sekitar 68,7 persen atau 68 indikator telah mencapai target tahun berjalan. Selain itu, 15,1 persen atau 15 indikator menunjukkan tren perbaikan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 16.2 persen atau 16 indikator yang memerlukan perhatian khusus, sehingga diperlukan upaya lebih kuat dalam pencapaian target indikator-indikator tersebut. Adapun 55 indikator lainnya belum dapat diukur status pencapaiannya karena datanya tidak tersedia.

Sosial

Pada pilar pembangunan sosial, penurunan tingkat kemiskinan, menunjukkan hasil yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terjadi penurunan persentase kemiskinan, penurunan angka kematian ibu, kualitas konsumsi pangan juga melebihi target. Disamping itu proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun tercapai melebihi target. Namun perlu menjadi perhatian khusus pada angka kematian balita (AKBa) agar di periode selanjutnya dapat mencapai target.

Ekonomi

Pada pilar pembangunan ekonomi, Jakarta mencatat pertumbuhan positif yang stabil pada tahun 2023, yang diikuti dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, keuangan daerah Jakarta juga menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Dalam aspek energi, pencapaian penuh elektrifikasi dan peningkatan penggunaan gas rumah tangga sebagai sumber energi bersih menandakan kemajuan dalam infrastruktur dan akses energi bersih. Namun, kinerja sektor industri manufaktur dan ekspor DKI Jakarta masih menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Lingkungan

Pada pilar lingkungan, terjadi peningkatan akses terhadap air minum aman dan sanitasi layak yang merupakan infrastruktur dasar yang vital bagi kesejahteraan penduduk. Selain itu, indeks kualitas lahan juga membaik, hal ini mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian layak juga mengalami peningkatan. Di samping itu, terjadi penurunan jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun, yang mengindikasikan ketercapaian pada tujuan 13 perubahan iklim. Dari sisi ekosistem lautan, sudah terdapat kerangka regulasi kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil telah tersedia, memberikan perlindungan bagi nelayan lokal dan keberlanjutan ekosistem perairan.

Hukum & Tata Kelola

Pada pilar hukum dan tata kelola, secara keseluruhan telah menunjukkan capaian yang positif. Dalam aspek Perdamaian, pada capaian indikator angka kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk yang terus menurun selama 2 tahun terakhir. Selanjutnya, pada aspek Tata Kelola untuk capaian indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui pada tahun 2023 telah mencapai target. Diikuti capaian indikator Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov DKI Jakarta masih berhasil mempertahankan predikat WTP. Capaian Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik terus meningkat bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada capaian indikator proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur, dan indikator persentase anak yang memiliki akta kelahiran telah mencapai target.

Daftar Isi

Kata Sambutan ii
Ringkasan Eksekutif iii
Daftar Isi vi
Daftar Singkatan vii

Pendahuluan 1
Latar Belakang 1
Mekanisme Penyusunan Laporan 2
Sistematika Laporan 3

Ringkasan Status Pencapaian TPB 4

Tinjauan Status Pencapaian TPB 7
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan 8
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan 13
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera 17
Tujuan 4 - Pendidikan Bermutu 21
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender 26
ujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi yang Layak 31
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau 36
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 41
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur 52
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan 60
Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 66
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 71
Tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim 76
Tujuan 14 - Ekosistem Lautan 81
Tujuan 15 - Ekosistem Daratan 85
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh 89
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.....97

Penutup 104
Kesimpulan dan Saran 104

Referensi 112
Lampiran I. Form 1-Sasaran Capaian Indikator.....116
Lampiran I. Form 2-Program/Kegiatan Pemerintah Daerah.....138

Daftar Singkatan

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
Bakesbangpol	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Baduta	:	Bayi Usia Bawah Dua Tahun
Balita	:	Bayi Usia Bawah Lima Tahun
Bapenda	:	Badan Pendapatan Daerah
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAP	:	*Biodiversity Action Plan*
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BSF	:	Black Soldier Fly
BWRO	:	*Brackish Water Reverse Osmosis*
CAC	:	*Clean Air Catalyst*
CAI	:	*Climate Action Implementation*
CAT	:	Cekungan Air Tanah
COVID-19	:	*CoronaVirus Disease 2019*
Daring	:	Dalam jaringan
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Dinsos	:	Dinas Sosial
Disdukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Diskominfotik	:	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
DTKTE	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Disparekraf	:	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
DPPKUKM	:	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DKPKP	:	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
DLH	:	Dinas Lingkungan Hidup
DPPAPP	:	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GRK	:	Gas Rumah Kaca
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HIV-AIDS	:	*Human Immunodeficiency Virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome*
IBSAP	:	*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan*
IDI	:	Indeks Demokrasi Indonesia
IPA	:	Instalasi Pengolahan Air
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
Kehati	:	Keanekaragaman Hayati
IKTL	:	Indeks Kualitas Tutupan Lahan
IKU	:	Indeks Kualitas Udara
JRC	:	*Jakarta Recycle Center*
KBRL	:	Kantong Belanja Ramah Lingkungan
KBT	:	Kanal Banjir Timur

KIE	:	Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KJP	:	Kartu Jakarta Pintar
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KPDBU	:	Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha
KRL	:	Kereta Rel Listrik
KSBB	:	Kolaborasi Sosial Berskala Besar
KUB	:	Kelompok Usaha Bersama
Lansia	:	Lanjut usia
Luring	:	Luar Jaringan
MBBR	:	*Moving Bed Biofilm Reactor*
MI	:	*Madrasah Ibtidaiyah*
MTs	:	*Madrasah Tsanawiyah*
MA	:	*Madrasah Aliyah*
MRT	:	Moda Raya Terpadu/*Mass Rapid Transit*
Musrenbangkot	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota
ODF	:	*Open Defecation Free*
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PE	:	Populasi Ekuivalen
PHPT	:	Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional
PKK	:	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PPKM	:	Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
PROPER	:	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
PSBB	:	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PSDKP	:	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
PTM	:	Penyakit Tidak Menular
RAD	:	Rencana Aksi Daerah
RDF	:	*Refuse Derived Fuel*
RLS	:	Ruang Limpah Sungai
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPRKD	:	Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah
RTH	:	Ruang Terbuka Hijau
RTHK	:	Ruang Terbuka Hijau Kota
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
SD	:	Sekolah Dasar
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMAB	:	Sekolah Madrasah Aman Bencana
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SPALD	:	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
SPALD-T	:	Sistem Pengelolaan Limbah Domestik Terpusat
SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
SPKLU	:	Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
SPKU	:	Stasiun Pemantauan Kualitas Udara
SPPU	:	Strategi Penanganan Pencemaran Udara
SSGI	:	Studi Status Gizi Indonesia
SWRO	:	*Sea Water Reverse Osmosis*
TOD	:	*Transit Oriented Development*
TPB/SDGs	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*

TPST	:	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
TPS 3R	:	Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
WHO	:	*World Health Organization*
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
3R	:	*Reuse, Reduce*, dan *Recycle*

Pendahuluan

Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan. Untuk mendukung regulasi tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan TPB di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Tahun 2023-2026, sebagai kelanjutan dari RAD TPB/SDGs sebelumnya yang berakhir pada tahun 2022. RAD TPB/SDGs mencakup berbagai program dan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran TPB di tingkat daerah. Pada dokumen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 86 target dan 154 indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian TPB di tingkat daerah.

Untuk menilai sejauh mana implementasi RAD TPB/SDGs Tahun 2023-2026 tersebut, diperlukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang sistematis. Proses tersebut juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Dengan adanya proses pelaporan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk memperkuat akuntabilitasnya dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di tingkat daerah. Selain itu, hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan program-program lanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan TPB/SDGs di masa mendatang.

Mekanisme Penyusunan Laporan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJPD, RPJMD, dan RPD Provinsi DKI Jakarta. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dana Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) 2023-2026.

Pemantauan dan evaluasi TPB dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAD TPB yang dananya bersumber dari APBD maupun non pemerintah. Keterlibatan para pihak dari pemerintah dan nonpemerintah menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan ini, khususnya untuk mengukur pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs serta kegiatan yang mendukung pencapaian target tersebut. Penyusunan laporan ini dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Tim Koordinasi TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta bersama Sekretariat TPB/SDGs Provinsi DKI Jakarta. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs.

Selanjutnya, laporan pelaksanaan pencapaian target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 17 Ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2017.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan strategis yang berbasis data untuk mendukung percepatan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi ini juga akan digunakan untuk meningkatkan sinergi antara program pemerintah daerah dan kontribusi nonpemerintah, termasuk sektor swasta, lembaga masyarakat, dan akademisi, guna memastikan keberlanjutan dan relevansi setiap kebijakan yang diambil dalam pencapaian TPB/SDGs.

Alur Monitoring dan Evaluasi TPB Tingkat Daerah

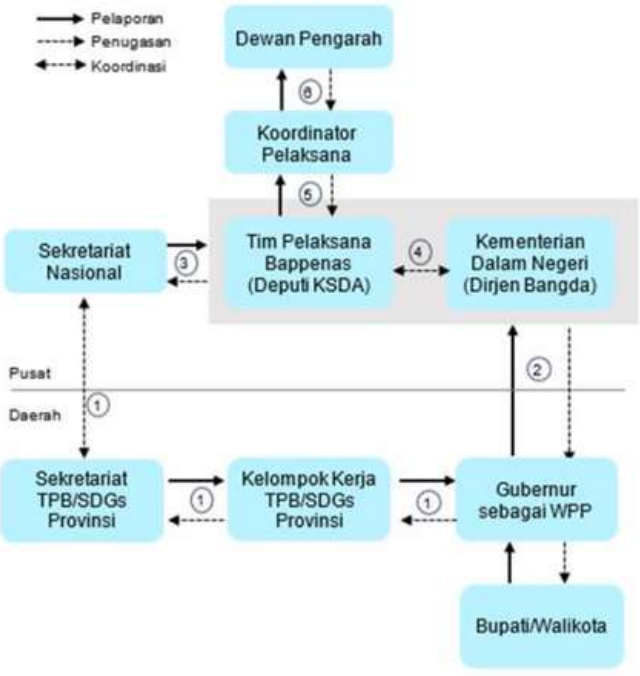

Sumber: Sekretariat Nasional TPB/SDGs (2024)

Sistematika Laporan

Laporan ini terdiri dari 5 (lima) bagian:

01

Pendahuluan

Penjelasan tentang latar belakang penyusunan laporan, metodologi penyusunan, dan sistematika laporan.

02

Ringkasan Status Pencapaian TPB

Gambaran umum mengenai status pencapaian 17 tujuan TPB di Provinsi DKI Jakarta.

03

Tinjauan Status Pencapaian TPB

Penjelasan terperinci tentang status pencapaian TPB pada setiap tujuan, serta tantangan dan pembelajaran dalam upaya pencapaian TPB. Bagian ini juga menjelaskan strategi kebijakan atau program yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta.

04

Penutup

Kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.

Ringkasan Status Pencapaian TPB

Pada Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023-2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 86 target dan 154 indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian TPB. Dari jumlah tersebut, hanya 64,3 persen atau 99 indikator yang datanya tersedia. Sementara itu, 55 indikator tidak tersedia datanya sehingga tidak dapat diukur status pencapaiannya pada tahun 2023. Dari 99 indikator yang tersedia datanya, sebagian besar, atau 68 indikator telah mencapai target tahun berjalan. Meski demikian, 16 indikator masih memerlukan perhatian khusus karena memiliki mengalami kondisi penurunan dan belum mencapai target tahun berjalan.

Ketersediaan Data Pencapaian TPB Jakarta

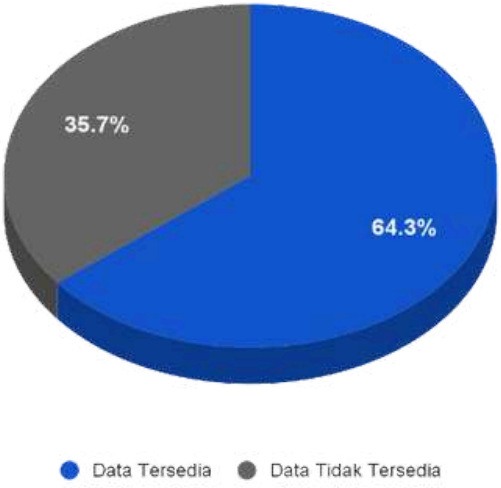

Sumber: Sekretariat TPB Jakarta (2024), diolah.

Status Pencapaian TPB Jakarta

Sumber: Sekretariat TPB Jakarta (2024), diolah.

Jika dilihat berdasarkan pilarnya, pencapaian terbaik terdapat pada pilar sosial dengan status tercapai sebanyak 24 indikator. Sementara itu, Indikator dengan status perlu perhatian khusus terbanyak terdapat pada pilar ekonomi, yakni sebanyak 6 indikator. Adapun indikator yang datanya paling banyak tidak tersedia terdapat pada Pilar Sosial, yakni sebanyak 24 indikator.

Secara umum, pencapaian indikator dalam Pilar Sosial menunjukkan kinerja yang positif. Dari 38 indikator yang tersedia datanya, sebagian besar (63,2 persen) telah mencapai target tahun berjalan, dan 7 indikator (18,4 persen) mengalami tren perbaikan. Meski demikian, masih terdapat 7 indikator (18,4 persen) yang memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, indikator pada Pilar Ekonomi juga menunjukkan pencapaian yang positif. Dari 23 indikator yang datanya tersedia, sebagian besar (65,2 persen) telah mencapai target tahun berjalan, dan 2 indikator (8,7 persen) mengalami tren perbaikan. Sementara itu, 6 indikator (26,1 persen) masih memerlukan perhatian khusus karena memiliki tren capaian yang menurun dan belum mencapai target tahun berjalan.

Pilar Lingkungan juga menunjukkan kinerja yang positif, yang tercermin dari tingginya proporsi indikator dengan status tercapai. Dari 23 indikator yang tersedia datanya, 18 indikator (78,3 persen) telah mencapai target tahun berjalan, dan 4 indikator (17,4 persen) mengalami tren perbaikan. Sementara itu, 2 indikator lainnya (8,7 persen) dalam status perlu perhatian khusus.

Kinerja yang positif juga terlihat pada Pilar Hukum dan Tata Kelola. Dari 14 indikator yang datanya tersedia, 11 indikator (78,57 persen) telah mencapai target tahun berjalan, dan 2 indikator (14,3 persen) dalam status membaik. Sementara itu, 1 indikator (7,14 persen) masih memerlukan perhatian khusus karena memiliki tren capaian yang menurun dan belum mencapai target tahun berjalan.

Status Pencapaian TPB Berdasarkan Pilar Pembangunan

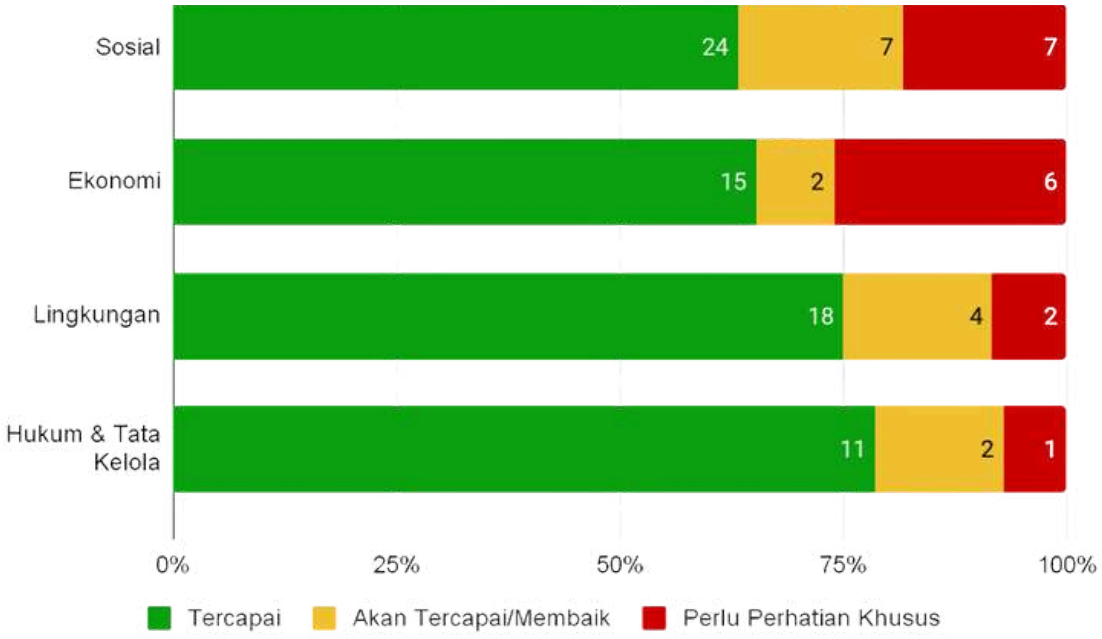

Sumber: Sekretariat TPB Jakarta (2024), diolah.

Jika dilihat berdasarkan tujuannya, pencapaian terbaik terdapat pada tujuan 5, 7, 9, dan 14. Sementara itu, tujuan yang memiliki proporsi indikator dengan status perlu perhatian khusus terbanyak adalah Tujuan 10. Dari 4 indikator yang tersedia datanya pada tujuan tersebut, 2 diantaranya (50 persen) mengalami tren penurunan dan belum mencapai target tahun berjalan.

Secara umum, seluruh data dalam laporan ini menunjukkan bahwa pencapaian TPB di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 telah berjalan dengan baik. Seluruh capaian TPB yang telah diraih perlu dipertahankan, sementara aspek yang masih kurang harus ditingkatkan dan mendapat perhatian lebih lanjut. Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mengakselerasi capaian pelaksanaan TPB di Provinsi DKI Jakarta.

Status Pencapaian TPB Berdasarkan Tujuan

Sumber: Sekretariat TPB Jakarta (2024), diolah.

Tercapai Membaik Perlu Perhatian Khusus

Status Pencapaian TPB Berdasarkan Indikator

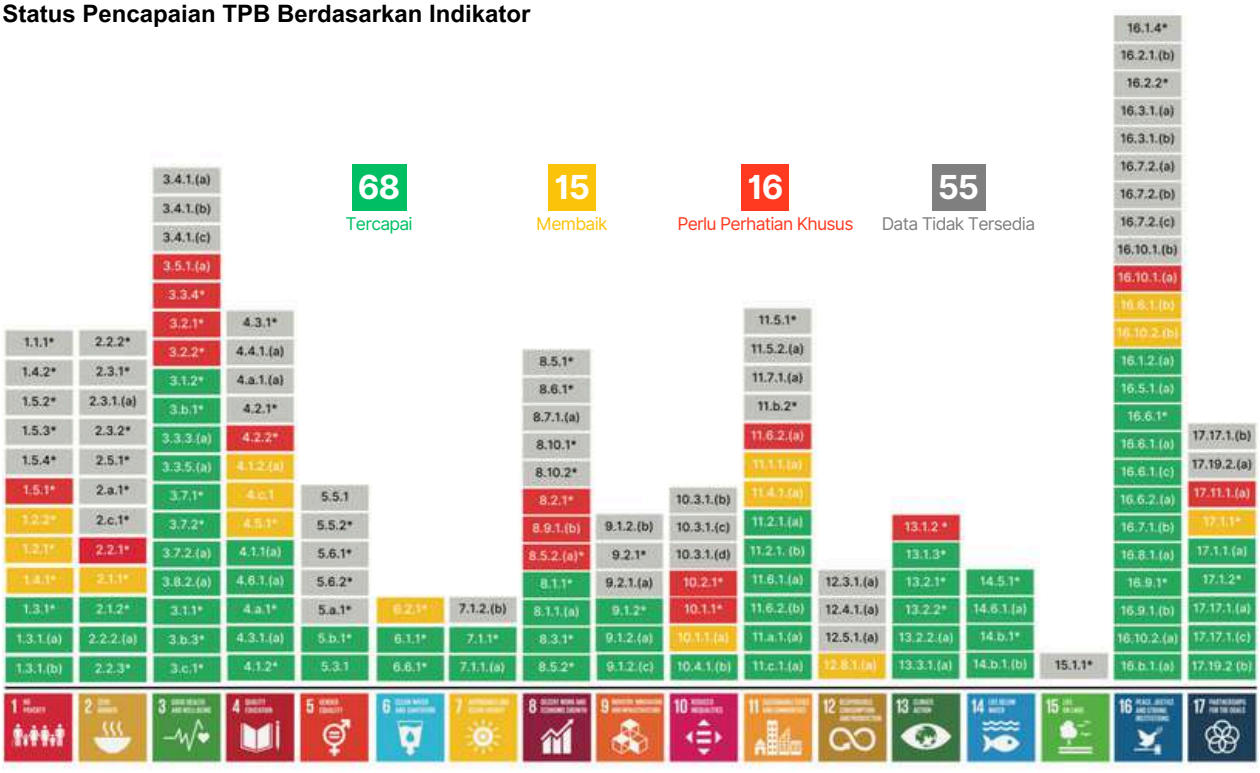

Sumber: Sekretariat TPB Jakarta (2024), diolah.

Tinjauan Status Pencapaian TPB

Tujuan 1
Tanpa Kemiskinan

Keadaan dan Kecenderungan

Tren angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan penurunan yang signifikan sejak masa pemulihan pasca pandemi. Data BPS mencatat bahwa pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Jakarta berada pada angka 4,44 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan 4,61 persen pada September 2022. Jumlah penduduk miskin pada periode yang sama berkurang dari 494,93 ribu orang pada September 2022 menjadi 477,83 ribu orang pada Maret 2023, atau terjadi penurunan sebesar 17,10 ribu orang. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, seperti peningkatan akses pekerjaan, bantuan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat. Secara umum, tren ini menjadi sinyal positif bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengatasi dampak buruk pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Jakarta

Sumber: BPS (2024), diolah.

Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Jakarta

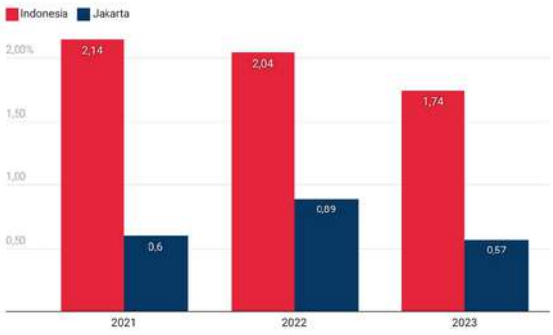

Sumber: TNP2K (2024), diolah.

Selain penurunan tingkat kemiskinan secara keseluruhan, tren yang serupa juga terlihat pada tingkat kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan ekstrem menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah semakin berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan.

Di tengah turunnya angka kemiskinan, masih terdapat tantangan dalam memastikan akses yang setara terhadap kebutuhan dasar, seperti fasilitas sanitasi yang layak. Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang tidak memiliki WC layak di Jakarta mencapai 5,47 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kemajuan dalam penggunaan jamban pribadi, masih ada kelompok masyarakat miskin yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Meski demikian, terdapat perkembangan positif dalam akses terhadap layanan sanitasi secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, persentase penduduk yang memiliki akses ke layanan sanitasi mencapai 93,5 persen, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,79 persen. Capaian ini merupakan indikasi penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat, mendukung kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta secara keseluruhan.

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak

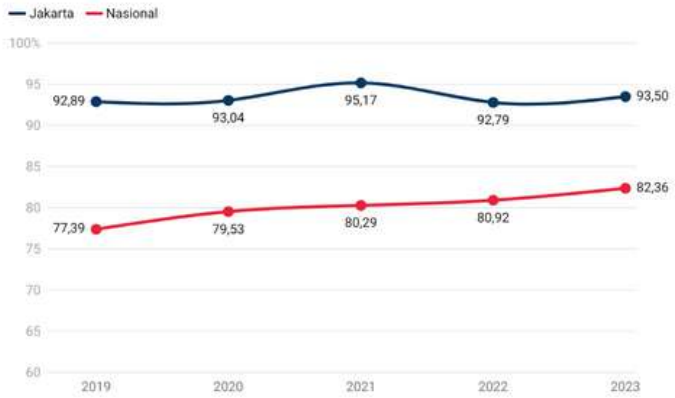

Sumber: BPS (2024), diolah.

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan utama pada pencapaian Tujuan 1 di tahun 2023 yaitu dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap layanan sosial dan infrastruktur dasar, seperti sanitasi, terutama di kalangan rumah tangga miskin. Meskipun terjadi penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, masih ada sebagian rumah tangga miskin yang belum mendapatkan akses terhadap jamban pribadi atau sanitasi yang layak. Meskipun persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi meningkat, mencapai 93,5 persen pada tahun 2023 dari 92,79 persen pada tahun sebelumnya, tantangan ini mengindikasikan bahwa masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai inklusivitas penuh dalam akses terhadap sanitasi.

Pembelajaran dari keadaan kemiskinan di DKI Jakarta yaitu memerlukan integrasi lebih lanjut antara program-program kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur dasar. Meskipun program-program seperti Kartu Pekerja Jakarta dan Kartu Jakarta Pintar telah membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pembelajaran dari keadaan dan kecenderungan mendorong perlunya mengidentifikasi dan menargetkan secara spesifik rumah tangga yang masih tertinggal dalam akses sanitasi. Hal ini memerlukan analisis data yang lebih mendalam untuk memahami pola dan lokasi geografis rumah tangga yang masih belum terakses dengan baik.

Selain itu, sinergitas antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan solusi inklusif untuk memastikan bahwa semua kalangan, terutama yang rentan, dapat merasakan manfaat dari program-program tersebut. Melalui pendekatan ini, upaya untuk mengakhiri kemiskinan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju kesejahteraan yang lebih luas.

Kebijakan dan Strategi

Pemutakhiran Data Kemiskinan

Kebijakan dan strategi untuk menghadapi tantangan dalam program pembangunan terletak pada penajaman ketepatan data, terutama dalam menilai prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem. DKI Jakarta memperbarui data melalui Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Carik Jakarta. Proses pemutakhiran ini melibatkan semua Perangkat Daerah serta perwakilan dari lembaga-lembaga terkait. Koordinasi dilakukan pada Februari 2023 dengan mengundang Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta kepala badan terkait. Gambar 1.4 menunjukkan hasil pemutakhiran data angka kemiskinan dan stunting di DKI Jakarta, menyoroti komprehensifnya upaya pembaruan data.

Pengurangan Beban Pengeluaran

Program bantuan tunai diterapkan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin, baik tingkat nasional maupun provinsi. Di DKI Jakarta, program-program tersebut meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Lansia Jakarta. Selain itu, program-program seperti KJP Plus memberikan dukungan pendidikan bagi peserta didik dari berbagai jenjang. Gambar 1.5 menampilkan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar Plus pada Juni 2023. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui berbagai program bantuan serta melalui pelatihan dan insentif bagi UMKM.

Pemutakhiran Data Kemiskinan DKI Jakarta
Sumber: Bappeda DKI Jakarta (2023)

Intervensi dan Kolaborasi Berbasis Kewilayahan

Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan dengan fokus pada validasi data, pengurangan beban pengeluaran, produktivitas dan pendapatan, serta peningkatan infrastruktur. Kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Sumber Daya Air (DSDA) dan BPBD, dilakukan untuk memastikan akses air bersih di seluruh wilayah. DSDA dan PAM Jaya berkomitmen untuk menjamin cakupan layanan jaringan perpipaan hingga seratus persen pada tahun 2030 dan telah mengambil langkah untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah rawan krisis air. Kolaborasi ini juga merupakan respons terhadap ancaman El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan. Dengan adanya kerja sama ini, DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa semua warganya, terutama yang rentan, memiliki akses yang cukup terhadap air bersih.

Melalui pemutakhiran data yang cermat, program bantuan sosial, dan kolaborasi lintas sektor, DKI Jakarta berhasil menunjukkan penurunan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan. Namun, tantangan yang ada mengingatkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, serta sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai inklusivitas dan keberlanjutan yang lebih besar.

Area Layanan Reservoir Komunal dan IPA Portabel
Sumber: Kompas (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam upaya percepatan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan Bank DKI untuk meluncurkan sebuah inisiatif penting. Inisiatif ini bertujuan untuk mendistribusikan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD), yang mencakup Kartu Anak Jakarta dan Kartu Lansia Jakarta. Langkah ini menjadi bagian integral dari strategi besar dalam memastikan akses yang lebih baik terhadap bantuan sosial bagi warga DKI Jakarta yang membutuhkan.

Pada tahap awal, pendistribusian massal ini melibatkan pembukaan rekening kolektif (Burekol) bagi penerima manfaat baru di lima wilayah Kota Administrasi. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar proses distribusi bantuan sosial dan meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dana kepada penerima manfaat.

Sementara itu, kesadaran akan rentannya masyarakat miskin terhadap berbagai guncangan atau krisis seperti El Nino menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah-langkah telah diambil untuk mengoptimalkan upaya pasokan air bersih kepada masyarakat yang rentan terhadap dampak El Nino. Hal ini mengingat bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan, terutama bagi masyarakat miskin. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan di tengah kondisi lingkungan yang berubah.

Pendistribusian Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kartu Anak Jakarta dan Kartu Lansia Jakarta

Sumber: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta (2023)

Tujuan 2
Tanpa Kelaparan

Keadaan dan Kecenderungan

Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi stunting di Jakarta telah mengalami penurunan yang signifikan, mencerminkan keberhasilan berbagai program intervensi yang dijalankan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, pada tahun 2023, terjadi peningkatan yang patut mendapat perhatian serius. Prevalensi stunting di Jakarta tercatat sebesar 17,60 persen, meningkat dari 14,80 persen pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun upaya penurunan stunting sebelumnya membuahkan hasil yang positif, tantangan untuk mempertahankan tren penurunan tersebut tetap ada. Faktor-faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dinamis terus mempengaruhi status gizi anak-anak di Jakarta, sehingga memerlukan perhatian berkelanjutan.

Kendati demikian, Jakarta masih menunjukkan capaian yang lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun yang sama, prevalensi stunting nasional mencapai 21,5%, menempatkan Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia. Capaian ini menegaskan bahwa program penanganan stunting di Jakarta tetap menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia.

Prevalensi Stunting Jakarta dan Nasional

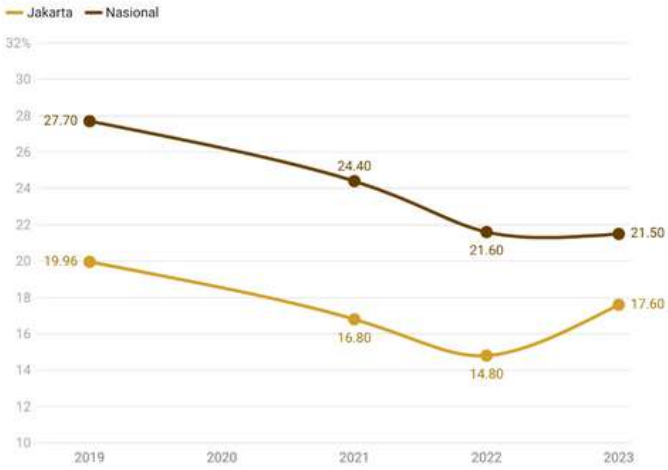

Sumber: SKI (2023), diolah.

Prevalensi Stunting Menurut Provinsi (2023)

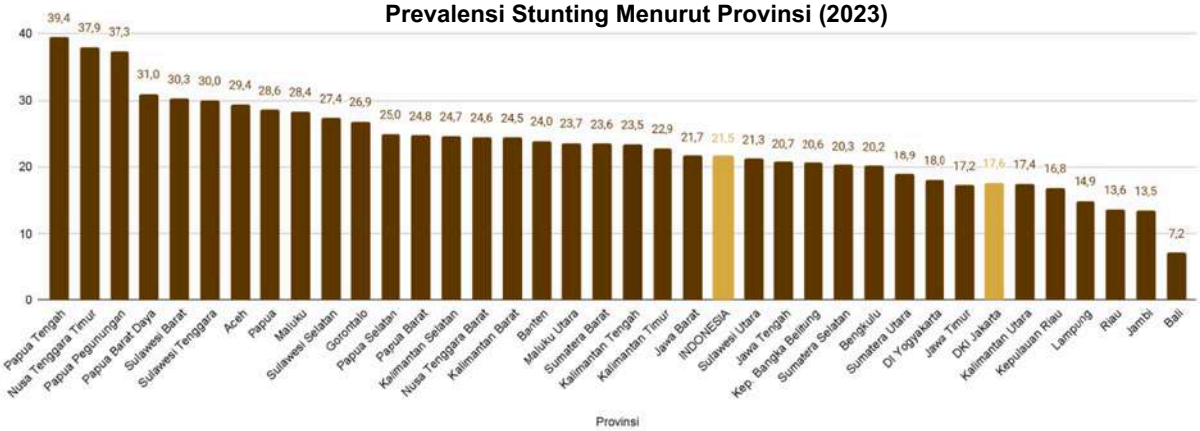

Sumber: SKI (2023), diolah.

Meskipun secara umum prevalensi stunting di Jakarta tergolong rendah dibandingkan rata-rata nasional, beberapa wilayah tertentu masih menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kepulauan Seribu, di mana prevalensi stunting tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Jakarta. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, termasuk fasilitas kesehatan yang terbatas dan jarak yang jauh ke pusat layanan kesehatan utama. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan kesehatan ibu dan anak di wilayah ini masih perlu ditingkatkan, mengingat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya pola makan bergizi bagi tumbuh kembang anak.

Tantangan dan Pembelajaran

Dalam pemenuhan akses pangan yang aman, bergizi, dan cukup, menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka stunting, yang menjadi indikator utama masalah gizi kronis pada anak. Meskipun terdapat penurunan angka stunting dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), target penurunan menjadi 14 persen pada tahun 2023 belum tercapai. Meskipun demikian, DKI Jakarta, sebagai provinsi percontohan, menunjukkan tren penurunan stunting yang positif, memberikan harapan bahwa strategi yang diterapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Di samping itu, upaya untuk menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) juga menjadi fokus utama. Data menunjukkan penurunan signifikan angka PoU, menandakan efektivitas strategi dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakat. Namun, masih diperlukan pemantauan dan pelaporan yang lebih baik untuk memastikan semua aspek dari tujuan 2 tercakup secara holistik. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen untuk memperbaiki data dan menerapkan strategi yang efektif, diharapkan dapat mengatasi tantangan dalam mencapai SDGs terkait tujuan 2 secara bertahap. Meskipun telah ada kemajuan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengimplementasikan beberapa strategi dalam penurunan prevalensi stunting. Salah satunya adalah melalui Gerakan Aksi Bergizi dengan pemberian vitamin tablet tambah darah (TTD) di sekolah, seperti yang dilakukan di SMAN 32 Jakarta. Aksi ini, yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, bertujuan untuk mencegah anemia pada remaja. Ini juga dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam kesehatan, khususnya bagi calon ibu, untuk memastikan kehamilan yang sehat dan mencegah potensi stunting pada anak.

Selain itu, Pemerintah juga memastikan akses mudah terhadap informasi, data, dan layanan terkait stunting. Hal ini dilakukan melalui website dan dashboard Jakarta Beraksi, yang menjadi pusat informasi dan konsultasi terkait penanganan stunting.

Pada tahap selanjutnya, sinergi menjadi strategi utama dalam penanganan stunting. Pemerintah terus berkoordinasi dengan stakeholder dalam menjalankan program Jakarta Beraksi. Program ini difokuskan pada pendampingan selama seribu hari pertama kehidupan anak, dengan pemberian makanan bergizi secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kolaborasi lintas sektor, termasuk lembaga non-pemerintah, juga ditingkatkan dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Pelaksanaan Gerakan Aksi Bersama

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2023)

Dukungan dari pelaku usaha, seperti PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), juga terlihat dalam penanganan stunting di Jakarta Timur. Melalui penggalangan dana dan kegiatan edukasi, TransJakarta memberikan sumbangan finansial sebesar Rp 282 juta. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan secara efektif oleh pemerintah daerah dan lembaga kesehatan untuk menyediakan program gizi berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, serta edukasi tentang pola makan yang sehat. Ini adalah contoh tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya.

Penyaluran Dana CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam Penanganan Stunting
Sumber: Antara (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

FoodCycle Indonesia memiliki salah satu program unggulan dalam penyediaan sarapan sehat dan bergizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penyaluran sarapan sehat dan bergizi sebanyak 27.000 paket sarapan kepada anak-anak yang berada di berbagai yayasan dan lembaga amal, seperti Yayasan Adz dzikri, Karunia Illahi Centre, dan lainnya, FoodCycle Indonesia secara signifikan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kelaparan dan kurang gizi di Indonesia. Penyaluran paket sarapan bukan hanya sekadar memberikan makanan, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan gizi dan kesehatan anak-anak yang berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Tujuan 3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Keadaan dan Kecenderungan

Dalam tiga tahun terakhir, Jakarta mencatatkan pencapaian yang baik pada beberapa indikator kesehatan. Salah satu indikator utama yang menunjukkan tren positif adalah peningkatan proporsi perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023, angka ini mencapai 98,15 persen, naik dari 96,89 persen pada tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dan pihak terkait dalam memberikan akses yang lebih luas, dan menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan medis selama proses persalinan. Pemerintah bersama lembaga kesehatan telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kampanye penyuluhan kepada masyarakat, sehingga perempuan semakin menyadari risiko dan pentingnya melahirkan dengan bantuan tenaga medis terlatih.

Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun yang Proses Melahirkan Terakhirnya di Fasilitas Kesehatan

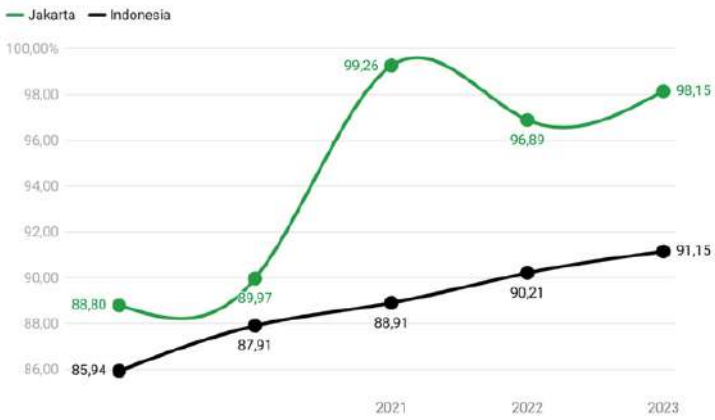

Sumber: BPS (2024), diolah.

Selain dalam aspek persalinan, capaian penting lainnya terdapat pada indikator imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak berusia 12 hingga 23 bulan. Pada tahun 2023, proporsi anak yang mendapatkan imunisasi lengkap meningkat menjadi 65,76 persen, naik dari 62,77 persen pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai upaya, termasuk perluasan cakupan program imunisasi, sosialisasi yang lebih intensif, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat imunisasi.

Kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak mereka dari penyakit melalui imunisasi semakin tinggi, didukung oleh keberadaan tenaga kesehatan yang proaktif dalam menjangkau keluarga-keluarga di wilayah Jakarta.

Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan

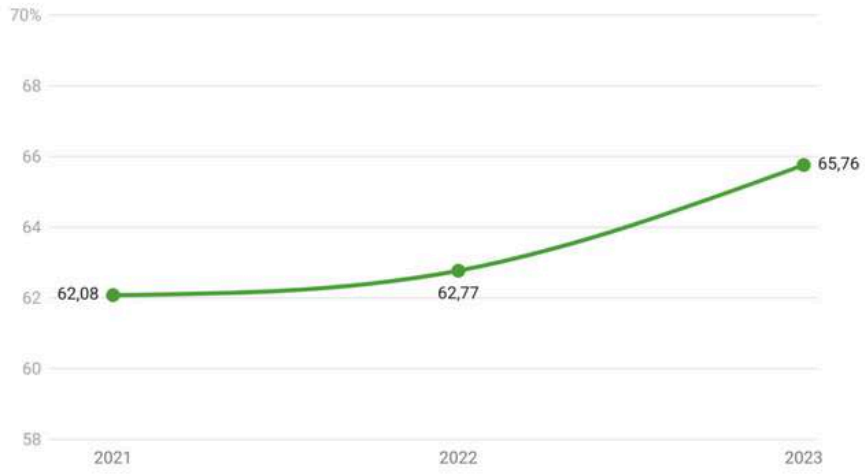

Sumber: Kementerian Kesehatan, Riset Kesehatan Dasar (2023)

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang masih harus diatasi dalam mencapai Tujuan 3 adalah kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan. Meskipun telah terjadi peningkatan positif dalam proporsi perempuan yang menggunakan fasilitas kesehatan untuk persalinan, kesenjangan akses masih menjadi masalah yang perlu diperbaiki di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lanjutan untuk memastikan bahwa semua perempuan, tanpa terkecuali, memiliki akses yang sama terhadap perawatan medis saat melahirkan, demi meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

Selanjutnya, tantangan lain terkait dengan mencapai Tujuan 3 adalah dalam hal cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan. Meskipun telah terjadi peningkatan dalam capaian imunisasi, masih ada masyarakat yang belum terjangkau oleh program imunisasi. Ini menyoroti perlunya upaya yang lebih intensif dalam sosialisasi tentang pentingnya imunisasi dan upaya yang lebih luas dalam mencapai semua anak dengan layanan kesehatan yang tepat waktu. Meskipun DKI Jakarta telah mencapai beberapa indikator kesehatan terkait dengan SDGs, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam memastikan bahwa semua warga merasakan manfaat dari upaya kesehatan yang dilakukan. Dengan komitmen yang berkelanjutan, DKI Jakarta dapat terus memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, sehingga mencapai tujuan kesehatan yang lebih tinggi.

Kebijakan dan Strategi

Terdapat kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta melaksanakan Posko Kesehatan Terintegrasi dalam rangka mendukung Mudik Lebaran 1444 H/2023 M. Posko tersebut beroperasi selama periode bulan april dan mei 2023. Dinkes menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi bus dan pemudik, serta menyediakan unit ambulans dan fasilitas kesehatan rujukan sebagai upaya mitigasi penularan penyakit.

Pemeriksaan kesehatan pengemudi meliputi tekanan darah, gula darah, alkohol respirasi, dan *amphetamine urine*, dilakukan di tiga stasiun, dua pelabuhan, dan tujuh terminal angkutan jalan dengan kerja sama dari Dinas Perhubungan. Selain itu, layanan kesehatan 24 jam juga dibuka selama cuti bersama lebaran di 44 Puskesmas dan 31 RSUD yang tersebar di DKI Jakarta.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, inisiatif untuk menciptakan kawasan tanpa asap rokok di RW 06, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, menunjukkan komitmen nyata dalam upaya menjaga kesehatan pernapasan dan lingkungan. Masyarakat memajang berbagai mural dan poster yang memuat himbauan untuk tidak merokok di sepanjang lorong jalan di kawasan tersebut. Langkah ini tidak hanya menjadi simbol visual, tetapi juga menjadi pengingat bagi warga akan pentingnya menjaga kesehatan pernapasan dan lingkungan.

Pelaksanaan Posko Kesehatan Terintegrasi
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2023)

Selanjutnya, deklarasi lima RT di wilayah tersebut sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menunjukkan semangat kolaboratif antara warga dalam upaya menjadikan lingkungan mereka bebas dari asap rokok yang berpotensi merugikan kesehatan. Tindakan konkret ini bukan hanya upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga langkah penting dalam memberikan contoh positif kepada generasi muda tentang pentingnya gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Harapannya, upaya-upaya seperti ini akan terus menginspirasi dan meluas ke wilayah lain, menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua, seiring dengan percepatan pencapaian SDGs.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RW 06 Kelurahan Kayu Manis
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam rangka percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis dengan melakukan kolaborasi bersama Perumda Pasar Jaya, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Gratis, Santunan Yatim & Dhuafa, serta mengadakan Bazar Sembako Murah di Pulau Tidung dan Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tujuan 4
Pendidikan Bermutu

Keadaan dan Kecenderungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengutamakan kualitas pendidikan yang merata dan inklusif bagi semua warga. Capaian pendidikan di DKI Jakarta pada tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam tingkat kelulusan SD, SMP, dan SMA. Meskipun demikian, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa semua anak menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan holistik dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai target penyelesaian pendidikan 100 persen di semua jenjang.

Dalam rangka mengatasi disparitas gender dalam akses pendidikan, rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/ laki-laki di DKI Jakarta menjadi perhatian. Meskipun terjadi penurunan APM pada jenjang SD, peningkatan APM pada jenjang SMP/MTs/ sederajat dan SMA/ SMK/ MA/ Sederajat memberikan harapan bahwa upaya penghapusan disparitas gender sedang berlangsung secara bertahap. Meskipun demikian, perlu dilakukan langkah tambahan untuk memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak.

Tingkat Penyelesaian Pendidikan di Jakarta

Presentase/Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan (%)

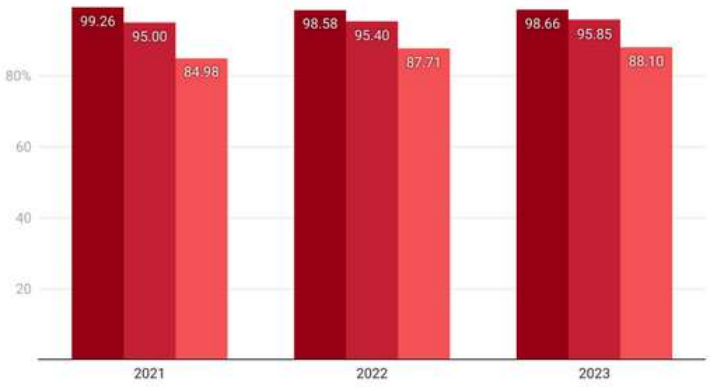

Sumber: BPS (2024), diolah.

APM dan APK di Jakarta Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	APM SD/MI	APK SD/MI	APM SMP/MTs	APK SMP/MTs	APM SMA/SMK/MA	APK SMA/SMK/MA
2018	98,03%	105,27%	80,81%	94,91%	60,01%	73,98%
2019	98,12%	104,83%	81,68%	91,02%	60,24%	74,77%
2020	98,05%	103,43%	82,47%	91,74%	60,42%	76,87%
2021	98,22%	103,17%	83,01%	91,56%	60,53%	77,08%
2022	98,37%	103,34%	84,22%	89,89%	60,88%	76,91%
2023	98,44%	103,63%	84,95%	95,78%	60,81%	77,40%

Sumber: BPS (2024), diolah.

Selain itu, perhatian khusus diberikan pada keterampilan TIK di DKI Jakarta. Meskipun terjadi penurunan proporsi remaja yang memiliki keterampilan TIK, peningkatan proporsi dewasa menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keterampilan TIK pada kelompok ini. Namun, penurunan proporsi remaja menyoroti perlunya analisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan ini.

Secara keseluruhan, capaian dan tantangan dalam pendidikan di DKI Jakarta mencerminkan progres menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait dengan indikator-indikator yang mencerminkan akses pendidikan yang merata (38,5% status tercapai), peningkatan kesetaraan gender dalam pendidikan (23,1% status membaik), dan perlunya perhatian khusus dalam aspek keterampilan TIK (7,7% status perlu perhatian khusus). Pentingnya pemantauan yang akurat terhadap kemajuan ini juga ditunjukkan oleh status data yang tidak tersedia untuk beberapa indikator (30,8%), menyoroti perlunya perbaikan dalam pengumpulan dan pelaporan data.

Tantangan dan Pembelajaran

Melihat tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta, terdapat beberapa pembelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi permasalahan di masa depan secara lebih efektif. Salah satu tantangan yang signifikan adalah memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua anak, terutama terkait dengan disparitas gender dan keterampilan TIK. Data menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam rasio angka partisipasi murni (APM) perempuan/laki-laki pada jenjang SD, serta penurunan proporsi remaja yang memiliki keterampilan TIK.

Pembelajaran utama dari tantangan ini adalah perlunya pendekatan yang lebih terfokus dan inklusif dalam merancang kebijakan pendidikan. Strategi yang dirancang harus memperhitungkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi akses pendidikan bagi berbagai kelompok, termasuk perempuan dan remaja. Selain itu, kebijakan pendidikan harus senantiasa mengadopsi pendekatan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini secara efektif. Program-program pendidikan harus didukung oleh partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk dukungan dari sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Penguatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan akan memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi permasalahan kedepan, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap progres pendidikan, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Dengan mengambil pembelajaran dari tantangan yang dihadapi saat ini, diharapkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di DKI Jakarta dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan dan Strategi

Peningkatan Kompetensi Pendidikan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta terus meningkatkan kompetensi pendidik melalui dua inisiatif utama. Pertama, aplikasi Jaklat terkait dengan Sistem Pengembangan Profesional Guru. Kedua, pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidik (P4). Peserta pelatihan dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, melibatkan pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik. Program pelatihan ini juga melibatkan berbagai mitra seperti Universitas Trisakti, Hebat Facilitation, Read Education, SMART Education, Asosiasi Dosen Indonesia, Politeknik Tempo, PT Ultima Tekno Solusindo, dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Selain itu, Dinas Pendidikan juga berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang. Program bantuan biaya operasional disediakan untuk PAUD baik sekolah negeri maupun swasta, untuk memastikan akses layanan PAUD merata di masyarakat.

Pelaksanaan Program Sekolah Komunitas
Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta (2023)

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan merencanakan kehadiran Jakarta Sekolah Komunitas mulai tahun 2023. Program ini merupakan kerjasama antar satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum dan aktivitas belajar, dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 151 Tahun 2023.

Pelaksanaan program Jakarta Sekolah Komunitas melibatkan seluruh stakeholders pendidikan, dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB negeri dan swasta. Dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan, terdapat 812 sekolah komunitas yang melibatkan 4.491 sekolah negeri dan swasta dari berbagai jenjang pendidikan, dengan kegiatan peningkatan mutu bagi guru dan siswa. Program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam optimalisasi sistem pendidikan di DKI Jakarta.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Yayasan Bulir Padi (YBP) telah menjalin kemitraan dengan Yayasan Rumah Langit (YRL) untuk melaksanakan Program Beasiswa Muda Mandiri dan Tutoring YBP pada semester II ini. Tujuan dari program ini adalah memberikan bantuan kepada anak-anak marjinal yang berisiko putus sekolah, dengan harapan mereka dapat termotivasi untuk menyelesaikan pendidikan dasar mereka dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Melalui dukungan finansial dari YBP dan program bimbingan belajar, anak-anak asuhan YRL diharapkan dapat mengembangkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi tenaga kerja terampil di masa mendatang. Hal ini diharapkan dapat membantu mereka untuk memperbaiki kondisi finansial keluarga mereka.

Program Beasiswa Muda Mandiri dan Tutoring YBP bagi Anak-Anak Jalanan
Sumber: Yayasan Bulir Pagi (2023)

Program ini sangat relevan dengan upaya percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam mencapai target pendidikan berkualitas (SDG 4). Dengan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu di kawasan kumuh Kramat Jati, Jakarta Timur, program ini membantu mengurangi ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesempatan ekonomi. Selain itu, dengan memberikan bimbingan belajar dan beasiswa kepada anak-anak marjinal, program ini tidak hanya memberikan kesempatan pendidikan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi diri mereka sendiri dan keluarga dari anak-anak marjinal.

Dengan kolaborasi antara YBP dan YRL dalam melaksanakan program ini, diharapkan bahwa anak-anak penerima manfaat dapat tumbuh dan berkembang secara holistik, baik dalam bidang akademis maupun keterampilan hidup. Melalui upaya ini, YBP dan YRL turut berkontribusi dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan dan menciptakan perubahan positif bagi masyarakat yang membutuhkan, sejalan dengan visi SDGs untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua.

Tujuan 5
Kesetaraan Gender

Keadaan dan Kecenderungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memfokuskan perhatian pada penghapusan praktik berbahaya terkait perkawinan dini dan paksa, khususnya dalam konteks proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah atau tinggal bersama sebelum usia 18 tahun. Analisis data menunjukkan adanya tren kenaikan dari tahun 2022 hingga 2023, dengan proporsi tersebut naik dari 2,07 persen menjadi 2,12 persen. Kenaikan ini mencerminkan tantangan yang masih dihadapi dalam mengeliminasi praktik pernikahan dini, menandakan perlunya respons yang lebih tegas dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Peningkatan proporsi ini memperlihatkan urgensi untuk mengambil tindakan preventif yang lebih efektif guna melindungi hak-hak perempuan dan mencegah resiko perkawinan dini dan paksa. Diperlukan upaya lebih besar dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang secara penuh, tanpa terbebani oleh tekanan perkawinan yang tidak sesuai dengan kehendak dan kesejahteraan anak-anak dan remaja.

Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin

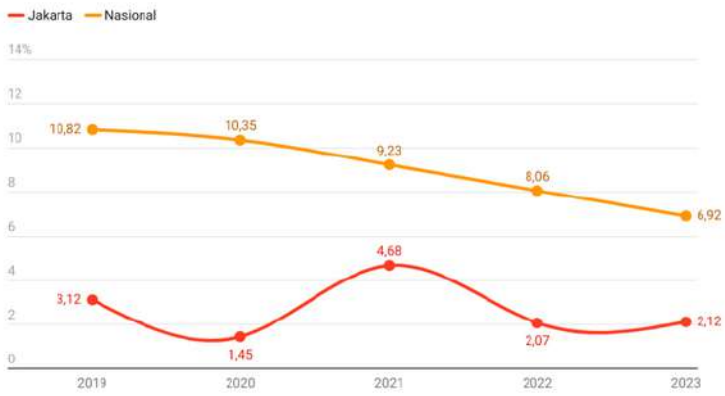

Sumber: BPS (2023), diolah.

Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam

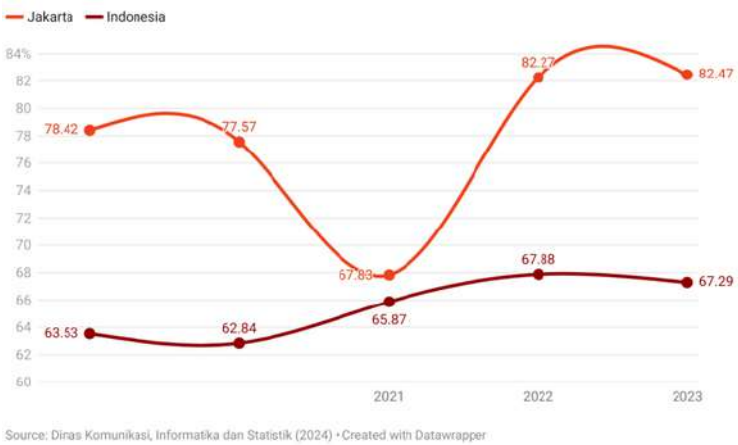

Sumber: Diskominfotik (2024), diolah.

Sedangkan pada proporsi individu yang menguasai atau memiliki telepon genggam selama tiga tahun terakhir berturut-turut mengalami tren peningkatan sebesar 82.47 persen. Tren ini menunjukan adanya linearitas penggunaan telepon dengan kebutuhan individu (laki-laki dan perempuan) dalam mendukung aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, belajar, menyalurkan hobi dan lain sebagainya. Tren peningkatan ini berartikan bahwa teknologi semakin tahun akan semakin berkembang dan dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan gender.

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi praktik perkawinan dini dan paksa di Provinsi DKI Jakarta adalah kompleksitas dari akar masalah tersebut. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait, tren peningkatan proporsi perempuan dalam rentang usia 20-24 tahun yang menikah atau tinggal bersama sebelum usia 18 tahun menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi.

Salah satu tantangan utama adalah perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi persepsi terhadap pernikahan dan peran perempuan dalam masyarakat. Norma-norma yang menekankan nilai-nilai tradisional sering kali membuat sulit bagi perempuan untuk menolak perkawinan yang diatur oleh keluarga atau masyarakat, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau kepentingan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya menjadi penting dalam mengatasi tantangan ini.

Selain itu, kendala dalam akses terhadap pendidikan dan informasi juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap praktik perkawinan dini. Perempuan yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan mungkin kurang mampu untuk membuat keputusan yang berbasis pengetahuan tentang masa depan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan formal dan informal, serta penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses, menjadi kunci dalam mengatasi kendala ini.

Di samping tantangan tersebut, pembelajaran yang dapat diambil dari upaya mengatasi praktik perkawinan dini dan paksa adalah pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan. Masalah kompleks seperti ini membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat secara luas. Kolaborasi ini tidak hanya memungkinkan pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan efektivitas dari berbagai program dan kebijakan yang dilaksanakan.

Selain itu, pembelajaran lainnya adalah pentingnya pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap program dan kebijakan yang telah diimplementasikan. Dengan melakukan pemantauan secara terus-menerus, kita dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari berbagai inisiatif, serta membuat penyesuaian yang diperlukan agar upaya-upaya tersebut dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan penghapusan praktik perkawinan dini dan paksa.

Secara keseluruhan, tantangan dan pembelajaran yang muncul dalam upaya mengatasi praktik perkawinan dini dan paksa di Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah yang kompleks seperti ini. Dengan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa praktik-praktik berbahaya ini dapat diminimalisir, dan hak-hak perempuan dapat lebih diakui dan dilindungi di masa yang akan datang.

Kebijakan dan Strategi

Pos Sapa untuk Perempuan dan Anak

Pos SAPA di Gedung B Lantai 2 Terminal Terpadu Pulo Gebang, menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam menciptakan ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah bagi perempuan dan anak-anak (BeritaJakarta.id, 2023). Dengan adanya pos ini, petugas yang telah dilatih dapat memberikan layanan yang sensitif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, serta menerima informasi dan rujukan dengan baik.

POS SAPA di Terminal Terpadu Pulo Gebang
Sumber: DPPAPP (2023)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung kesetaraan gender, melakukan peningkatan kapasitas perempuan di lembaga politik pada tahun 2023 (Bakesbangpol DKI Jakarta, 2023). Kegiatan ini melibatkan kader-kader partai politik di DKI Jakarta, dilaksanakan pada bulan Maret 2023, dan diadakan kembali dalam bentuk webinar pada bulan Mei 2023. Langkah ini merupakan upaya konkret dalam mempersiapkan perempuan untuk berperan aktif dalam proses politik, terutama menyongsong tahun politik di 2024.

Pencapaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung kesetaraan gender juga terbukti dengan meraih kembali Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023 dengan kategori Utama (Sekda Provinsi DKI Jakarta, 2023). Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai pengakuan terhadap upaya Provinsi DKI Jakarta dalam memperhatikan kesetaraan gender. Selain itu, beberapa wilayah di DKI Jakarta, seperti Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat, juga meraih predikat Nindya, Madya, dan Pratama, menandakan komitmen mereka dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya.

Jakarta Menerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2023
Sumber: Bappeda DKI Jakarta (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menggelar diskusi risalah perempuan berkemajuan dalam meningkatkan keilmuan keagamaan dengan tema “Jakarta Berinovasi dengan teknologi berkelanjutan bagi perempuan berkemajuan” dengan pembahasan bahwa perempuan yang memberikan kemanfaatan dan fokus pada keilmuan bidang keagamaan. Selanjutnya program yang banyak dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dapat disinergikan dengan Aisyiyah melalui pemberdayaan ekonomi syariah melalui UMKM bagi perempuan di DKI Jakarta. Salah satu programnya adalah BUEKA (Badan Usaha Ekonomi Aisyiyah). Adapun program GAS “Gerakan Aisyiah Sehat” juga dilakukan sebagai salah satu mendukung untuk pencegahan stunting di DKI Jakarta.

Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) DKI Jakarta Menggelar Diskusi Risalah Perempuan Berkemajuan
Sumber: PWA (2023)

Tujuan 6
Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Keadaan dan Kecenderungan

Dalam rangka memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua di Jakarta, sejumlah indikator menunjukkan capaian yang terus membaik. Pada indikator persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman meningkat dari 65,41 persen menjadi 66,73 persen pada tahun 2023.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Layanan Air Minum yang Dikelola Secara Aman

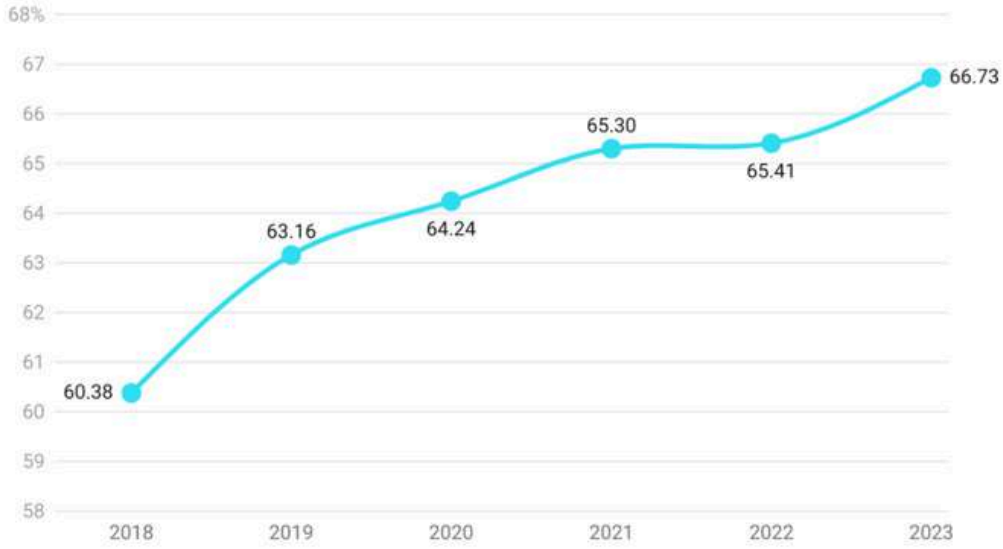

Sumber: BPS (2023)

Begitu juga pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak 92,79 persen meningkat menjadi 93,5 persen. Capaian positif lainnya juga terdapat pada persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka menurun dari 0,59 persen menjadi 0,13 persen juga pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) 21,40 persen meningkat menjadi 28,01 persen. Namun pada persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja 3,14 persen menurun menjadi 3,06 persen.

Selain akses sanitasi, tujuan 6 juga melingkupi isu indikator terkait dengan perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu yang diindikasikan pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) meningkat dari 26,25 menjadi 27,17. Perhitungan IKTL di Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan membandingkan seluruh luas lahan bervegetasi baik hutan dan non hutan, terhadap luas wilayah administrasi, Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang digunakan dalam penentuan kualitas tutupan lahan diantaranya adalah tutupan hutan, belukar di kawasan hutan, belukar pada fungsi lindung, areal rehabilitasi hutan, RTH, tutupan vegetasi relevan lainnya, taman keanekaragaman hayati (kehati), dan kebun raya.

Terlihat bahwa nilai IKTL hampir di seluruh kota berada pada rentang 23 hingga 28, seperti pada Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Utara, yang terkategori “kurang”. Yang perlu mendapatkan perhatian lebih ialah Kota Jakarta Barat, dengan nilai indeks sebesar 23,13 sehingga termasuk dalam kategori “Sangat Kurang”. Khusus untuk Kabupaten Kepulauan Seribu, nilai IKTL mencapai 87,20 yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”.

Nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta telah berada 0,42 poin di atas target nilai IKTL tahunan 2023, yakni sebesar 27,17. Jika lebih ditarik ke belakang, nilai IKTL Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 IKTL bernilai 25,99, dan meningkat menjadi 26,24 pada tahun 2021.

Tantangan dan Pembelajaran

Kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan timbulnya pemukiman padat dan kumuh sehingga tidak memungkinkan untuk mengatur jarak sumur dengan septik tank lebih dari 10 meter, bahkan ada yang langsung membuang limbah domestiknya ke badan air. Padatnya pemukiman tersebut menyulitkan untuk membangun fasilitas buang air besar sesuai standar. Banyaknya kegiatan usaha di Provinsi DKI Jakarta juga menambah volume air limbah yang ditampung, baik berupa air limbah domestik maupun air limbah industri.

Berdasarkan laporan yang dirilis DLH di tahun 2023, pada tahun 2022, nilai IKA yang rendah menunjukkan kondisi kualitas air sungai di Jakarta sudah dalam posisi cemar tinggi karena pada bagian hulu kualitasnya sudah dalam kondisi tercemar ringan dan tercemar sedang. Selain itu, persoalan sanitasi dan air limbah masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya, cemaran E.coli di Jakarta masih di atas standar.

Rendahnya pelayanan air perpipaan dan kualitas air permukaan di DKI Jakarta yang cenderung tercemar, meningkatkan penggunaan air tanah untuk pemenuhan air bersih. Penggunaan air tanah dalam ini berkonsekuensi negatif, diantaranya terjadinya penurunan muka tanah dan intrusi air laut. Penurunan muka tanah tertinggi berada di sebagian wilayah utara Cekungan Air Tanah (CAT Jakarta).

Kebijakan dan Strategi

Untuk memenuhi kekurangan layanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I termasuk juga berupaya untuk memperluas cakupan pelayanan dengan memperluas cakupan pelayanan melalui penambahan penyediaan air bersih baik dari pengembangan fasilitas pengolahan air bersih di wilayah Jakarta maupun pemenuhan pasokan air bersih dari luar Jakarta, penurunan tingkat kebocoran air juga memperbaiki kualitas layanan air bersih yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Pemprov DKI Jakarta juga berupaya melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air bersih. Untuk kawasan krisis air bersih dan rumah susun dilaksanakan melalui pembangunan kios air, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pengelolaan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan BWRO untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kegiatan Susur Sungai
Sumber: DSDA (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam rangka mengakselerasi tujuan 6 untuk memastikan akses sanitasi dan air bersih untuk semua terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah membuat regulasi terkait pelarangan penggunaan air tanah, pengelolaan air minum, dan pengolahan air limbah.

Salah satu tantangan yang terdapat pada tujuan 6, yakni pemakaian air tanah yang berlebihan di DKI Jakarta, dalam menanggulangi hal tersebut telah dirilis aturan penggunaan air tanah di Jakarta. Regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Zona Bebas Air Tanah serta larangan penggunaan air tanah di sejumlah lokasi mulai 1 Agustus 2023.

Kemudian dari sisi pengelolaan air minum, di tahun 2023 juga ditandai sebagai berakhirnya swastanisasi di Jakarta. Sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra, kerja sama mereka berakhir pada 31 Januari 2023 lalu. Swastanisasi air ini berakhir, dan PAM Jaya akan melakukan pelayanan langsung kepada pelanggan. PAM Jaya dengan PT Moya Indonesia menandatangani PKS tentang Sistem Penyelenggaraan Air Minum (SPAM) melalui optimalisasi aset eksisting dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling. Menurut PAM Jaya untuk mencapai 100 persen cakupan pelayanan, PAM Jaya membutuhkan tambahan suplai air sebesar 11.150 liter per detik serta pipa sepanjang 4.000 km (DSDA, 2023).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perumda PAM Jaya dan Perumda Paljaya
Sumber: Berita Jakarta (2023)

Dari sisi pengolahan air limbah, terdapat upaya lainnya yang dilakukan BUMD DKI Jakarta, yakni Perumda Paljaya. Perumda Paljaya menjalin kerja sama dengan Perumda PAM Jaya terkait pemanfaatan lahan untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan TB Simatupang. Penyediaan IPAL dan jaringan perpipaan air limbah di kawasan TB Simatupang ini didasari oleh tren perkembangan area tersebut yang aktivitas domestiknya meningkat drastis di beberapa tahun terakhir baik melalui perkembangan area permukiman maupun kawasan komersial seperti perkantoran, pusat perbelanjaan dan apartemen.

IPAL di Kawasan TB Simatupang ini juga dilengkapi pengolahan tersier yang dapat menghasilkan kualitas olahan air limbah yang sesuai dengan standar pemerintah yang bukan hanya layak untuk dikembalikan ke badan air namun juga sudah dapat dimanfaatkan sebagai air baku yakni air minum, air untuk keperluan sanitasi maupun untuk dijadikan air curah. IPAL di Kawasan TB Simatupang akan dibangun di area lahan IPA Cilandak milik Perumda PAM Jaya seluas 2.910 meter persegi dengan menggunakan teknologi *Moving Bed Biofilm Reactor* (MBBR) dengan rencana kapasitas total 6.000 meter kubik dan direncanakan mampu melayani 112.665 Populasi Ekuivalen (PE). Pembangunan Tahap 1 yang direncanakan akan dimulai awal tahun 2023 ini akan berkapasitas 4.000 meter kubik dengan jaringan perpipaan tahap 1 sepanjang 3.895 meter (Perumda Paljaya, 2023).

Tujuan 7
Energi Bersih dan Terjangkau

Keadaan dan Kecenderungan

Dalam rangka menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern di Jakarta, sejumlah indikator menunjukkan capaian yang terus membaik. Rasio Elektrifikasi Jakarta telah mencapai 100 persen sejak tahun 2018 dan terus terjaga hingga tahun 2023. Angka ini juga sudah mencapai target tahun berjalan sebesar 100 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa setiap rumah tangga di Jakarta telah memiliki akses terhadap energi listrik.

Selain itu, rasio penggunaan gas rumah tangga di Jakarta konsisten mengalami kenaikan sejak 2019. Pada 2022, angka tersebut mencapai 95,59 persen, lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 92,15 persen. Capaian ini mencerminkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta telah memiliki akses terhadap gas sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi DKI Jakarta

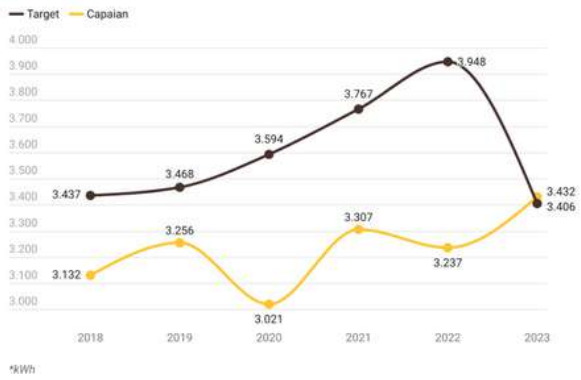

Sumber: DTKTE (2024)

Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga Jakarta

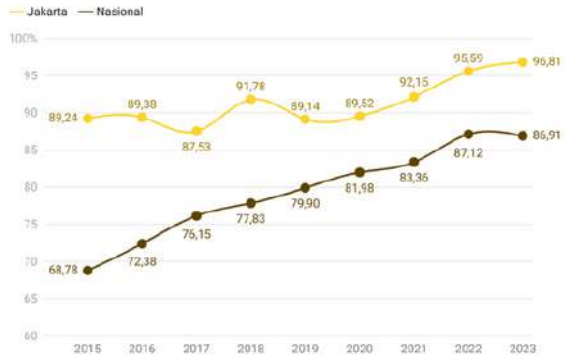

Sumber: BPS (2024), diolah.

Capaian indikator lainnya juga mengalami kenaikan. Konsumsi listrik per kapita di DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.432 kWh, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 3.238 kWh. Angka tersebut juga telah mencapai target tahun berjalan yang ditetapkan sebesar 3.432 kWh. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam upaya peningkatan konsumsi listrik di Jakarta. Meskipun peningkatan ini dapat mencerminkan pertumbuhan ekonomi atau perubahan pola konsumsi, penting untuk memastikan bahwa capaian tersebut juga didukung oleh upaya efisiensi energi dan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan.

Tantangan dan Pembelajaran

Dalam upaya mencapai Tujuan 7, Provinsi DKI Jakarta menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di sektor energi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya memberikan kewenangan terbatas bagi pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, seperti panas bumi dan bahan bakar nabati. Namun, regulasi ini tidak cukup rinci dalam mengatur sumber energi lainnya seperti surya, angin, dan air, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan juga belum menyediakan pedoman yang memadai untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di tingkat daerah, seperti penelitian, insentif, dan pendanaan, yang dapat menghambat pertumbuhan energi bersih.

Kebijakan dan Strategi

Untuk mendorong pencapaian Tujuan 7, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan dan strategi yang berfokus pada pengembangan energi terbarukan, penggunaan energi bersih dalam sektor transportasi dan efisiensi energi.

Untuk mendorong pemanfaatan energi bersih, pemerintah memiliki fokus pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun PLTS pada 20 gedung milik pemerintah dengan total kapasitas 590 kWp. Hingga tahun 2023, Jakarta telah memiliki 431 pembangkit, terdiri dari 422 on-grid dan 11 hybrid, dengan total kapasitas mencapai 28,13 MW. Langkah ini menunjukkan komitmen dalam mengadopsi sumber energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Instalasi PLTS Atap di Kawasan Masjid Istiqlal
Sumber: Tempo.co

Jumlah dan Kapasitas PLTS Provinsi DKI Jakarta

Kapasitas (VA)		Jumlah Pembangkit
On grid	11.350.441	422
Hybrid	204.634	9
Total	**11.555.065**	**431**

Sumber: DTKTE (2024)

Jumlah dan Kapasitas PLTS pada Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jenis Gedung	Jumlah	Kapasitas (kWp)
Fasilitas Kesehatan	12	350
Fasilitas Olah Raga	3	90
Gedung Kantor	5	180

Sumber: DTKTE (2024)

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berupaya mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan bakar tidak ramah lingkungan, seperti batu bara. Sebagai contoh, Pemprov DKI Jakarta telah mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (*Refuse Derived Fuel*/RDF) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Dengan fasilitas tersebut, ditargetkan sebanyak 2.000 ton sampah dapat diolah menjadi 700 ton RDF per hari. RDF dapat dimanfaatkan sebagai campuran atau bahkan pengganti batu bara yang masih digunakan sebagai bahan bakar utama industri. Hingga saat ini, RDF tersebut akan digunakan untuk bahan bakar di dua pabrik semen, yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Solusi Bangun Indonesia. Untuk memperluas upaya tersebut, Pemerintah Provinsi juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN dalam kerjasama pengelolaan sampah menjadi sumber energi alternatif (Berita Jakarta, 2023).

Penandatanganan MoU Pengelolaan Sampah Menjadi RDF
Sumber: rri.co.id (2023)

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya memperluas pemanfaatan energi bersih dengan mendorong penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah Provinsi terus mempercepat implementasi penggunaan kendaraan listrik di wilayah DKI Jakarta. Sejak tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan sejumlah insentif untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik pribadi seperti bebas melewati ganjil genap dan fasilitas parkir gratis di lokasi parkir yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga melanjutkan program elektrifikasi transportasi publik dengan meluncurkan armada bus listrik Transjakarta. Hingga tahun 2023, sebanyak 100 bus listrik telah beroperasi dan tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta dan merupakan bagian dari upaya untuk mencapai elektrifikasi 100 persen pada tahun 2030.

Kemudian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas operasional (KDO). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan 186 motor listrik kepada para petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta (Berita Jakarta, 2023). Penggunaan motor listrik ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upaya mendorong efisiensi energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah secara rutin melakukan audit energi pada gedung/bangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (PPSDM KEBTKE, n.d., IREEM, 2023). Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KBTKE) untuk melakukan audit terhadap 10 gedung/ bangunan pemerintah daerah. Bangunan tersebut antara lain Gedung Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, serta Rumah Sakit Umum Daerah Jati Padang.

Bus Listrik Transjakarta
Sumber: istockphoto.com (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

PT MRT Jakarta (Perseroda) telah menetapkan sembilan tahapan transisi untuk mencapai 25 persen energi terbarukan dalam periode 2021 hingga 2025. Upaya ini merupakan wujud komitmen PT MRT Jakarta dalam mendukung pencapaian target nol emisi Jakarta pada tahun 2050, dan Indonesia pada 2060. Langkah-langkah strategis untuk mengurangi emisi dilakukan dengan mengoptimalkan efisiensi energi, terutama pada fasilitas dan kegiatan pendukung. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan otomatisasi, digitalisasi, dan teknologi hemat energi, serta menginisiasi penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) (MRT Jakarta, 2022).

Pada tahun 2022, PT MRT Jakarta mencatat kinerja positif dalam pengelolaan energi bersih dengan mengalokasikan 10 persen atau setara dengan 5.000 MWh listrik MRT Jakarta berasal dari sumber energi terbarukan (MRT Jakarta, 2022). Capaian ini dibuktikan dengan penerbitan sertifikat Energi Baru Terbarukan oleh lembaga APX Inc., yang menjadikan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai badan usaha milik daerah pertama yang memperoleh bukti penggunaan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang.

Inisiatif PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam memanfaatkan energi terbarukan juga terlihat dari program "birukan atap, birukan langit" yang diluncurkan pada tahun 2021. Selanjutnya, pada tahun 2022, PT MRT Jakarta melakukan kajian studi energi terbarukan untuk mendukung pembangunan listrik surya atap di stasiun dan infrastruktur di sekitarnya yang masuk dalam area pengembangan kawasan transit dengan dukungan dari *United States Trade and Development Agency* (USTDA). Kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret pada tahun 2023, dengan target bahwa pada tahun 2025, 25 persen dari sistem MRT Jakarta terkoneksi dengan energi terbarukan.

Pengisian Baterai Bertenaga Surya di Kawasan Dukuh Atas
Sumber: Bisnis.com (2022)

Tujuan 8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Keadaan dan Kecenderungan

Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 tetap menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta mencapai 4,96 persen secara tahunan, sedikit lebih lambat dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,25 persen. Perekonomian Jakarta tahun 2023 yang dihitung berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 3.442,87 triliun dan atas dasar harga konstan mencapai Rp 2.050,47 triliun.

Pertumbuhan PDRB Jakarta

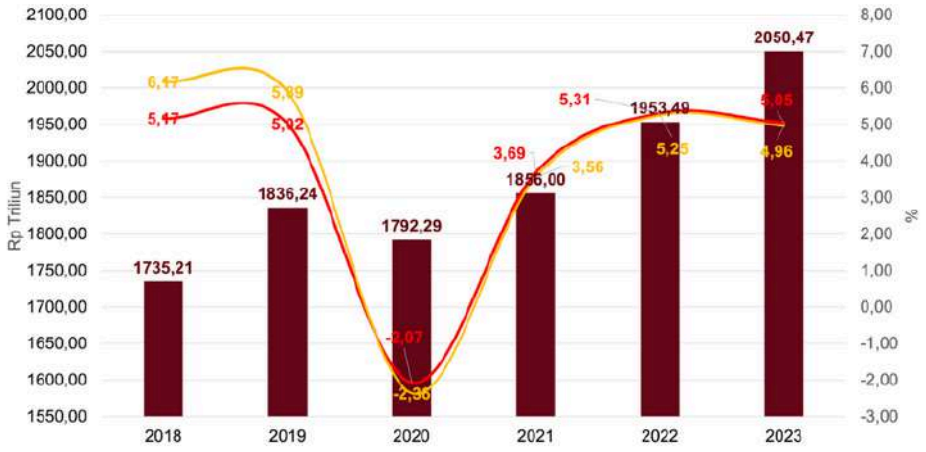

Sumber: BPS (2024), diolah.

Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,05 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) yang mencapai 9,84 persen. Adapun Struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2023 didominasi oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,67 persen. Sementara dari sisi komponen pengeluaran, proporsi pengeluaran terbesar adalah Ekspor Barang dan Jasa sebesar 66,29 persen kemudian diikuti Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 62,15 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 34,24 persen.

Dalam konteks per kapita, pertumbuhan ekonomi Jakarta terus mengalami peningkatan. Pada 2023, PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp322,62 juta rupiah, atau tumbuh sebesar persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp298,36 juta juta (BPS, 2024). Angka tersebut juga telah mencapai target tahun berjalan yang ditetapkan dalam RAD TPB 2023-2026 sebesar Rp317,25 juta. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB per kapita juga mencapai 5,06 persen pada tahun 2023, mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 4,55 persen. Peningkatan ini mencerminkan adanya kenaikan pendapatan rata-rata penduduk DKI Jakarta selama periode tersebut.

Pertumbuhan PDRB Per Kapita Jakarta

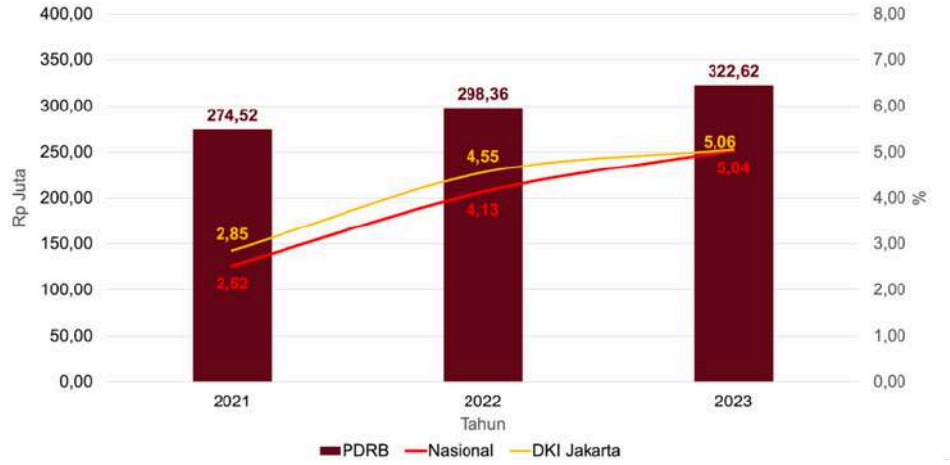

Sumber: BPS (2024), diolah

Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi telah mendorong peningkatan lapangan kerja di Jakarta, yang juga berdampak pada kenaikan partisipasi angkatan kerja. Menurut data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja di Jakarta mencapai 5,43 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 174 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 2,13 persen poin. Dari jumlah tersebut, penduduk Jakarta yang bekerja mencapai 5,07 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 197 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2022. Salah satu sektor yang mengalami peningkatan lapangan pekerjaan terbesar adalah sektor industri pengolahan, dengan penambahan sebanyak 61 ribu orang.

Pulihnya ekonomi juga telah berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran di Jakarta. Menurut data yang diperoleh pada bulan Agustus 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta mencapai 6,53 persen, mengalami penurunan sebesar 0,65 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. Jika dilihat dari segi jenis kelamin, pada bulan Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka pada -

laki-laki sebesar 7,76 persen, sedangkan pada perempuan sebesar 4,55 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,23 persen poin dan 1,47 persen poin jika dibandingkan Agustus 2022.

Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta

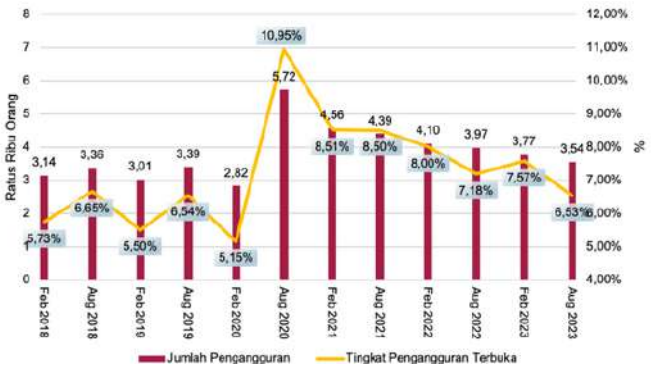

Sumber: BPS (2023), diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin

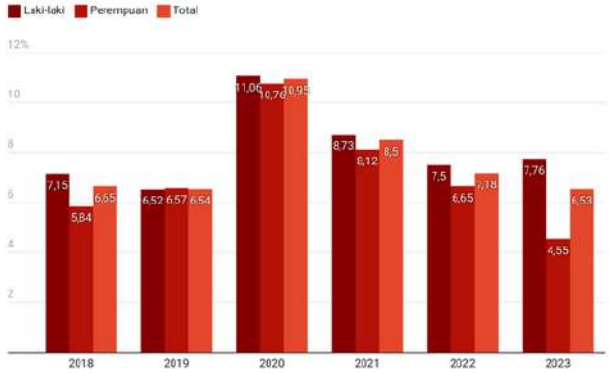

Sumber: BPS (2024), diolah

Selama periode Agustus 2022 hingga Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di seluruh Kabupaten/Kota di Jakarta mengalami penurunan, kecuali di Kota Jakarta Pusat. Penurunan TPT yang paling signifikan terjadi di Kota Jakarta Timur, dengan penurunan sebesar 1,15 persen poin. Namun, TPT di Kota Jakarta Pusat justru mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022. TPT tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Seribu sebesar 8,11 persen, diikuti oleh Kota Jakarta Timur dengan TPT sebesar 7,24 persen. Sementara itu, TPT terendah terdapat di Kota Jakarta Selatan, yakni sebesar 5,37 persen.

Sementara itu, capaian indikator lainnya menunjukkan tren penurunan. Persentase setengah pengangguran mencapai 2,96 persen pada Agustus 2023, lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 2,71 persen. Hal tersebut dapat mencerminkan dua kondisi, yakni apakah pekerja paruh waktu menjadi pekerja penuh, atau menjadi pengangguran.

Perkembangan Tingkat Pekerja Penuh, Pekerja Paruh Waktu, dan Tingkat Setengah Pengangguran

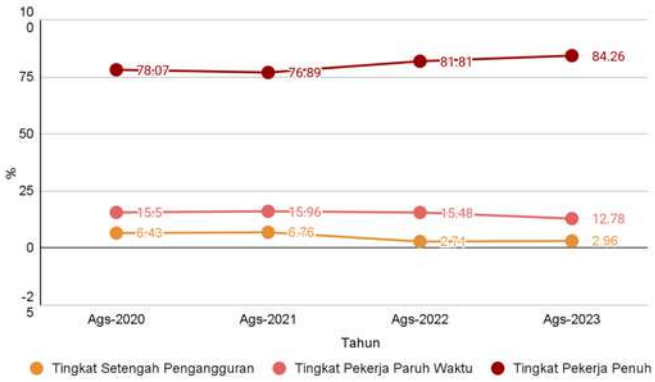

Sumber: BPS (2024), diolah

Jika dilihat dari angka partisipasi kerja yang meningkat dan tingkat pengangguran yang menurun, pekerja paruh waktu tersebut lebih mungkin menjadi pekerja penuh dibanding menjadi pengangguran. Hal tersebut juga dikuatkan dengan capaian proporsi pekerja penuh yang terus meningkat sejak Agustus 2021. Pada Agustus 2023, proporsi pekerja penuh di DKI Jakarta mencapai 84,26 persen (BPS, 2024).

Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal juga terus meningkat, utamanya didorong oleh meningkatnya pekerja dengan status buruh/karyawan/ pegawai. Pada Agustus 2023, proporsi pekerja formal mencapai 63,77 persen, mengalami kenaikan dibandingkan dengan Agustus 2022 yang sebesar 63,12 persen. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan menuju pekerjaan yang lebih terstruktur dan terjamin dalam sektor formal.

Di sisi lain, proporsi pekerja informal mengalami penurunan menjadi 36,23 persen dari sebelumnya 36,88 persen pada Agustus 2022. Meskipun masih cukup signifikan, penurunan ini menunjukkan pergeseran sebagian tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal, yang dapat dianggap sebagai indikator positif dalam memperkuat stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja.

Proporsi Pekerja Formal dan Informal

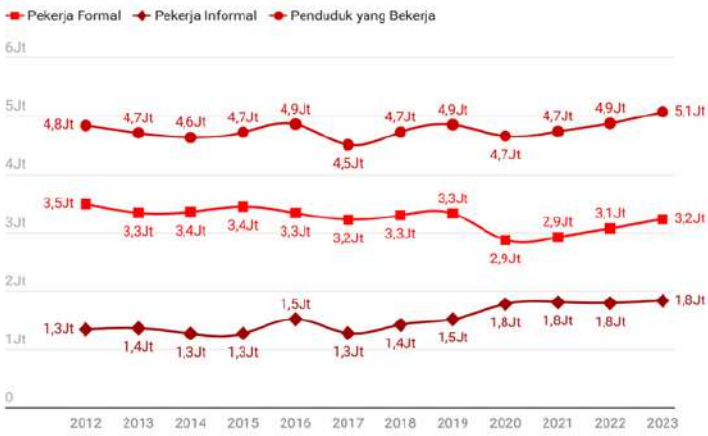

Sumber: BPS (2024), diolah

Capaian sejumlah indikator yang terkait dengan pekerja anak juga tercatat mengalami perbaikan. Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja mengalami penurunan dari 0,82 persen pada tahun 2021 menjadi 0,61 persen pada tahun 2022 (BPS, 2023). Selain itu, persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment, or Training/ NEET) juga mengalami penurunan dari 20,47 persen pada tahun 2021 menjadi 17,19 persen pada tahun 2022 (BPS, 2023). Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan tindakan untuk melindungi hak-hak anak serta memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diperlukan.

Persentase Anak yang Bekerja dan NEET

Sumber: BPS (2023), diolah

Sementara itu, tingkat produktivitas pekerja di Provinsi DKI Jakarta tercatat mengalami kondisi penurunan. Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja pada tahun 2023 mencapai 0,88 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 2,27 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas ekonomi per individu bekerja di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan relatif pada periode tersebut.

Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja/Tingkat Pertumbuhan PDRB Riil Per Orang Bekerja Per Tahun

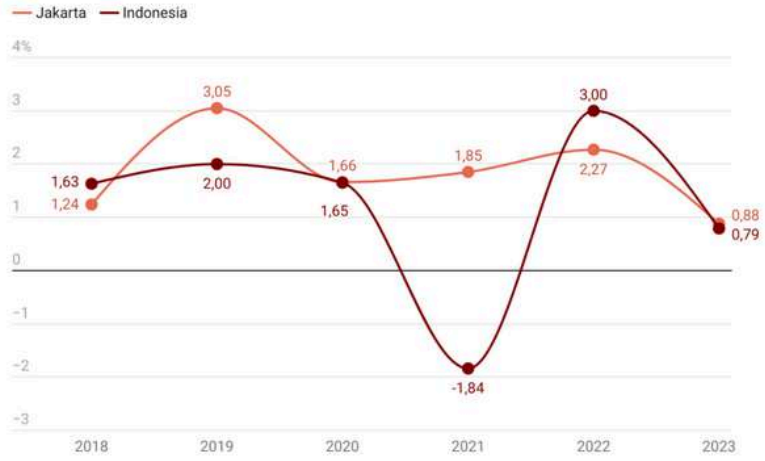

Sumber: BPS (2024), diolah.

Sektor Pariwisata

Selama tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta mencatat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan nusantara mencapai 32.391.067 orang, meningkat 74,55 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 18.556.888 orang (Disparekraf, 2024). Meski demikian, pencapaian ini masih belum mencapai target tahun berjalan yang ditetapkan sebesar 56 juta orang.

Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Provinsi DKI Jakarta

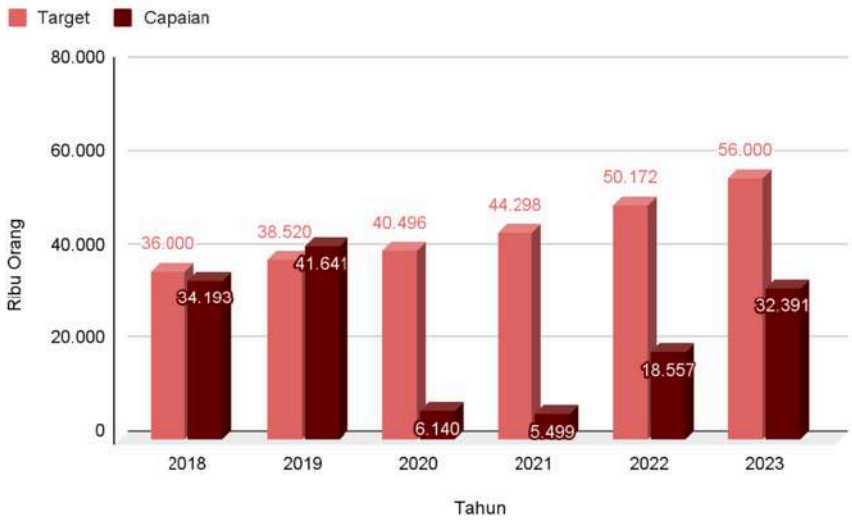

Sumber: Disparekraf (2024) diolah.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2023, terdapat 1.963,06 ribu kunjungan, yang merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 938,99 ribu kunjungan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam minat wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengunjungi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023. Jumlah kunjungan tertinggi tercatat pada bulan Agustus 2023 sebesar 218,68 ribu kunjungan, sementara jumlah kunjungan terendah tercatat pada bulan April 2023 sebesar 99,36 ribu kunjungan.

Perkembangan Jumlah Wisman Bulanan

Sumber: BPS (2024)

Tantangan dan Pembelajaran

Pada tahun 2023, DKI Jakarta dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mempengaruhi upaya pencapaian Tujuan 8, terutama karena tahun tersebut merupakan tahun politik. Sikap hati-hati investor selama periode pemilu berpotensi menghambat investasi, seperti yang tercermin dari data historis pertumbuhan investasi pada periode pemilu sebelumnya, yakni pada tahun 2019 dan 2014. Pada tahun 2019, pertumbuhan investasi melambat dari 2,18 persen pada triwulan IV 2018 menjadi 1,55 persen (yoy) pada triwulan I 2019, dan kembali melambat pada triwulan II 2019 menjadi -0,97 persen (yoy). Demikian pula pada tahun 2014, pertumbuhan investasi melambat dari 3,18 persen (yoy) pada triwulan II 2014 menjadi 1,59 persen (yoy) pada triwulan III 2014, sebelum kembali meningkat setelah pelaksanaan pemilu (Bank Indonesia, 2024).

Perlambatan investasi di Provinsi DKI Jakarta salah satunya dapat tercermin dari pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada tahun 2023, pertumbuhan PMTB DKI Jakarta mencapai 3,89 persen, mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,48 persen. Selain itu, perlambatan kinerja investasi juga terindikasi dari perkembangan investasi kegiatan usaha pada Survei Kegiatan Dunia Usaha, yang menurun menjadi 18,5 persen pada triwulan IV 2023 (Bank Indonesia, 2024).

Tantangan lainnya adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, serta berlanjutnya kenaikan suku bunga bank sentral negara-negara di dunia. Kondisi tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2023 dengan mempengaruhi kinerja ekspor. Pada 2023, kinerja ekspor Provinsi DKI Jakarta tercatat menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2023, total nilai ekspor Jakarta mencapai US$11,08 miliar, turun sebesar 3,71 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US$11,50 miliar. Adapun nilai ekspor non migas mencapai US$11,05 miliar, atau turun 3,64 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2024).

Selain itu, perekonomian Jakarta juga dihadapkan pada berbagai tantangan lainnya, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural berasal dari faktor-faktor internal seperti ketersediaan lahan yang terbatas, tingkat upah minimum, serta masalah seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Ketersediaan air yang semakin terbatas juga menjadi salah satu tantangan struktural yang mempengaruhi perekonomian Jakarta. Di sisi lain, tantangan siklikal utamanya berasal dari faktor eksternal, seperti meluasnya ketegangan geopolitik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi regional.

Kebijakan dan Strategi

Peningkatan Peran UMKM

Dalam upaya untuk meningkatkan peran UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang mendukung promosi produk lokal. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Bazar Balai Kota, Festival Jakarta Great Sale, Festival Kuliner Betawi, Jakarta Fair Kemayoran 2023, dan Harvesting Ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) (DPPKUKM, 2023). Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Pemerintah DKI Jakarta berupaya memberikan dukungan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional.

Festival Jakarta Great Sale
Sumber: Berita Jakarta (2023)

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus mendorong peran sektor UMKM melalui Program Jakarta Entrepreneur. Melalui program Jakarta Entrepreneur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan akses kepada peserta untuk berbagai program fasilitasi yang mendukung pengembangan usaha serta akses terhadap permodalan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah serta meningkatkan serapan tenaga kerja. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat inklusi ekonomi tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan. Upaya ini merupakan bagian integral dari strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan akses pekerjaan yang layak bagi semua masyarakat.

Bazar Produk UMKM di Balaikota
Sumber: DPPKUKM (2023)

Peningkatan Peran Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan mendorong kinerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut diantaranya diwujudkan melalui sertifikasi tenaga kerja pariwisata, pelatihan tenaga kerja pariwisata, dan promosi pariwisata DKI Jakarta pada acara South by Southwest (Kemenparekraf RI, 2023) dan kegiatan Cap Go Meh (Kompas.id, 2023).

Selain itu, dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diwujudkan melalui pembangunan Jakarta Creative Zone. Fasilitas yang dikelola oleh PT Jakarta Tourisindo/Jakarta Experience Board (JXB) ini merupakan ruang publik yang menawarkan berbagai produk ekonomi kreatif dan menyediakan informasi seputar pariwisata Jakarta. Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat menciptakan ruang interaksi dan kesempatan baru bagi pelaku bisnis di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di DKI Jakarta.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengadakan serangkaian acara dan kegiatan yang dapat menarik minat wisatawan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Festival “Malam Muda-Mudi, Jakarta Kota Global” pada malam Tahun Baru 2024 (Jakarta Tourism, 2024). Acara ini menampilkan berbagai aktivitas menarik seperti Jakarnaval, panggung hiburan di 12 titik yang tersebar di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, serta atraksi Kirana Jakarta berupa water mist, atraksi 500 drone, dan video mapping. Malam Muda Mudi merupakan hasil kolaborasi antar instansi, termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Jakarta Creative Zone
Sumber: Jakarta Experience Board (2023)

Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja

Dalam upaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja, Pemerintah Provinsi Jakarta, melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, telah mengadakan sejumlah kegiatan prioritas seperti pameran bursa kerja (job fair), serta pelatihan keterampilan kerja kejuruan. Pelatihan tersebut meliputi keahlian Bahasa Inggris, operator komputer, tata boga, komputer akuntansi, teknisi komputer, teknik pendingin, teknik kelistrikan, tata busana, dan desain grafis. Untuk memastikan inklusivitas program tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan pelatihan yang secara khusus diberikan kepada penyandang disabilitas. Pada tahun 2023, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi telah mengadakan Pelatihan Operator Komputer Program Reguler bagi 20 peserta penyandang disabilitas (DTKTE, 2023). Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta sehingga lebih siap bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Pelatihan Kerja di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur
Sumber: CNN (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Untuk mengakselerasi capaian Tujuan 8, salah satu strategi yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), khususnya melalui dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut. Melalui program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur), Pemerintah DKI Jakarta mendorong kreativitas dan inovasi dalam dunia usaha, dengan menekankan integrasi teknologi serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPKUKM), telah menerapkan serangkaian langkah strategis. Salah satunya adalah penggunaan e-order dalam pengadaan konsumsi di berbagai instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri, tetapi juga untuk memastikan bahwa produk-produk UMKM lokal yang terdaftar dalam program Jakarta Entrepreneur digunakan secara optimal.

Selain itu, melalui kegiatan seperti business matching, Semarak Batik Betawi, dan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI dan BBWI), Dinas PPKUKM terus melakukan promosi produk UMKM dan meningkatkan kontribusi UMKM di pasar lokal.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dijalankan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk mencapai target-target P3DN yang telah ditetapkan sebelumnya. Data menunjukkan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2023. Selain itu, melalui penggunaan e-order, omset dari pelaku UMKM yang tergabung dalam program Jakarta Entrepreneur terus mengalami peningkatan yang signifikan. Langkah-langkah ini merupakan upaya konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan peran serta UMKM, industri kreatif, serta pemerataan ekonomi nasional.

Tujuan 9
Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Keadaan dan Kecenderungan

Infrastruktur

Infrastruktur jalan merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi daerah. Provinsi DKI Jakarta memiliki jaringan jalan yang luas, dengan total panjang mencapai 6.492,33 kilometer. Sebagian besar jalan berada dalam kondisi yang baik, menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemeliharaan infrastruktur. Diantara seluruh wilayah DKI Jakarta, Jakarta Selatan memiliki jalan mantap terpanjang dengan total 1.946,01 km, diikuti oleh Jakarta Timur dengan 1.473,87 km.

Sementara itu, panjang jalan dalam status sedang tercatat relatif lebih pendek. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur memiliki jalan status sedang terpanjang dengan masing-masing 53,81 dan 43,96 km. Tidak ada jalan dalam status rusak di seluruh wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan upaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jalan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna memastikan aksesibilitas yang optimal bagi masyarakat dan kemajuan ekonomi daerah.

Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Kondisi

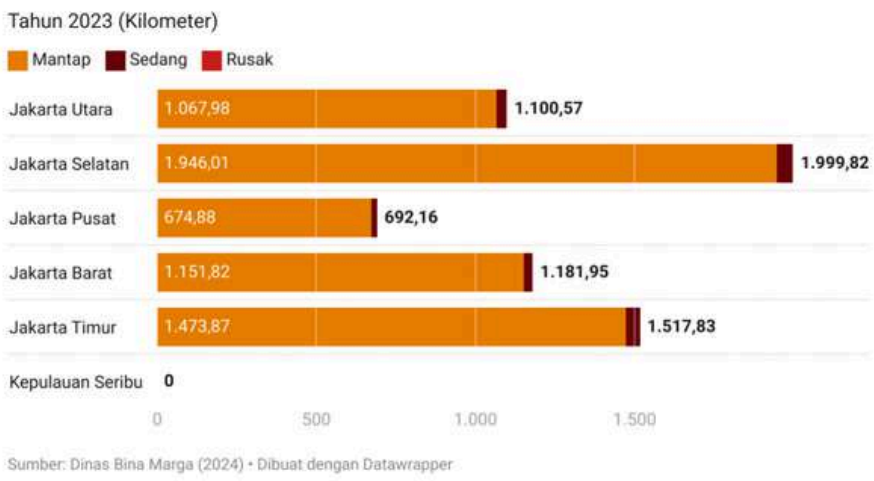

Sumber: Dinas Bina Marga (2024), diolah.

Pada 2023, tingkat mobilitas masyarakat di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan. Jumlah penumpang kendaraan berbasis jalan tercatat sebesar 1.126,87 juta orang, atau lebih tinggi dibandingkan jumlah pada tahun sebelumnya sebesar 989,86 juta orang. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penumpang kereta api, dari 331,11 juta orang pada 2022 menjadi 370,91 juta orang pada 2023. Adapun penumpang kapal di Provinsi DKI Jakarta mencapai 1,35 juta orang, lebih tinggi daripada jumlah pada tahun sebelumnya sebesar 1,07 juta orang.

Jumlah Penumpang Berdasarkan Moda Transportasi di Jakarta

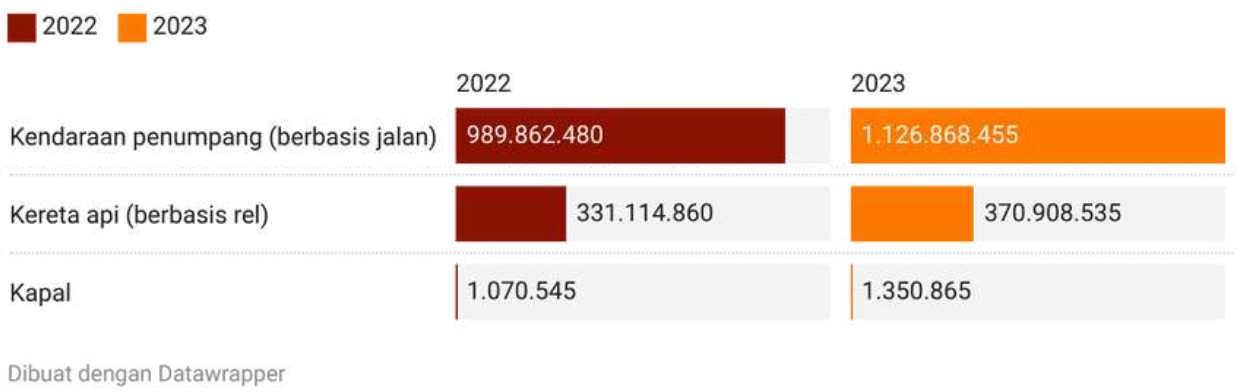

Sumber: Dinas Perhubungan (2024), diolah.

TPB 9

Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Pada 2022, proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta mencapai 11,72 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,64 persen. Peningkatan proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB mengindikasikan pertumbuhan dan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan dari sektor manufaktur dalam perekonomian Jakarta.

Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDRB

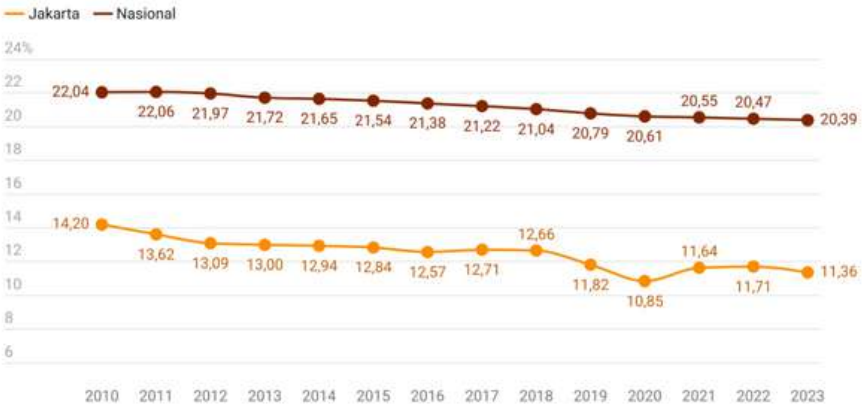

Sumber: BPS (2024), diolah.

Meski memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, pertumbuhan sektor industri manufaktur terus mengalami perlambatan sejak 2021. Data BPS menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur DKI Jakarta mencapai 1,86 persen pada tahun 2023, lebih rendah dari dua tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar 5,96 dan 11,06 persen.

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Manufaktur

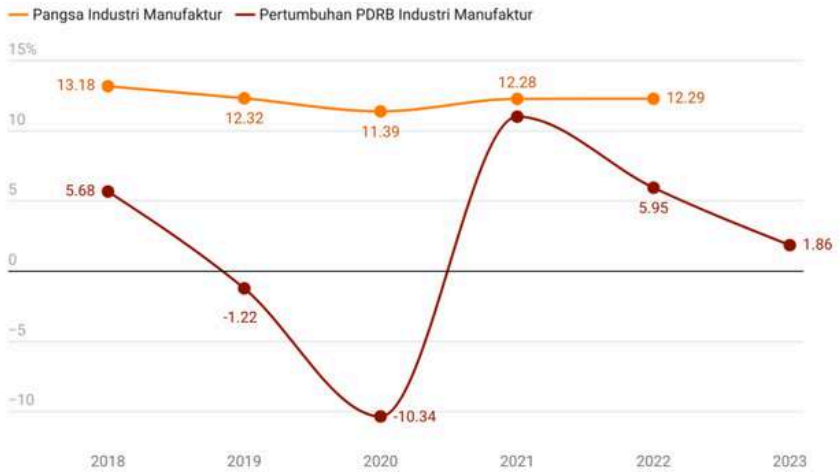

Sumber: BPS (2023), diolah.

TPB 9

Tantangan dan Pembelajaran

Perlambatan kinerja industri pengolahan di tahun 2023 merupakan dampak dari menurunnya permintaan global terhadap produk ekspor industri. Ketidakpastian dalam kondisi perekonomian global hingga akhir tahun 2023 menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika ekonomi. Negara-negara maju, seperti RRT dan Eropa, masih menghadapi tantangan pasca pandemi COVID-19, dengan ekonomi yang melemah dan inflasi yang tinggi. Amerika Serikat juga terus berjuang dengan inflasi yang berada di atas target dan tekanan fiskal yang meningkat. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan suku bunga oleh The Fed yang berpotensi memperkuat nilai dolar terhadap rupiah (Katadata, 2023), memberikan tekanan pada industri dalam negeri yang bergantung pada bahan baku impor.

Selain masalah ekonomi, kondisi geopolitik juga berpotensi mempengaruhi kinerja industri manufaktur. Perang di Ukraina maupun di Timur Tengah, terutama Palestina yang tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir menimbulkan downside risk terhadap prospek pertumbuhan ekonomi. Sentimen global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam konflik tersebut berpotensi menimbulkan volatilitas di sektor keuangan, serta meningkatkan tekanan terhadap perdagangan global melalui kecenderungan proteksionisme yang semakin meningkat. Dampak dari kondisi geopolitik yang tidak stabil ini juga menjadi tantangan serius bagi industri dalam negeri. Konflik tersebut dapat mengganggu jalur rantai pasok dan distribusi beberapa komoditas yang menjadi kebutuhan pokok industri seperti yang terjadi di Laut Merah. Selain itu, tren kenaikan harga bahan baku dan energi global pada pertengahan 2023 juga berkontribusi pada peningkatan biaya produksi industri (Katadata, 2023), yang pada akhirnya dapat mengganggu profitabilitas sektor manufaktur.

Di sisi lain, prospek pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap lemah, sebagaimana disampaikan oleh lembaga internasional. Sebelumnya, International Monetary Fund (IMF) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi hanya 3 persen (IMF, 2023), sementara Bank Dunia memperkirakan hanya 2,1 persen (World Bank, 2024). Tingkat inflasi juga diprediksi akan mencapai 5,8 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Pada 2024, ekonomi global diproyeksikan lebih rendah dari kinerja perekonomian global 2023, yakni hanya sebesar 3,1 persen (IMF) dan 2,4 persen (World Bank). Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari negara mitra dagang utama Jakarta menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi. Dampak dari perlambatan ekonomi global secara umum terlihat pada volume ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan terutama Provinsi DKI Jakarta. Tekanan terhadap volume perdagangan global secara keseluruhan juga berimbas pada volume ekspor dari sektor manufaktur, yang tercermin dalam tren penurunan nilai ekspor Provinsi DKI Jakarta pada 2023 (Bank Indonesia, 2024).

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi sejumlah kebijakan dan strategi untuk mencapai Tujuan 9, yang berfokus pada peningkatan infrastruktur transportasi dan peningkatan inovasi daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek), yang diresmikan pada tanggal 28 Agustus 2023 oleh Presiden RI bersama dengan Pj. Gubernur DKI Jakarta dan pejabat tinggi negara lainnya. LRT Jabodebek memiliki 18 stasiun dalam dua lintas pelayanan dan tarif flat selama satu bulan usai peresmiannya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan groundbreaking pembangunan LRT Jakarta Fase 1B dengan rute Velodrome- Manggarai di Stasiun Velodrome, Jakarta Timur pada tanggal 30 Oktober 2023 (Biro Umum dan ASD Setda, 2023). Rute ini merupakan kelanjutan dari Fase 1A dengan rute Pegangsaan Dua-Velodrome, dan nantinya akan terdiri dari lima stasiun pemberhentian. Total dana untuk pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai sebesar Rp 5,5 triliun dengan panjang rute 6,4 kilometer, yang terdiri lima stasiun baru, yaitu Pemuda, BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, dan Manggarai.

Selain LRT, pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) juga menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT MRT Jakarta sedang melakukan pembangunan MRT Fase 2A. Proyek ini melanjutkan koridor Bundaran HI-Lebak Bulus yang telah beroperasi sejak tahun 2019 (MRT Jakarta, 2023). Progres pembangunan MRT dari Bundaran HI ke Harmoni telah mencapai 62 persen, sementara konstruksi sampai ke Kota telah mencapai 26 persen. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan MRT Fase 2B yang akan tersambung sampai ke Ancol, serta Fase 3 yang akan melintang dari timur ke barat Jakarta.

Di samping itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperhatikan integrasi antar moda transportasi dengan membangun Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas. JPM Dukuh Atas, yang diresmikan pada tanggal 13 September 2023, mengintegrasikan lima moda transportasi publik di pusat kota, yaitu LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, MRT Jakarta, Kereta Bandara, dan Transjakarta. Jembatan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti eskalator, lift, akses sepeda, dan area komersial, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan UMKM dan ruang interaksi warga. Semua upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.

Groundbreaking Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B
Sumber: Setda Provinsi DKI Jakarta (2023)

TPB 9

Jembatan Penyeberangan Multiguna Dukuh Atas
Sumber: PT. Waskita Beton Precast Tbk (2024)

Sementara itu, dalam upaya mendorong peningkatan inovasi di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar berbagai kegiatan yang dapat mempromosikan inovasi daerah. Salah satu event yang dilaksanakan pada Semester II 2023 adalah Jakarta Innovation Days (JID) 2023 yang berlangsung pada tanggal 25-27 September 2023 di Balai Kota Jakarta. Penyelenggaraan event tahunan tersebut melibatkan berbagai pihak seperti institusi pendidikan, BUMD, NGO, dan komunitas masyarakat. JID 2023 bertujuan untuk memperkenalkan serta mempromosikan berbagai produk inovasi kepada masyarakat. Dengan mengusung tema "Urban Innovation for Sustainable Jakarta", acara ini menjadi wadah bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kesempatan bagi para pelaku inovasi lokal untuk berkontribusi dalam membangun masa depan Jakarta yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan Jakarta Innovation Days 2023
Sumber: Pusdatinrenbang Bappeda Provinsi DKI Jakarta (2023)

TPB 9

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan integrasi infrastruktur perkotaan. Dukuh Atas merupakan contoh konkret dari integrasi harmonis berbagai moda transportasi umum di DKI Jakarta, yang mencakup MRT, BRT, Airport Rail Link, dan Commuter Line.

KBT Dukuh Atas didominasi oleh Zona Kantor, Perdagangan, dan Jasa, sebesar 29,82 persen, serta Zona Hunian Menengah-Tinggi sebesar 21,60 persen. Pengembangan kawasan ini juga mengakomodasi kebutuhan perumahan bagi masyarakat perkotaan dengan lahan residensial sebesar 35,5 persen. Dengan menyediakan aksesibilitas yang tinggi ke pusat-pusat ekonomi dan bisnis, sementara juga menawarkan lingkungan hunian yang berkualitas, KBT Dukuh Atas dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mobilitas perkotaan.

Kawasan Berbasis Transit Dukuh Atas
Sumber: MRT Jakarta (2023)

Selain itu, integrasi fasilitas pendukung urban seperti taman sungai, plaza transit, dan taman kota dalam desain TOD Dukuh Atas turut menciptakan ruang terbuka yang ramah lingkungan dan memperkaya pengalaman kota bagi penduduk DKI Jakarta. Hal ini selaras dengan upaya pencapaian Tujuan 9, yang mengedepankan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta inovatif. KBT Dukuh Atas dapat menjadi contoh bagaimana perencanaan perkotaan yang terintegrasi dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan 10
Berkurangnya Kesenjangan

Keadaan dan Kecenderungan

Secara umum, tren angka kemiskinan Provinsi DKI Jakarta pasca pandemi terus menurun sejak Maret 2021. Angka kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,44 persen, turun 0,17 persen dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 4,61 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Jakarta hingga Maret 2023 tercatat sebanyak 477,83 ribu orang, mengalami penurunan sebesar 17,10 ribu orang dibandingkan September 2022.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Sumber: BPS (2023), diolah.

Rasio Gini Jakarta dan Nasional

Sumber: BPS (2023), diolah.

Meski demikian, tingkat ketimpangan per Maret 2023 justru meningkat cukup signifikan. Pada Maret 2023, Rasio Gini Jakarta mencapai 0,431, naik 0,019 poin dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 0,412. Naiknya tingkat ketimpangan tersebut bahkan melebihi Rasio Gini nasional yang sebesar 0,388, menunjukkan kondisi ketidaksetaraan ekonomi yang lebih tinggi di tingkat daerah. Dengan angka tersebut, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat kedua tertinggi dalam hal ketimpangan setelah DI Yogyakarta.

Selain itu, indikator ketimpangan lainnya juga menunjukkan kondisi yang serupa. Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan di Jakarta mengalami peningkatan signifikan, dari 0,18 persen pada tahun 2021 menjadi 0,75 persen pada tahun 2022. Merujuk kategori Bank Dunia, ketimpangan DKI Jakarta termasuk pada kategori sedang. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah di DKI Jakarta tercatat sebesar 16,39 persen pada Maret 2023, sedikit mengalami penurunan (0,60 poin) dari September 2022 yang sebesar 16,99 persen.

Proporsi Penduduk yang Hidup di Bawah 50 % dari Median Pendapatan di Jakarta

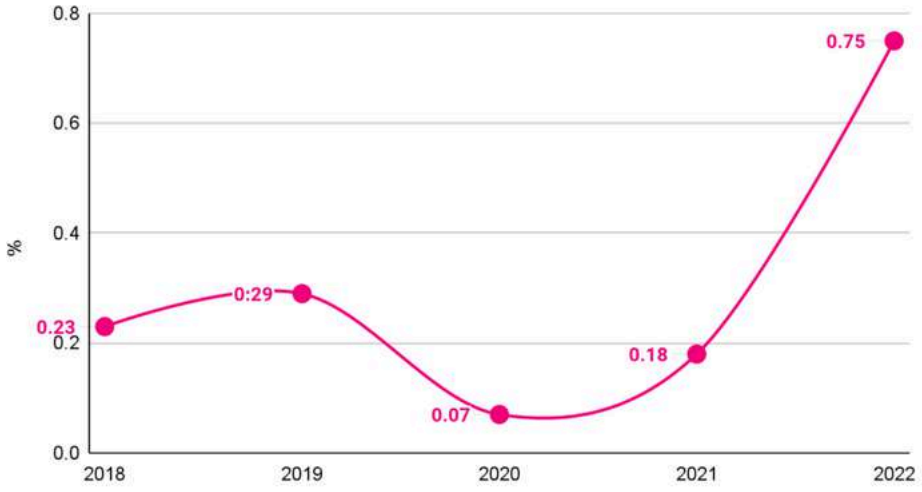

Sumber: BPS (2023), diolah.

Tingginya ketimpangan kesejahteraan juga terlihat di antara beberapa wilayah di DKI Jakarta. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Jakarta Utara dan Jakarta selatan memiliki angka ketimpangan tertinggi, masing-masing sebesar 0,543 dan 0,422. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya diantara wilayah-wilayah DKI Jakarta, tetapi juga mencerminkan tantangan nyata dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi di tingkat lokal.

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan dalam upaya menurunkan tingkat ketimpangan di DKI Jakarta pada 2023 masih cukup besar. Meskipun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin, tingkat kesenjangan antara pendapatan kelompok bawah dan atas semakin membesar. Permasalahan kemiskinan tidak hanya terkait dengan jumlah penduduk miskin, melainkan juga harus memperhatikan dimensi lain, yakni tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Jakarta mengalami peningkatan pada periode September 2022-Maret 2023 (BPS, 2024; BPS, 2024). Kenaikan ini menunjukkan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin meningkat, serta tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin tinggi. Dengan besaran garis kemiskinan di Jakarta sebesar Rp792.515 (BPS, 2024) dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4-5 orang (rata-rata 4,89), jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan di setiap rumah tangga miskin adalah sebesar Rp3.875.398 per bulan (Kompas.id, 2023). Kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, terutama karena sebagian besar penduduk miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan cenderung bekerja di sektor informal.

Dengan demikian, upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan di Jakarta memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk program-program untuk meningkatkan akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Hal ini penting agar penduduk miskin dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang.

Kebijakan dan Strategi

Untuk mencapai Tujuan 10, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi sejumlah kebijakan dan strategi yang berfokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem. Sebagai langkah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyatakan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. Hal ini juga merupakan implementasi dari Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi DKI Jakarta yang telah diterbitkan sebelumnya. Strategi yang dilakukan meliputi upaya verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial, pengurangan beban pengeluaran masyarakat tidak mampu, dan peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Salah satu upaya utama yang dilakukan dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem adalah validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (Biro Umum dan ASD Setda, 2023). Proses tersebut dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung ke setiap wilayah di DKI Jakarta dan melibatkan tim yang terdiri dari berbagai instansi terkait.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan pemadanan data seluruh bantuan sosial (bansos) dengan berbagai data pembanding lainnya. Ini mencakup data dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disediakan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta data dari Carik Jakarta yang dikumpulkan oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk. Selain itu, proses pemadanan juga melibatkan data kependudukan, data kepemilikan aset, musyawarah kelurahan, dan hasil verifikasi lapangan oleh petugas pendata dan pendamping sosial di setiap kelurahan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan akurasi dan validitas data bansos serta memastikan bahwa bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat dan efisien.

Proses Validasi dan Pemutakhiran DTKS
Sumber: Setda Provinsi DKI Jakarta

Selain itu, pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran bagi keluarga yang tidak mampu. Upaya tersebut diantaranya diwujudkan dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi yang secara konsisten disalurkan. Pemerintah Provinsi memberikan subsidi pada sektor-sektor kunci, seperti sosial, pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, tangki septik, rusunawa, dan transportasi (TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2023). Pada kerangka kebijakan subsidi pangan misalnya, penerima manfaat dapat mengambil paket pangan seharga Rp126.000 di 366 lokasi distribusi. Paket ini terdiri dari komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur, ikan kembung, dan susu. Penerima manfaat subsidi pangan merupakan pemegang Kartu Jakarta Pintar, Kartu Pekerja Jakarta, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, Kartu Anak Jakarta, petugas penyedia jasa lainnya perorangan, guru honorer dan tenaga kependidikan non-ASN, penghuni rumah susun, serta kader PKK.

Lebih lanjut, pemerintah melakukan intervensi dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pelatihan keterampilan kerja, penyelenggaraan bursa kerja, dan pendekatan kewirausahaan terpadu atau Jakarta Entrepreneur. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Penyaluran Pangan Bersubsidi
Sumber: Temppo.co (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pencapaian Tujuan 10 dengan melakukan intervensi dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan keterampilan kerja, penyelenggaraan bursa kerja serta pendekatan kewirausahaan terpadu atau Jakarta Entrepreneur (TKPK Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Melalui Jakarta Entrepreneur, peserta dapat mengakses berbagai program fasilitasi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Upaya ini juga membuka peluang bagi setiap individu untuk memiliki keterampilan dan kemandirian berwirausaha serta kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Program ini juga memberikan pendampingan bagi para peserta dalam proses pendaftaran hingga pengurusan izin dan serta akses permodalan. Dengan upaya ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dorongan bagi kewirausahaan lokal, serta memperkuat inklusi ekonomi dan memberdayakan masyarakat dalam mengatasi ketimpangan.

Peserta Program Jakarta Entrepreneur
Sumber: DPPKUKM (2023)

Tujuan 11
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Keadaan dan Kecenderungan

Pada aspek akses transportasi publik mengalami perbaikan, hal ini ditandai dari meningkatnya persentase pengguna moda transportasi umum yang meningkat dari 18,45 menjadi 18,86 pada tahun 2023.

Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Jakarta

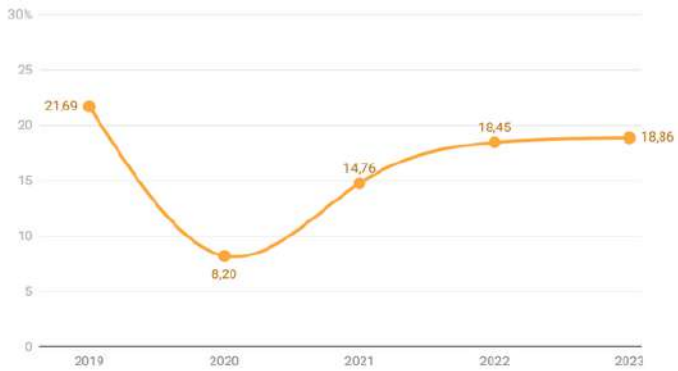

Sumber: BPS (2023)

Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak

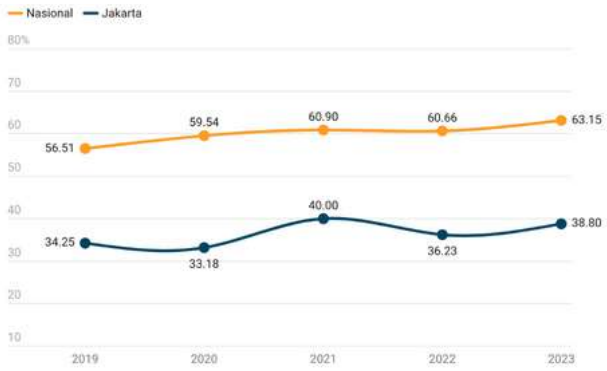

Sumber: BPS (2024)

Begitu juga pada aspek permukiman, pada indikator proporsi rumah tangga yang memiliki akses hunian layak mengalami kenaikan dari 36,23 persen pada tahun 2022 menjadi 38,8 persen pada tahun 2023. Dalam perjalanan Jakarta menuju status sebagai Kota Global, tantangan pemenuhan rumah layak menjadi esensial. Pada tahun 2022, menurut kriteria BPS hanya 36,23 persen rumah tangga di Jakarta yang memiliki akses hunian layak. Tren proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada 2018 dan 2019 angka tersebut tercatat mengalami penurunan, utamanya disebabkan oleh perubahan metode penghitungan sehingga capaiannya terlihat turun dengan signifikan. Secara umum, capaian dalam indikator ini masih tergolong rendah. Salah satu penyebab rendahnya capaian ini karena salah satu kriteria terkait ketahanan bangunan, yaitu komponen atap asbes yang dianggap tidak memenuhi standar kesehatan yang mencapai 54,78 persen di Jakarta.

Kemudian dari aspek lainnya, yakni kualitas udara juga mengalami sedikit kenaikan dari sisi Nilai Indeks Kualitas Udara dari 68,06 menjadi 68,46 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Udara (IKU) DKI Jakarta mencapai 68,06 (kategori: Sedang). Capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu 67,36 (kategori: Sedang). Namun perhitungan ini belum mengadopsi metode terbaru yang turut memperhitungkan PM2.5 sehingga capaiannya cukup berbeda dengan pengukuran lainnya seperti data yang dirilis oleh IQAir.

Nilai Indeks Kualitas Udara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2024)

Tantangan dan Pembelajaran

Masih tingginya kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi dapat meningkatkan jumlah emisi dari sumber bergerak sedangkan ketidakteraturan perawatan kendaraan bermotor dapat memperburuk kualitas emisi yang dihasilkan. Selain itu, adanya ketidakpatuhan penanggung jawab usaha kegiatan yang memiliki cerobong juga dapat memperburuk kualitas emisi cerobong yang dihasilkan. Polutan pencemar udara dapat menimbulkan permasalahan hujan asam dan juga permasalahan kesehatan.

Isu polusi udara mencuat tahun 2023, kendati indikator IKU yang diadopsi mengalami perbaikan akan tetapi IKU belum mempertimbangkan aspek PM2.5 yang menjadi salah satu rujukan penting oleh WHO untuk pengukuran kualitas udara. Di Terdapat serangkaian upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya operasi pengawasan cerobong pabrik, penanaman pohon dan tanaman, uji emisi di lebih dari 1 juta kendaraan roda empat dan 115 ribu kendaraan roda dua, juga memberikan tarif disinsentif parkir di 10 lokasi parkir yang dikelola Pemprov DKI Jakarta, per 1 Oktober 2023 juga, terdapat 121 titik lokasi parkir yang dikelola Pasar Jaya menerapkan tarif disinsentif parkir bagi kendaraan yang belum lulus uji emisi.

Dalam rangka inventarisasi dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang ada di Jakarta disertakan para penguji laboratorium yang menguji emisi langsung ke sumbernya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Tim Satgas juga mendatangi 2 industri yang berpotensi mencemari udara (DLH, 2023).

Operasi Pengawasan Terhadap Cerobong Pabrik di Wilayah Jakarta
Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta (2023)

Kebijakan dan Strategi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 66 tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang kendaraan bermotor, aturan tersebut mewajibkan uji emisi bagi seluruh mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor yang melintas di Jakarta. Kemudian sejak tahun 2022 dilakukan pengembangan “Si Elang Biru Jaya” untuk mengintegrasikan data dengan DPMPTSP terkait layanan perizinan bengkel sebagai tempat uji emisi. Pada tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta menggelar uji emisi gratis yang diikuti 2.615 pemilik kendaraan.

Untuk mengatasi persoalan pencemaran udara di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggandeng World Resources Institute (WRI) untuk menyelenggarakan program *Clean Air Catalyst* (CAC). Skema CAC ini merupakan kemitraan global yang didukung *US Agency for International Development* (USAID) dan konsorsium yang terdiri dari WRI Indonesia serta Vital Strategies di Jakarta. CAC mengidentifikasi transportasi sebagai sumber emisi terbesar di Jakarta. Karena itulah, Pemprov DKI Jakarta memperkenalkan tiga peralatan pemantau kualitas udara baru yang bertaraf reference-grade dan pemutakhiran peralatan di empat lokasi Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) di wilayah DKI Jakarta.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Pemerintah turut menunjukkan komitmennya pada pembangunan infrastruktur *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai langkah strategis untuk mengatasi tantangan terkait transportasi dan hunian layak. Sebagai contoh, Simpang Temu Lebak Bulus yang baru dibuka untuk publik menjadi bagian integral dari inisiatif ini. Tidak hanya menghubungkan fasilitas di Lebak Bulus, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan transportasi publik dan membuka akses ke hunian yang lebih terjangkau di sekitarnya.

Sejalan dengan itu, upaya pembangunan Skywalk Kebayoran juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antara stasiun KRL, halte Transjakarta, dan area hunian di sekitarnya. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya membantu memperbaiki isu transportasi, tetapi juga mendukung peningkatan ketersediaan hunian layak di kawasan-kawasan tersebut. Skywalk Kebayoran menghubungkan Stasiun KRL Kebayoran dengan Halte Transjakarta Velbak Koridor 13 dan Halte Transjakarta Pasar Kebayoran Lama Koridor 8. Di sini tersedia tiga lift untuk akses naik turun sehingga ramah untuk digunakan lansia, ibu hamil maupun penyandang disabilitas.

Dengan mengintegrasikan pendekatan TOD ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, memperkuat keseimbangan antara akses terhadap hunian yang layak, efisiensi transportasi publik, dan peningkatan kualitas udara. Semua ini merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah agar Jakarta dapat bertransformasi menjadi Kota Global dan memberikan dampak positif pada kualitas hidup warganya.

Skywalk Kebayoran
Sumber: Majalah JaKita (2023)

Kemudian pada isu terkait pencemaran udara, di tahun 2023 telah disahkan Keputusan Gubernur Nomor 426 Tahun 2023 tentang strategi penanggu

langan pencemaran udara pemerintah juga mendorong untuk peningkatan jumlah dan kualitas transportasi massal ramah lingkungan dan mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil.

Begitu juga upaya peningkatan sinergi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah penyangga serta pelaku usaha dalam pengendalian pencemaran udara, pengawasan pelaksanaan kegiatan uji emisi dan pelaksanaan penataan hukum dan mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan, baik untuk individu, instansi pemerintah dan kegiatan usaha.

Adapun kegiatan lainnya yang dilakukan di tahun 2023 diantaranya Program penataan kampung kumuh di setiap kelurahan melalui penghijauan lingkungan, pembuatan mural, edukasi dan pengembangan potensi ekonomi warga setempat juga dilakukan. Salah satunya adalah di Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang.

Kelurahan Kampung Bali
Sumber: Majalah JaKita (2023)

Tujuan 12

Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Keadaan dan Kecenderungan

Indikator kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2018-2022 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase pengurangan sampah. Pada tahun 2023, jumlah pengurangan sampah meningkat dari 26,1 persen di tahun 2022 menjadi 27,12 persen pada tahun 2023. Sedangkan sebaliknya, indikator penanganan sampah trennya terlihat menurun, dari 75,15 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 73,68 persen pada tahun 2022 (DLH, 2022).

Kemudian dari sisi pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik (*e-waste*) di Provinsi DKI Jakarta telah berjalan sejak tahun 2018. Namun, hal ini belum didukung dengan regulasi yang kuat maupun sarana dan prasarana yang memadai. Data sampah yang mengandung B3/Limbah B3 dan bersumber dari rumah tangga, yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan dikelola oleh pihak ketiga selama tahun 2018 sampai dengan 2021.

Data Limbah B3 Cair, Padat dan Elektronik (E-waste) yang Dikelola

Jenis Limbah B3	Tahun (dalam kg)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Limbah Cair (Oli Bekas) (Liter)	-	1.000	1.000	-	-
Limbah Padat (Kg)	-	2.663	7.758,23	20.000	28.145.50
Limbah Medis (Kg)	-	93,35	1.538,77	1.647,44	6.670,94
Limbah Elektronik (*e-waste*) (Kg)	11.132	15.191	31.106	33.184,78	30.785,46

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2024)

Pengelolaan limbah B3, khususnya *e-waste*, memerlukan perhatian serius dalam penanganannya mengingat limbah tersebut mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan yang efektif diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Sedangkan untuk indikator lainnya, yakni persentase sisa makanan, data yang diperoleh sejauh ini baru dari wilayah Kepulauan Seribu. Sampah sisa makanan mendominasi ke-2 teratas setelah kayu-ranting, yakni mencapai 25,5 persen di Kepulauan Seribu pada tahun 2023 (KLHK, 2024).

Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Sampah di Kepulauan Seribu (2023)

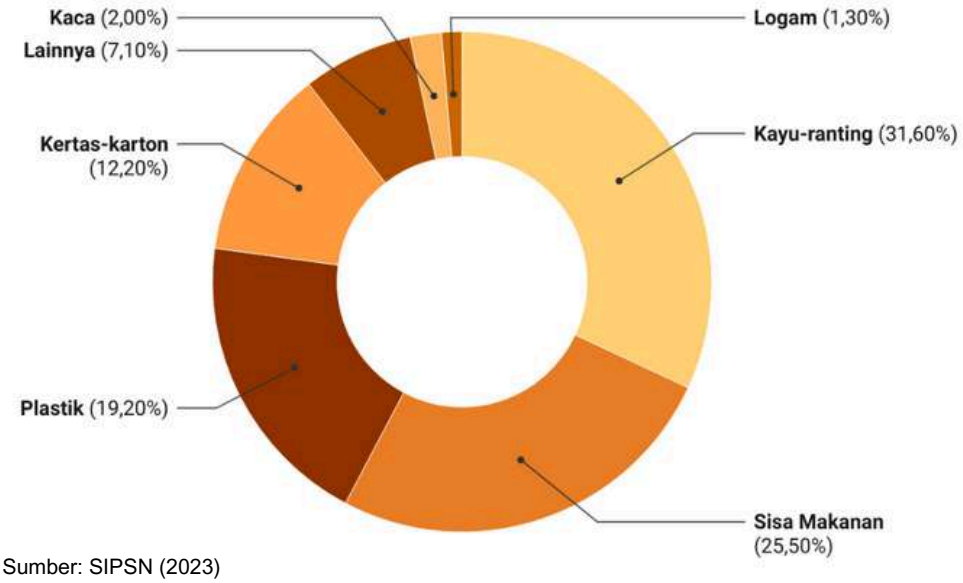

Sumber: SIPSN (2023)

Tantangan dan Pembelajaran

DKI Jakarta masih memiliki permasalahan dalam isu pengolahan sampah diantaranya terbatasnya lahan di penampungan akhir, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah di sumbernya, dan lemahnya penegakan hukum terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.

Selain itu tantangan lainnya yakni semakin meningkatnya produk sampah dari masyarakat maupun dari dunia usaha yang ditampung di TPST sementara luas lahan dan kapasitas TPST terbatas menjadikan daya tampung TPST yang semakin berkurang. Hal ini menjadikan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk memaksimalkan upaya-upaya pengurangan dan penanganan sampah di hulu dan TPS, diantaranya melalui percepatan pembangunan ITF dan upaya inovatif lainnya dalam penanganan sampah di tingkat masyarakat dan dunia usaha.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam operasionalnya didukung oleh armada pengangkutan sampah. Beberapa jenis armada pengangkutan sampah yang ada masih belum ramah lingkungan, antara lain karena masih menimbulkan bau sampah dan belum dilakukan kompresi sampah. Ke depan diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jenis sarana pengangkutan sampah yang lebih ramah lingkungan.

Peningkatan produksi sampah baik dari masyarakat, dunia usaha dan industri belum di dukung oleh kapasitas TPS dan TPS 3R yang memadai. Jumlah dan TPS yang ada belum mampu menangani dan menampung sampah yang ada, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di Jakarta.

Hal ini menjadi tantangan sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih tepat dan konsisten oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk dapat mengimplementasikan peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan hidup yang belum dapat dilaksanakan untuk dapat dilaksanakan secara optimal.

Kebijakan dan Strategi

Di Jakarta sendiri isu persampahan mendapatkan perhatian yang cukup besar untuk penanggulangannya, oleh karena itu pemerintah telah merilis beberapa regulasi terkait hal ini diantaranya Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana Dan Sarana Penanganan Sampah, Peraturan Gubernur nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga dan juga Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah Di Kawasan dan Perusahaan. Secara regulasi sudah cukup komprehensif karena memuat regulasi dari hulu hingga hilir.

Jakarta Recycle Center (JRC) merupakan salah satu contoh praktik baik dalam pengelolaan sampah di hulu melalui sistem pengelolaan sampah dengan mengedepankan pemilahan sampah dari sumbernya. Kegiatan ini merupakan suatu inovasi terhadap pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai macam stakeholder untuk menumbuhkan budaya pemilahan sampah bagi setiap warganya. Saat ini program JRC sudah dilakukan pada 6 (enam) Model area, Sampah yang sudah terpilah akan diangkut sesuai jadwal yang ditentukan dan telah disepakati oleh warga.

Penyerahan Sampah ke Jakarta Recycle Centre
Sumber: DLH Provinsi DKI Jakarta (2023)

Untuk memudahkan pemilahan dari sumber para petugas JRC Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memberikan sarana kantong wadah pilah pada setiap model area (UPST DLH, 2023).

Kemudian dari sisi hilir juga dilakukan upaya pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau biasa dikenal dengan *Refuse Derived Fuel* (RDF). RDF Plant TPST Bantargebang berkapasitas input 2.000 ton sampah dan output 7.000 ton RDF, yang selanjutnya RDF dimanfaatkan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa TBK. dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.

Upaya lainnya juga dilakukan pengolahan sampah yang masuk ke badan air. Menurut informasi dari kanal sosial media Dinas Lingkungan Hidup, data per Oktober 2023 lebih dari 6 ribu ton sampah dari badan air Jakarta berhasil diolah. Di tahun 2023, dilakukan pembangunan saringan sampah di segmen TB. Simatupang dan pemeliharaan saringan sampah di 10 titik lokasi diantaranya Kali Lagoa Tirem, Inlet Waduk Sunter 3, perintis Klender dan Inlet Waduk Tomang.

Fasilitas RDF di Bantar Gebang
Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam rangka mengakselerasi tujuan 12 DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan (KBRL) pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat. Pergub tersebut mengatur kewajiban penggunaan KBRL oleh pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat, dengan ruang lingkup yang meliputi pelaksanaan kewajiban penggunaan KBRL dan pembinaan dan pengawasan penyediaan KBRL. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani permasalahan persampahan ini diantaranya melakukan pengawasan KBRL di mall dan toko swalayan sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah mendorong pengurangan sampah di sumber menggunakan metode biokonversi *Black Soldier Fly* (BSF). Metode ini mampu mengolah sampah sisa makanan dalam waktu relatif dengan daya tampung lebih dari 480 kg sampah/hari.

Pemprov DKI Jakarta juga secara aktif melakukan pengumpulan sampah dari sumbernya. Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengangkutan sampah terjadwal pada 147 RW percontohan dan pembinaan Bank Sampah yang dilakukan di Suku Dinas Lingkungan Hidup di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pengolahan persampahan ini didorong untuk dilakukan dari hulu hingga hilir. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan kemudahan bagi warga Jakarta yang ingin membuang sampah elektronik melalui layanan jemput e-waste yang dihadirkan di beberapa titik di Jakarta.

Di hilir dilakukan pengolahan sampah dengan *Refuse Derived Fuel* (RDF) plant, fasilitas pengolahan sampah yang didesain untuk mengolah 1000 ton sampah lama per hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan akselerasi pembangunan fasilitas Landfill Mining dan RDF Plant di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat dengan target kapasitas 2.000 ton/hari.

Tujuan 13
Penanganan Perubahan Iklim

Keadaan dan Kecenderungan

Dalam rangka memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan berbagai regulasi terkait perubahan iklim maupun melakukan upaya inventarisasi GRK. Dalam konteks menghadapi mitigasi dan adaptasi di DKI Jakarta memiliki Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD). Pada perhitungan emisi GRK dilakukan t+1 sehingga angka yang disampaikan pada laporan inventarisasi GRK tahun 2023 merupakan angka di tahun 2022. Tingkat reduksi dari tahun 2021 ke 2022 yakni 25 persen atau setara dengan 20,5 juta ton CO2e.

Porsi Sumber Emisi dan Serapan GRK

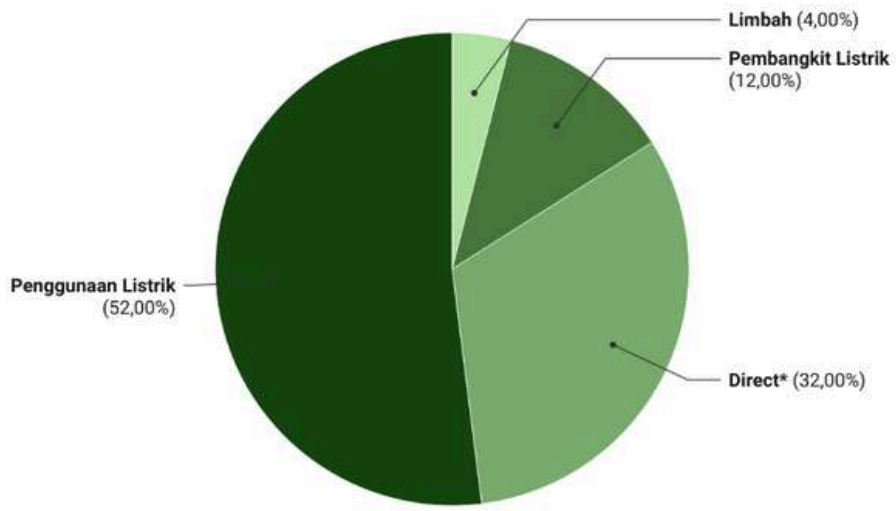

*kecuali pembangkit listrik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2023)

Untuk jumlah emisi gas rumah kaca di tahun 2023 sebesar 63,074 MTon CO2e dan potensi penurunan emisi gas rumah kaca meningkat dari 17,90 persen menjadi 25,4 persen pada tahun 2023.

Berdasarkan data hasil inventarisir yang dilakukan oleh DLH Pemprov DKI Jakarta, capaian reduksi emisi GRK pada periode 2015-2020 adalah 26 persen. Perlu ditekankan bahwa reduksi emisi GRK tersebut bukan hanya berkat implementasi kegiatan mitigasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan juga termasuk reduksi emisi GRK yang berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak lain yang mungkin tujuannya bukan untuk melakukan mitigasi namun berkontribusi pada pengurangan emisi GRK.

Selain itu pada tahun 2023 juga sedang dilakukan upaya legalisasi draf rancangan:

1. Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah Tahun 2023-2027.
2. Peraturan Gubernur tentang pedoman penyusunan rencana kontinjensi.
3. Peraturan Gubernur tentang pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2014 tentang tentang Pembagian Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penanggulangan Bencana (perubahan Keputusan Gubernur Nomor 121 tahun 2022 tentang Prosedur Penanganan Kedaruratan Bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
4. Keputusan Gubernur tentang Kajian Risiko Bencana Tahun 2022-2026.
5. Peraturan Gubernur tentang Perubahan SMAB.

Tantangan dan Pembelajaran

Pada target terkait penurunan GRK, diperlukan pendekatan multi sektor dan mendorong perubahan perilaku masyarakat guna percepatan pelaksanaan pencapaian target penurunan emisi GRK dan berketahanan iklim di DKI Jakarta. Hal ini juga harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk berkomitmen melakukan penurunan emisi GRK. Misalnya saja keterlibatan dari kalangan pelaku usaha begitu penting dalam penurunan emisi ini, hal ini dapat didorong melalui pengawasan oleh pemerintah. Namun pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup masih belum maksimal baik terhadap kegiatan usaha yang sudah memiliki izin maupun belum. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan lintas sektor dan lintas kewilayahan serta multidimensi. Selain pengawasan tentu perlu dilengkapi dengan penerapan insentif dan disinsentif seperti pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan lingkup hidup.

Tantangan lainnya diantaranya hasil pemantauan kualitas lingkungan masih belum merepresentasikan seluruh kondisi Provinsi DKI Jakarta. Selain itu hasil pemantauan tersebut juga belum menjadi umpan balik terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Untuk itu perlu ada mekanisme untuk memastikan umpan balik ini dapat terintegrasi di dalam kebijakan (Renstra DLH).

Kebijakan dan Strategi

Dalam upaya mencapai tujuan 13, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah yang Berketahanan Iklim (RPRKD). Berdasarkan Pergub tersebut, salah satu strategi utama yang dilakukan pemprov DKI Jakarta adalah melakukan hal-hal preventif terhadap pencemaran udara yang lebih spesifik dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023 tentang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara.

Strategi tersebut mencakup upaya penurunan beban pencemaran lingkungan dengan melakukan pengendalian pemenuhan baku mutu emisi dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Selain itu, strategi lainnya adalah dengan peningkatan kampanye pengendalian pencemaran udara dan peningkatan sistem pemantauan kualitas udara.

Rencana Aksi Strategi Pengendalian Pencemaran Udara

Strategi	Program
Strategi 1 Peningkatan Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Udara	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Inventarisasi Emisi (IE) yang berkelanjutan. 2. Peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi mutu udara. 3. Pengkajian dampak pencemaran udara terhadap kesehatan, sosial dan ekonomi. 4. Pembentukan tim kerja lintas sektoral Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara 6. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran udara
Strategi 2 Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Bergerak	1. Peremajaan angkutan umum dan pengembangan transportasi ramah lingkungan untuk transportasi umum dan pemerintah. 2. Penerapan uji emisi kendaraan bermotor. 3. Pengembangan kawasan rendah emisi. 4. Pengendalian emisi melalui pengurangan mobilitas dalam kerangka kerjasama pilar pemerintah-sektor swasta-masyarakat sipil. 5. Peningkatan infrastruktur penghubung ke sarana transportasi umum. 6. Pengembangan manajemen rekayasa lalu lintas. 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perbaikan kualitas udara.
Strategi 3 Pengurangan Emisi Pencemar Udara dari Sumber Tidak Bergerak	1. Peningkatan ruang terbuka dan bangunan hijau. 2. Peningkatan instalasi panel surya atap. 3. Pengendalian polusi udara dari kegiatan industri.

Sumber: Keputusan Gubernur Nomor 576 Tahun 2023

Beberapa kegiatan yang menunjukkan komitmen pada Tujuan 13 diantaranya peresmian Taman ASEAN di Jalan Pattimura, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru sebagai simbol komitmen penurunan emisi karbon. Kemudian juga Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menerima kedatangan C40 Cities dan berdiskusi terkait Climate *Action Implementation* (CAI) sebagai program dari C40.

Selain itu dalam rangka menyiapkan infrastruktur pengendali banjir, yang merupakan salah satu bencana yang turut diakibatkan bencana iklim, Pemprov DKI Jakarta memiliki 566 unit pompa mobile, 799 unit pintu air di 547 lokasi, 549 unit pompa stasioner di 195 lokasi, 240 unit alat berat. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menyediakan dasbor “Pantau Banjir” di JAKI atau situs pantaubanjir.jakarta.go.id.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sebuah layanan edukasi kebencanaan bagi warga Jakarta. Layanan tersebut bernama Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Lokasinya adalah di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta. Ruang KIE Kebencanaan adalah ruang literasi yang difungsikan sebagai sarana peningkatan pemahaman serta edukasi kebencanaan dalam bentuk wahana interaktif bagi warga Jakarta, khususnya para peserta didik.

Selain itu dalam rangka menyiapkan infrastruktur pengendali banjir, yang merupakan salah satu bencana yang turut diakibatkan bencana iklim, Pemprov DKI Jakarta memiliki 566 unit pompa mobile, 799 unit pintu air di 547 lokasi, 549 unit pompa stasioner di 195 lokasi, 240 unit alat berat. Pemerintah DKI Jakarta juga telah menyediakan dasbor “Pantau Banjir” di JAKI atau situs pantaubanjir.jakarta.go.id.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sebuah layanan edukasi kebencanaan bagi warga Jakarta. Layanan tersebut bernama Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta. Lokasinya adalah di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta. Ruang KIE Kebencanaan adalah ruang literasi yang difungsikan sebagai sarana peningkatan pemahaman serta edukasi kebencanaan dalam bentuk wahana interaktif bagi warga Jakarta, khususnya para peserta didik.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam upaya mengakselerasi pencapaian tujuan 13, Pemprov DKI Jakarta berfokus pada pengendalian banjir sebagai salah satu bencana hidrometeorologis yang disebabkan perubahan iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur pengendali banjir dan pengembangan RTH untuk meningkatkan area resapan.

Pengendalian banjir juga menjadi fokus utama dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terlebih banjir merupakan bencana yang diakibatkan aktivitas cuaca sehingga sangat terkait dengan perubahan iklim. Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dalam menanggulangi risiko banjir dari daerah penyangga Jakarta. Salah satu proyek strategis yang telah selesai dilaksanakan adalah pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang menjadi bagian integral dari masterplan sistem pengendalian banjir Jakarta dari hulu. Kedua bendungan ini berhasil mengurangi beban Pintu Air Katulampa di Kota Bogor, mengakibatkan penurunan debit air yang mengalir ke Sungai Ciliwung. Dengan kontribusi ini, dampak banjir di Jakarta dapat dikurangi sekitar 30,6 persen.

Selain itu, pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) yang sebelumnya tertunda. Langkah ini diiringi dengan kelanjutan normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer. Dengan penyelesaian kedua proyek tersebut, diharapkan dapat lebih efektif mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta.

Tak hanya menghadapi banjir dari hulu, pemerintah juga fokus mengatasi banjir rob dengan langkah-langkah proaktif. Pembangunan tanggul pantai, waduk, dan perbaikan tanggul-tanggul menjadi prioritas dalam menghadapi fenomena ini. Pada semester I tahun 2023, sebanyak 16 waduk di Jakarta Barat dan Jakarta Utara direncanakan untuk dibangun dan direvitalisasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap banjir rob dan menjaga keselamatan serta keamanan masyarakat di sepanjang pantai Jakarta.

Peninjauan Tanggul Pantai di Kalibaru, Jakarta Utara
Sumber: Majalah JaKita (2023)

Selain itu pemerintah juga terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan RTH untuk meningkatkan area resapan dan wilayah konservasi lingkungan.

Tujuan 14
Ekosistem Lautan

Keadaan dan Kecenderungan

Salah satu target pada tujuan 14 ekosistem lautan salah satunya yakni melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, salah satu indikator yang diadopsi, yakni Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut yang seluas 107.496 hektare. Kemudian untuk melarang bentuk penangkapan ikan ilegal terdapat indikator persentase kepatuhan pelaku usaha yang meningkat dari 70,93 persen pada tahun 2022 menjadi 82 persen pada tahun 2023. Sedangkan untuk penyediaan akses untuk nelayan kecil terhadap sumber daya laut dan pasar yakni diindikasikan dari ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil, seluruh nelayan sejumlah 5.383 juga sudah terlindungi.

Dari sisi keadaan ekosistem lautannya, untuk di daerah teluk, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan DLH DKI Jakarta, konsentrasi rata-rata kontaminan parasetamol pada musim hujan lebih tinggi dibanding musim kemarau di seluruh lokasi pemantauan Teluk Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2023). Untuk hasil analisis tren indeks pencemaran dari tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa kondisi pencemaran di Teluk Jakarta sempat mengalami penurunan pada rentang tahun 2017-2019. Hal tersebut dilihat dari menurunnya persentase kategori cemar berat dan cemar sedang. Persentase tertinggi kategori cemar berat ditemukan pada tahun 2022 sebesar 13,21 persen. Sedangkan persentase tertinggi kategori cemar sedang didapatkan pada tahun 2020 sebesar 52 persen. Adapun persentase tertinggi kategori cemar ringan dijumpai pada tahun 2018 sebesar 97,78 persen. Sementara persentase tertinggi kategori baik ditemukan pada tahun 2020 sebesar 16 persen (Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2023).

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan pada kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi (Kawasan Suaka Marga Satwa Laut Marine Wildlife Reserve Pulau Rambut dan Perairan seluas 90 hektar dan Taman Nasional Laut Marine National Park Kepulauan Seribu seluas 107.489 hektar) terutama terkait dengan ancaman dampak perubahan iklim seperti coral bleaching dan naiknya suhu air laut yang dapat menjadi ancaman terhadap Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati biota laut. Ancaman ini berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati di Kawasan Kepulauan Seribu.

Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka pemantauan kualitas perairan laut, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas lingkungan hidup juga merilis laporan pemantauan kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta Tahun 2023. Penentuan parameter dominan berdasarkan tingginya frekuensi melewati baku di setiap zona pengamatan. Secara keseluruhan parameter-parameter dominan (TSS dan kekeruhan) tersebut ditemukan pada zona muara. Kemudian dari sisi pengawasan juga dilakukan beberapa upaya untuk melakukan pengawasan.

Pemeriksaan terhadap 15 kapal asal Muara Angke, Cituis dan Indramayu dengan alat tangkap pukat cincin pelagis kecil, jaring tarik berkantong dan garok. Bagi nelayan DKI yang memiliki surat izin dan menggunakan alat tangkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku dipersilahkan melanjutkan kegiatan. Adapun kapal garok dan kapal jaring tarik berkantong asal luar daerah diperintahkan kembali ke pelabuhan asal dan diperingatkan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta (DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2023). Selain itu bentuk pengawasan lainnya yang dilakukan yakni pengawasan peredaran ikan hias.

Dilakukan pengawasan peredaran ikan hias di Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH) Raden Inten, Duren Sawit dan di Pusat Sentra Ikan Hias Air Tawar dan Air Laut Lokbin Susukan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Hasil pengawasan di dua lokasi tersebut diatas tidak ditemukan jenis ikan yang dilindungi sesuai dengan Kepmen KP No 1 tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Jenis Ikan Yang Dilindungi dan tidak ditemukan jenis ikan yang dilarang sesuai dengan Permen KP Nomor 19/Permen KP/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran dan Pengeluaran Jenis Ikan yang membahayakan dan/atau Merugikan Ke Dalam dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kegiatan pengawasan dilanjutkan dengan melakukan pengawasan olahan hasil perikanan di Unit Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke dan Unit Pengolah di Sentra Pengolah Ikan Kalibaru Barat Kecamatan Cilincing (DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2023).

Operasi Gabungan PSDKP bersama dengan Pangkalan PSDKP Jakarta
Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pengawasan Peredaran Ikan Hias
Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Sebanyak 50 nelayan dari Pulau Panggang dan Pulau Pramuka yang merupakan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan alat tangkap ikan ramah lingkungan di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Dalam kegiatan ini, didistribusikan bantuan berupa 100 rol *wire mesh* yang merupakan alat baku membuat bubu, alat tangkap pancing, dan alat bantu penangkapan ikan Fish Finder kepada para peserta.

Pelatihan meliputi pembuatan alat tangkap ramah lingkungan dengan alat tangkap bubu, pancing dan alat bantu penangkapan ikan Fish Finder. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, di mana disebutkan bahwa Alat Penangkap Ikan (API) jenis bubu dan pancing merupakan alat tangkap yang diperbolehkan.

Dengan memberikan alat tangkap alternatif yang ramah lingkungan, seperti bubu dan pancing, Pemprov DKI Jakarta berupaya mendukung nelayan untuk berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut. Selain itu, dengan meningkatkan produksi tangkapan dan memberikan nilai jual yang tinggi, diharapkan kesejahteraan nelayan dan keluarganya dapat ditingkatkan. (DKPKP, 2023).

Pelatihan Pembuatan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Pulau Panggang

Sumber:DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2023)

Pembinaan dan Pengawasan Pedagang Ikan di Muara Baru

Sumber:DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2023)

Kemudian, dalam rangka menjamin keamanan pangan hasil perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta bersama Pangkalan PSDKP Jakarta dan Korwas Polda Metro Jaya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pedagang ikan di Pasar Modern Muara Baru, Jakarta Utara. Pada kesempatan ini, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian formalin pada komoditas perikanan oleh petugas laboratorium dengan hasil keseluruhan negatif formalin (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian, 2023).

Tujuan 15
Ekosistem Daratan

Keadaan dan Kecenderungan

Sebetulnya secara umum target pada Tujuan 15 tidak terlalu relevan untuk konteks Jakarta, untuk itu pada akhirnya hanya terdapat satu indikator yang diadopsi dalam Tujuan ini yakni proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan) dan di tahun 2023 pun sejauh ini tidak ada penambahan. Namun sebagai gambaran umum terkait kondisi keanekaragaman hayati dapat tergambarkan dalam dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Hasil survei dari kajian dalam dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 di lima sampel lokasi pada kegiatan tahun 2023 ini menunjukkan bahwa kekayaan jenis burung dipengaruhi oleh keragaman struktur vegetasi. Semakin beragam struktur vegetasinya maka keanekaragaman jenis burung semakin tinggi. Keanekaragaman jenis reptil dipengaruhi oleh keragaman struktur vegetasi, sedangkan keanekaragaman jenis amfibi dipengaruhi oleh keberadaan sumber air, upaya konservasi keanekaragaman hayati secara eks-situ. RTHK dapat diisi dengan berbagai jenis tanaman endemik/langka/dilindungi. RTHK Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) juga menjadi habitat satwa perkotaan seperti burung. Dalam laporan tersebut juga disebutkan juga permasalahan yang berkaitan dengan spesies invasif. Eceng gondok (Eichornia crassipes) merupakan invasive alien species yang ditemukan di Suaka Margasatwa Muara Angke (Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, 2023).

Tantangan dan Pembelajaran

Konservasi keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan serius karena kompleksitas pengelolaan pembangunan yang telah terbangun. Pertumbuhan pesat wilayah megapolitan Jakarta dan posisinya yang strategis telah mendorong lonjakan populasi penduduk yang sangat signifikan. Kenaikan jumlah penduduk ini menjadi salah satu awal dari berbagai masalah lingkungan di kota, karena menimbulkan tuntutan untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan. Dampaknya, terjadi perubahan dalam pengembangan fisik lingkungan dan perencanaan kota, yang seringkali mengorbankan aspek lingkungan. Selain itu, arah pembangunan kota cenderung mengabaikan ruang terbuka hijau, yang sebenarnya merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati.

Kebijakan dan Strategi

Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2021 menjadi 27,07 pada tahun 2022. Kenaikan ini mencerminkan pencapaian positif dalam pengelolaan tutupan lahan di Provinsi DKI Jakarta. Faktor utama peningkatan nilai IKTL ini adalah ekspansi luas kelas tutupan lahan sebagai dasar penetapan nilai vegetasi non-hutan bila dibandingkan dengan tahun 2021. Meningkatnya luas kelas tutupan lahan pada tahun 2022 mencerminkan keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan penggunaan lahan termutakhir dalam skala yang detil sehingga dapat teridentifikasi area bervegetasi dalam penggunaan lahan RTH yang berukuran kecil. Pembaharuan dan peningkatan beberapa taman kota juga berkontribusi pada pertumbuhan area bervegetasi di wilayah tersebut.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Jakarta

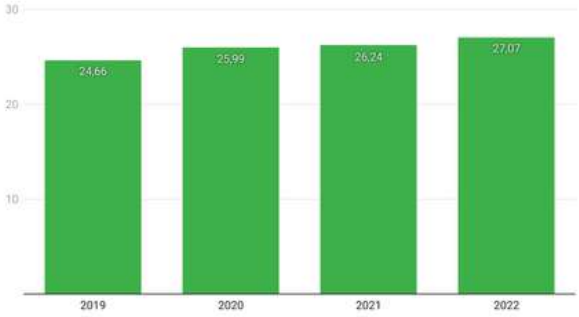

Sumber: DPHK (2023)

Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta

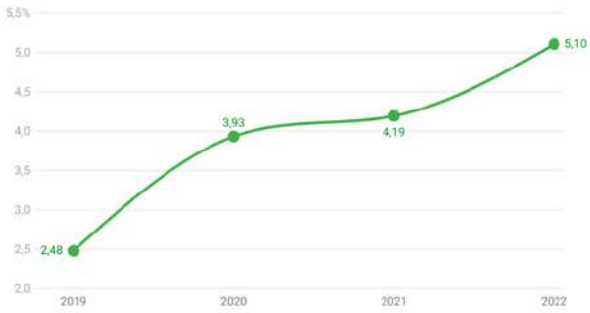

Sumber: DPHK (2023)

Dalam kinerja urusan kehutanan pada periode 2017-2022, pembebasan lahan RTH dengan peningkatan tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Pada periode tersebut, terdapat hingga 55,17 hektar luas RTH yang dibebaskan. Berikut rincian pembebasan lahan RTH baik RTH hutan, RTH taman, dan RTH makam selama kurun waktu 2018 hingga 2022. Persentase penambahan rasio RTH hutan, taman, makam dihitung dari pembebasan lahan RTH hutan, taman, makam setiap tahun dibagi dengan luas daratan DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2022, 144-145).

Pada periode 2017-2022, terdapat tren pembangunan RTH Taman dan Makam berfluktuasi. Peningkatan tahunan terluas terjadi pada tahun 2019, di mana telah terbangun RTH Taman dan Makam seluas 34,37 hektar. Namun akibat adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kemampuan fiskal pemerintah, pada tahun 2020 tidak dilakukan pembangunan RTH Taman dan Makam.

Pemanfaatan lahan-lahan terbengkalai menjadi strategi baru untuk menata kawasan di Jakarta sekaligus memperluas ruang terbuka hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan kawasan hijau di sepanjang kolong Tol Becakayu dengan tanaman hias dan sistem pertanian perkotaan.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Pemanfaatan lahan-lahan terbengkalai menjadi strategi baru untuk menata kawasan di Jakarta sekaligus memperluas ruang terbuka hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan kawasan hijau di sepanjang kolong Tol Becakayu dengan tanaman hias dan sistem pertanian perkotaan.

Penataan kawasan perlu diperbanyak di Jakarta sebagai wadah komunikasi dan edukasi. Contoh lainnya yakni taman interaktif Duren Sawit yang sebelumnya hanya lahan kosong yang tidak terawat kemudian diubah menjadi taman yang bersih dan hijau. Inisiatif ini tidak hanya menciptakan ruang terbuka yang lebih hijau, tetapi juga berfungsi sebagai wadah komunikasi dan edukasi bagi masyarakat sekitar. Keseluruhan upaya ini mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengelola lahan secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas tutupan lahan dalam konteks perkotaan.

Di tahun 2023 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta tidak hanya aktif melakukan penanaman, tetapi juga mencatat penanaman yang dilakukan bersama DKPKP Provinsi DKI Jakarta dan 5 wilayah Kota Administrasi Jakarta. Tercatat sudah tertanam sejumlah 253.666 jenis pohon pelindung dan pohon produktif, seperti Ketapang Kencana, Trembesi, Mahoni, Bungur, Sawo Kecik, dan lainnya. Sementara jenis tanaman hias dan tanaman obat keluarga mencapai 6.568.191 pohon (Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta, 2023).

Selain itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keanekaragaman hayati di Provinsi DKI Jakarta, hasil dari monev tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar program dan rencana aksi yang terdapat pada Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta sudah terlaksana, adapun beberapa program sedang berjalan dan ada yang belum dapat dilaksanakan.

Hasil rekomendasi dari dokumen monev tersebut diantaranya perlu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu segera menyusun *Biodiversity Action Plan* (BAP) yang diselaraskan dengan isu perubahan iklim sebagaimana dimandatkan oleh dokumen IBSAP, pembentukan kampung kehati berbasis kearifan lokal, pembentukan Balai Kliring keanekaragaman hayati Daerah sebagai sumber informasi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan penetapan Kawasan Ekosistem Esensial dalam bentuk hutan kota/taman kehati/kebun bibit (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2023).

Penataan Kawasan Hijau di Sepanjang Kolong Tol Becakayu
Sumber: DPHK Provinsi DKI Jakarta (2023)

Penanaman Pohon Buah di Pinggir Banjir Kanal Timur
Sumber: Majalah JaKita (2023)

Tujuan 16
Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Keadaan dan Kecenderungan

Perdamaian

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan damai di Provinsi DKI Jakarta, indikator yang digunakan menunjukkan pencapaian yang membaik. Hal tersebut tercermin dari angka kematian yang disebabkan konflik per 100.000 penduduk yang terus menurun sejak tahun 2021. Pada 2023, tingkat kematian akibat konflik di Jakarta mencapai 0,046 kematian per 100.000 orang atau sebanyak 5 korban jiwa, lebih rendah dari angka tahun sebelumnya yang sebesar 0,056 kematian per 100.000 orang atau sebanyak 6 korban jiwa Penurunan angka kematian akibat konflik ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah telah memberikan hasil yang positif. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menjadi indikasi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perdamaian dan toleransi, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap penurunan angka konflik di Jakarta.

Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jakarta

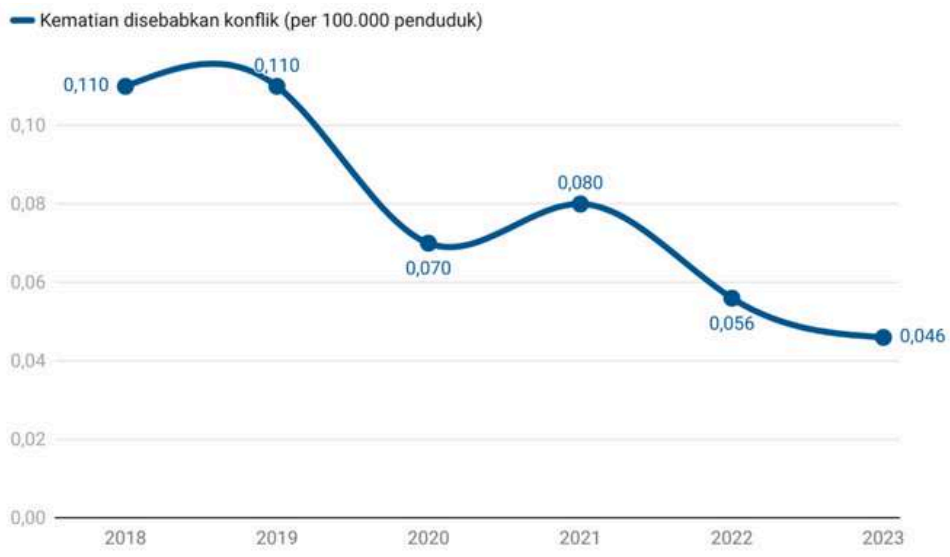

Sumber: Bakesbangpol (2023)

Tata Kelola

Aspek Pemerintahan

Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, terdapat beberapa target untuk mengukur capaian ini. Diantaranya seperti target pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Untuk capaian indikator proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui pada tahun 2023 telah mencapai target dengan serapan realisasi belanja daerah sebesar 92,55 persen. Capaian target ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 77,87 persen, dan meningkat cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 84,27 persen. Meski secara akumulasi, catatan laporan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dari tahun ke tahun untuk realisasi belanja cukup fluktuatif.

Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Daerah Terhadap Anggaran yang Disetujui

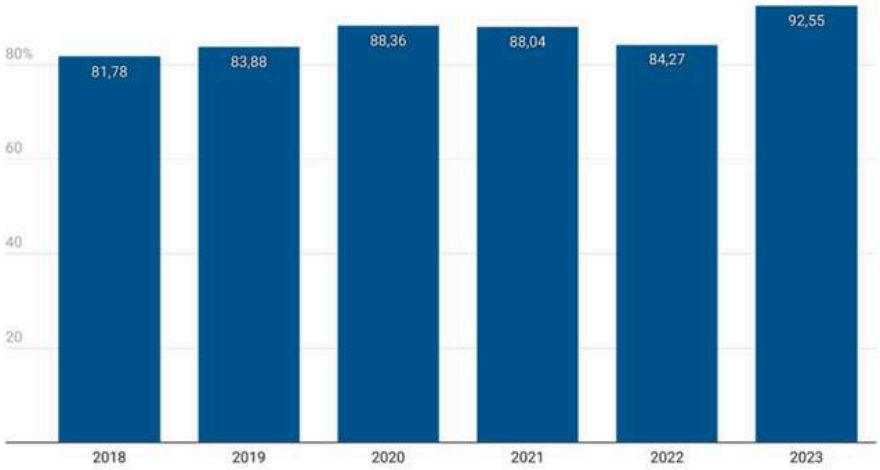

Sumber: BPKD (2024), diolah.

Lalu, sebagai bentuk upaya transparansi dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan masyarakat anti korupsi, menunjukkan pada capaian indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) juga telah mencapai target dengan skor 76,96. Capaian target ini meningkat dari tahun 2022 dengan skor 73,3. Hal ini mengindikasikan kesadaran akan tindakan anti korupsi semakin meningkat dan hal ini dapat mendorong tingkat persepsi publik terhadap pemerintah dalam pemberantasan tindakan korupsi di Jakarta. Selanjutnya, untuk capaian indikator persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 kembali mempertahankan laporan keuangan yang telah terstandarisasi dengan nilai 100 persen atau mendapatkan predikat WTP. Predikat ini berhasil dipertahankan selama 6 tahun berturut-turut.

Selain itu, capaian indikator yang telah mencapai target juga ditunjukkan pada indikator jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik mencapai 89,6 persen pada tahun 2023 yang lebih tinggi dibandingkan pada capaian tahun sebelumnya sebesar 81,86 persen. Angka tersebut telah mencapai target tahun berjalan sebesar 82,00 persen. Selain itu, Capaian perbaikan juga terlihat pada indikator persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B. Pada tahun 2023, capaian ini telah mencapai 82,47 persen dengan predikat A-. Capaian indikator ini terus membaik dibandingkan tahun 2022, yang sebelumnya berada pada angka 78,98 persen.

Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi ≥ B

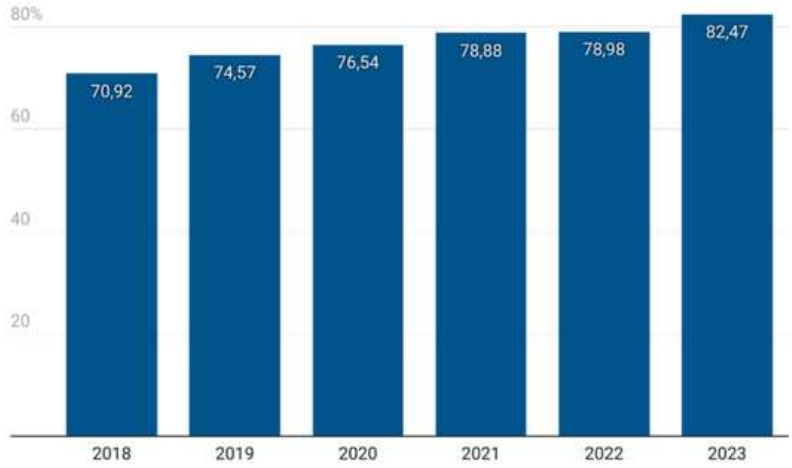

Sumber: Biro ORB (2023), diolah.

Dalam capaian target ini, juga terdapat indikator yang terpantau capaiannya membaik, yakni indikator persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥B terpantau terus membaik pada tahun 2023. Hal ini ditandai dengan pencapaian 81,06 persen, meski masih di bawah target tahun berjalan, yakni dengan target sebesar 82,00 persen. Namun, capaian indikator ini membaik dari tahun 2022, yang berada pada angka 80,51 persen.

Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B

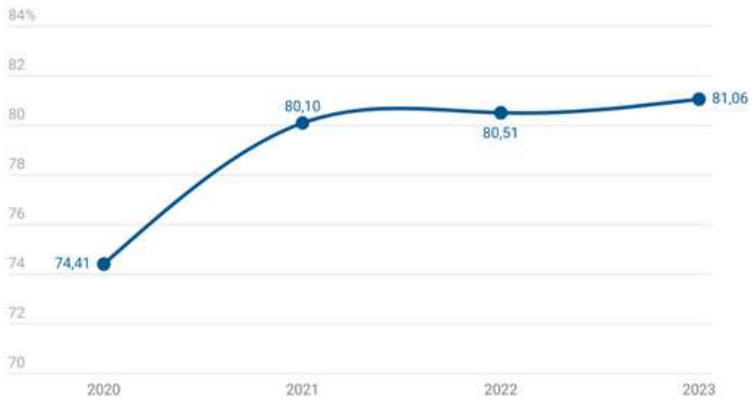

Sumber: Biro ORB (2024), diolah.

Lalu, dalam upaya merespon pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif, dan representatif di setiap tingkatan. Pada capaian indikator Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) telah mencapai target sebesar 26,5 persen, capaian ini pun juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun berjalan, yakni sebesar 26,19 persen. Capaian ini menunjukkan keterwakilan perempuan dalam posisi pengambilan keputusan sebagai bentuk komitmen untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta mengatasi kesenjangan gender dalam peran kepemimpinan dan memajukan prinsip pemerintahan yang inklusif.

Gambar 3.16.5. Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II)

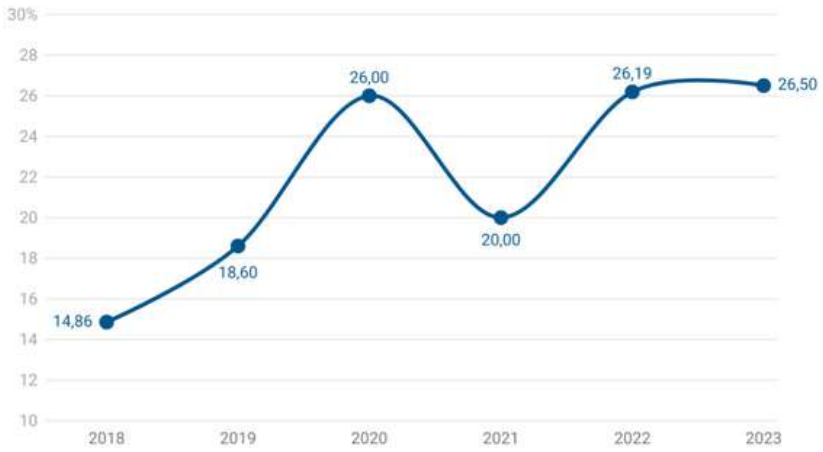

Sumber: BKD (2024), diolah.

Selanjutnya, sebagai bentuk capaian indikator Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional, Pemprov DKI Jakarta juga terlibat dalam organisasi dan forum internasional. Selama tahun 2023, Pemprov DKI Jakarta terlibat pada 5 organisasi atau forum internasional yang dipartisipasi yakni diantaranya keanggotaan Metropolis yang masuk dalam organisasi United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG-ASPAC), CityNet, ICLEI, Watersafe Cities Accelerator, dan Breathe Cities. Melalui keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dalam organisasi/forum internasional ini telah mencapai target tahun 2023.

Aspek Administrasi Kependudukan

Dalam memenuhi dan melindungi hak-hak kehidupan masyarakat, pencatatan administrasi kependudukan merupakan hal yang fundamental serta dapat dimanfaatkan pemerintah untuk perencanaan pembangunan daerah. Pada capaian indikator proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur, dan indikator persentase anak yang memiliki akta kelahiran telah mencapai target sebesar 99,99 persen, capaian ini tercatat melebihi target yang ditetapkan pada tahun berjalan sebesar 98,5 persen.

Pencatatan Kelahiran dan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Sumber: Disdukcapil (2023), diolah.

Aspek Kebebasan dan Demokrasi

Dalam mendorong iklim kebebasan berpendapat dan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta, capaian indikator kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media perlu mendapatkan perhatian khusus. Capaian pada indikator ini mendapatkan skor 71,73 yang menurun pada capaian skor tahun sebelumnya sebesar 79,42. Penurunan ini perlu memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi ancaman terhadap kebebasan pers dan menjamin keselamatan dan keamanan jurnalis, yang merupakan hal penting untuk menumbuhkan masyarakat yang terbuka dan demokratis. Selanjutnya dalam target menjamin akses publik terhadap informasi, pada capaian indikator jumlah badan publik yang berkualifikasi informatif pada tahun 2023 telah meningkat sebanyak 33 Badan Publik. Jumlah ini tercatat melebih capaian target yang telah ditetapkan pada tahun berjalan sebanyak 22 Badan Publik. Peningkatan jumlah badan publik yang memiliki kualifikasi informatif menunjukkan kemajuan dalam menjamin akses masyarakat terhadap informasi. Serta, dalam capaian indikator jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi juga telah menyelesaikan target capaian sebanyak 16 registrasi penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Tantangan dan Pembelajaran

Dalam mengimplementasikan Tujuan 16 pada aspek keamanan dan tata kelola di Kota Jakarta juga terdapat tantangan. Upaya dalam mempertahankan lingkungan yang aman dan kondusif, masih kerap terjadi tawuran antar masyarakat di beberapa wilayah Jakarta. Tawuran antar masyarakat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan melemahkan upaya menjaga lingkungan yang aman dan kondusif di Jakarta. Insiden-insiden ini dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan properti, dan meningkatnya ketegangan dalam masyarakat, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Pemicu dari tawuran ini disebabkan oleh berbagai hal, terlebih pada tahun 2024 akan dilaksanakannya pemilihan umum. Mendekatnya pemilu pada tahun 2024 dapat meningkatkan ketegangan sosial dan politik, sehingga berpotensi berkontribusi pada meningkatnya insiden tawuran antar komunitas. Pemilu sering kali meningkatkan persaingan dan persaingan antar faksi politik atau kelompok masyarakat, sehingga menimbulkan peningkatan emosi dan konfrontasi.

Kebijakan dan Strategi

Dalam mewujudkan tercapainya Tujuan 16, Pemprov DKI Jakarta turut menyusun strategi dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mewujudkan institusi pemerintah yang tangguh.

Pengamanan Persiapan Pemilu 2024

Memasuki tahun pemilihan umum 2024, Pemprov DKI Jakarta turut mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang aman dan damai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Sosialisasi Sukses Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) bersama Inspektorat yang dihadiri 320 peserta dari 155 unsur organisasi masyarakat (ormas) di Gedung Dinas Teknis, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta juga menambahkan personil Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan pengamanan di beberapa titik rawan kekerasan di wilayah kota administrasi Jakarta, serta bekerja sama dengan gabungan TNI dan aparat kepolisian.

Sosialisasi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Bakesbangpol, (2023)

Pencegahan Kenakalan Remaja dan Antisipasi Aksi Tawuran

Kekerasan tawuran masih kerap terjadi di Jakarta dan menjadi permasalahan untuk capaian Tujuan 16 pada aspek keamanan. Dalam mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menekan angka kekerasan tawuran di Jakarta, turut memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan kenakalan remaja di sekolah-sekolah. Dengan melakukan intervensi di tingkat sekolah, pemerintah berusaha untuk mengatasi akar penyebab perilaku kenakalan remaja. Selain itu, dengan membina kolaborasi antara pihak pendidikan, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan masyarakat melalui pembentukan satgas. Pemprov DKI Jakarta berupaya membangun jejaring dukungan yang mampu mengatasi berbagai tantangan terkait dengan kenakalan remaja.

Meningkatkan Persepsi Perilaku Anti Korupsi

Pencegahan perilaku korupsi tidak hanya dilakukan untuk di lingkungan institusi pemerintahan, namun juga harus didukung oleh semua kalangan masyarakat. Pemprov DKI Jakarta turut mendorong upaya ini dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekaligus bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2023. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang bersinergi dengan Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri DKI Jakarta dalam acara Penyuluhan Hukum yang dihadiri oleh perwakilan sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

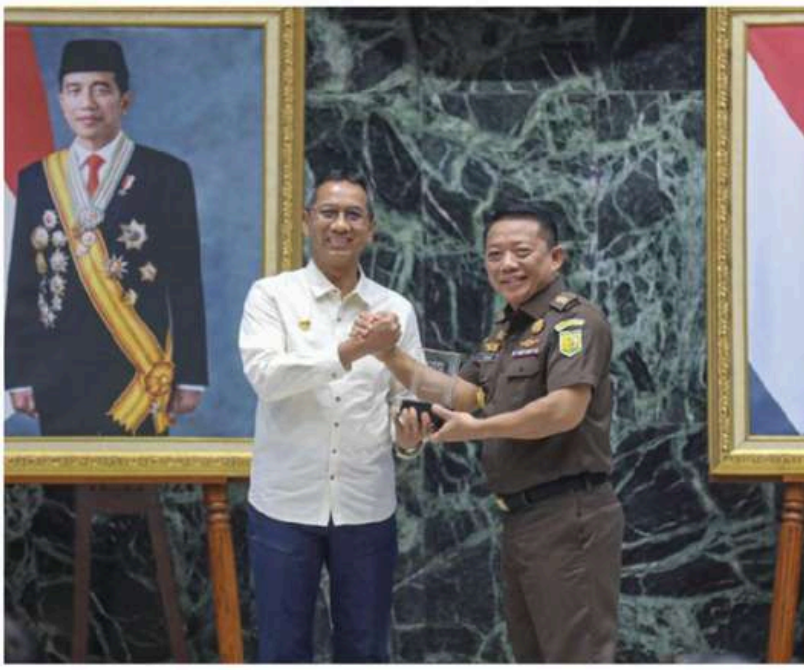

Sosialisasi Hari Anti Korupsi Dunia
Sumber: Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (2023)

TPB 16

Selanjutnya, dalam mewujudkan pemerintahan yang tangguh dan akuntabel, Pemprov DKI Jakarta turut bekerja sama dengan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan supervisi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Pada implementasi pencegahan anti korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan monitoring center for prevention program yang bekerjasama dengan KPK. Kegiatan ini berisi tentang instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator, dan sub-indikator. Serta, dilakukan pembentukan tim saber pungli yang berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan praktik pungli, serta menerima dan menginvestigasi laporan masyarakat terkait praktik pungli, dan whistle blowing system (WBS) Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi.

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam upaya akselerasi capaian aspek keamanan di Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengoptimalisasikan laporan masyarakat terkait keamanan melalui aplikasi Jakarta Aman (JakAman) yang juga terintegrasi pada aplikasi JAKI. Pada aplikasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan kejadian darurat dan tindakan kejahatan untuk mendapatkan pertolongan segera. Aplikasi JakAman berperan penting dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan publik dengan menyediakan platform langsung dan mudah diakses bagi warga untuk melaporkan kejadian darurat dan kejahatan. Penerapan teknologi inovatif seperti aplikasi JakAman menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan solusi digital demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini memanfaatkan potensi aplikasi seluler untuk mengatasi tantangan keamanan yang mendesak dan memodernisasi sistem tanggap darurat.

Integrasi aplikasi JakAman dengan layanan darurat, termasuk koneksi langsung ke polisi melalui nomor 112, memfasilitasi respons cepat dan efisien terhadap insiden yang dilaporkan. Komunikasi real-time ini memungkinkan pihak berwenang untuk memprioritaskan dan mengirimkan sumber daya secara efektif, sehingga berpotensi mengurangi waktu respons dan meningkatkan hasil dalam situasi darurat.

Di sisi lain, dengan mendorong pelaporan masyarakat melalui aplikasi JakAman, Pemprov DKI Jakarta mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan. Memberdayakan warga negara untuk berkontribusi aktif dalam pencegahan kejahatan dan tanggap darurat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dan solidaritas dalam masyarakat.

Tujuan 17
Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Keadaan dan Kecenderungan

Keuangan Daerah

Secara keseluruhan, keuangan daerah DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat dan pengeluaran yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencapai Rp70,66 triliun, dengan realisasi pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, anggaran belanja daerah pada 2023 mencapai Rp72,14 triliun, dan realisasi belanja hingga akhir tahun adalah sebesar Rp66,76 triliun, atau mencapai 92,55 persen dari total anggaran. Dengan demikian, Proporsi Anggaran Domestik Daerah yang didanai oleh PAD mencapai 73,60 persen hingga 31 Desember 2023.

Proporsi PAD dan Rasio Pajak Terhadap PDRB

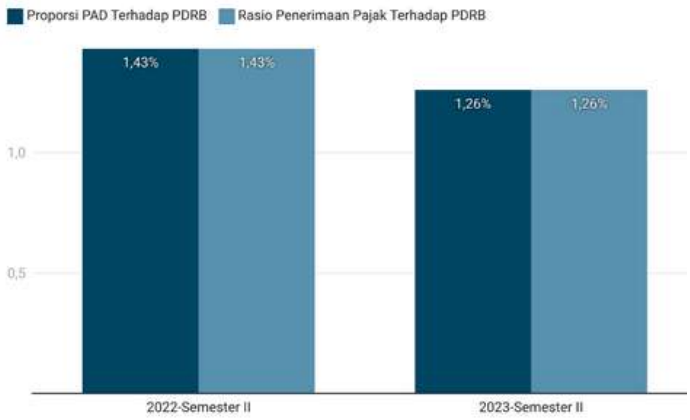

Sumber: BPS (2024); BPKD (2024), diolah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mencapai Rp49,14 triliun pada 31 Desember 2023, naik 7,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar pendapatan berasal dari penerimaan pajak. Pada periode tersebut, realisasi penerimaan pajak Rp43,52 triliun, mengalami kenaikan signifikan sebesar 8,04 persen dari tahun sebelumnya. Dengan capaian tersebut, proporsi PAD terhadap PDRB DKI Jakarta mencapai 1,43 persen.

Realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta

Sumber: BPKD (2024), diolah.

Ekspor Non Migas

Pada 2023, komponen ekspor menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Jakarta. Aktivitas ekspor mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,67 persen, meski melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 12,60 persen. Total nilai ekspor Jakarta sepanjang tahun 2023 mencapai US$11,08 miliar, atau turun sebesar 3,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$11,50 miliar.

Nilai Ekspor Bulanan Jakarta

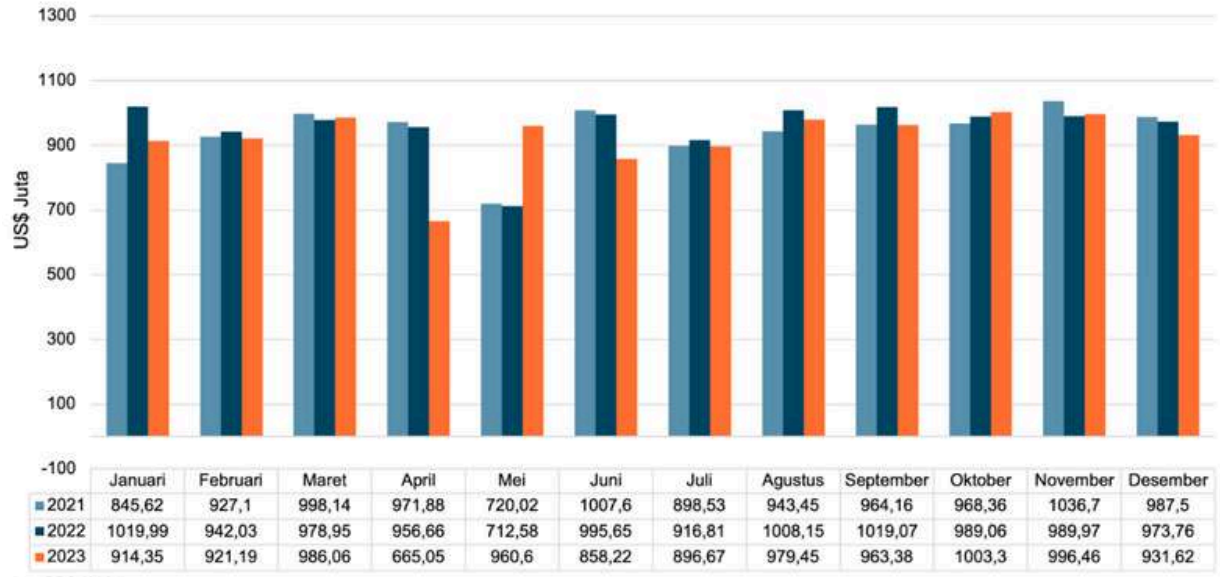

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
2021	845,62	927,1	998,14	971,88	720,02	1007,6	898,53	943,45	964,16	968,36	1036,7	987,5
2022	1019,99	942,03	978,95	956,66	712,58	995,65	916,81	1008,15	1019,07	989,06	989,97	973,76
2023	914,35	921,19	986,06	665,05	960,6	858,22	896,67	979,45	963,38	1003,3	996,46	931,62

Sumber: BPS (2024), diolah.

Penurunan nilai ekspor non-migas Provinsi DKI Jakarta juga turut berkontribusi pada perlambatan kinerja ekspor secara keseluruhan. Pada tahun 2023, nilai ekspor non-migas DKI Jakarta mencapai US$11,05 miliar, mengalami penurunan sebesar 3,64 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhi perlambatan ini adalah penurunan pada ekspor barang, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang melambat dan meningkatnya tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor melalui Laut Merah (Bank Indonesia, 2024).

Perkembangan Nilai Ekspor Jakarta

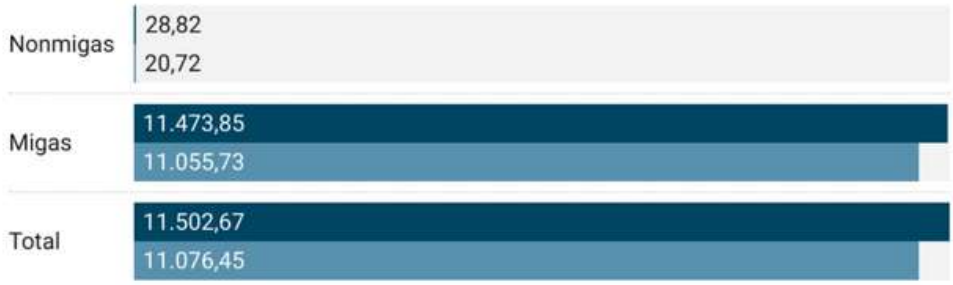

*US$ Juta

Sumber: BPS (2024), diolah.

Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Sektor

Sumber: BPS (2024), diolah.

Kinerja pertumbuhan ekspor Jakarta salah satunya didorong oleh ekspor luar negeri yang bersumber dari komoditas ekspor utama, yakni otomotif yang tumbuh sebesar 6,50 persen. Selain itu, pertumbuhan ekspor juga didorong oleh kontribusi positif dari sektor ekspor jasa, yang sejalan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023 (Bank Indonesia, 2024).

Tantangan dan Pembelajaran

Tantangan utama dalam upaya meningkatkan ekspor non migas Provinsi DKI Jakarta berasal dari kondisi perlambatan ekonomi dan ketegangan geopolitik global. Perlambatan ekonomi global berpotensi menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk ekspor dari DKI Jakarta, yang pada gilirannya berdampak pada volume ekspor nasional, termasuk Provinsi DKI Jakarta.

Selain itu, ketegangan geopolitik global juga menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Ketegangan ini berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku industri dalam negeri yang berorientasi ekspor, serta mengganggu proses distribusi barang ekspor tersebut. Gangguan dalam rantai pasok dan distribusi dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan pengiriman, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja ekspor DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi yang cermat dan adaptif untuk menjaga daya saing dan kelangsungan ekspor DKI Jakarta di pasar global.

Kebijakan dan Strategi

Peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk mencapai Tujuan 17, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan sejumlah kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat peran Jakarta dalam forum internasional. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan berbagai strategi, seperti intensifikasi, ekstensifikasi, dan elektronifikasi pajak daerah. Hal ini mencakup berbagai program seperti pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan pajak daerah, pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster*, serta penyempurnaan data subjek dan objek pajak daerah. Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan memanfaatkan data potensi dan intelijen pajak daerah, serta penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan pemurnian data piutang pajak daerah.

Selain itu, dalam upaya ekstensifikasi pajak daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan di atas air, serta mengimplementasikan elektronifikasi pengelolaan pajak reklame yang terintegrasi dengan sistem pajak daerah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan reklame oleh BUMD/swasta melalui skema public-private partnership. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi juga melakukan pengukuhan wajib pajak baru berdasarkan pemutakhiran data melalui *fiscal cadaster* dan pendataan, sebagai bagian dari strategi ekstensifikasi pajak daerah.

Showcase Pajak Digital dalam kegiatan Jakarta Kreatif Festival 2023
Sumber: Bapenda Provinsi DKI Jakarta (2023)

Peningkatan Peran Jakarta pada Forum Internasional

Dalam rangka meningkatkan peran Jakarta dalam forum internasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta aktif berpartisipasi dalam berbagai acara dan pertemuan tingkat internasional. Pada 2023, Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC)* dan *ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023*. Acara yang merupakan bagian dari rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN tersebut menjadi platform penting bagi Jakarta untuk bekerjasama dengan pemerintah kota dan daerah lain di Asia Tenggara dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam acara-acara internasional juga mencakup konferensi COP28 *Local Climate Action Summit* di Dubai pada Desember 2023 (Biro Umum dan ASD Setda, 2023). Melalui acara ini, Jakarta menyatakan komitmennya untuk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi perubahan iklim global. Dengan menjadi pembicara dalam Diskusi Panel *Advancing Ambitious Multi-Level Climate Action*, Pj. Gubernur mewakili Jakarta dalam memperjuangkan aksi iklim yang tangguh dan berkelanjutan. Selain itu, pertemuan bilateral dengan pemimpin kota-kota lain, seperti Gubernur Tokyo dan Wali Kota Melbourne, menunjukkan upaya Jakarta untuk menjalin kemitraan yang kuat dalam mewujudkan masa depan yang lebih ramah lingkungan.

Partisipasi aktif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam forum internasional menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam pembangunan global. Dengan melibatkan diri dalam diskusi dan kesepakatan internasional, Jakarta tidak hanya memperkuat posisinya sebagai kota metropolitan terkemuka di Asia, tetapi juga membuktikan bahwa ia siap bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan bersama, termasuk penurunan emisi karbon menuju target nol emisi pada 2050.

Kegiatan MGMAC & AMF 2023
Sumber: Setda Provinsi DKI Jakarta (2023)

Konferensi COP28 Local Climate Action Summit
Sumber: Setda Provinsi DKI Jakarta (2023)

Upaya Percepatan Pencapaian TPB

Dalam upaya mendorong kerjasama pemerintah-swasta serta peningkatan penanaman modal dan investasi di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan acara *Jakarta Investment Award* 2023 (Biro Umum dan ASD Setda, 2023). Acara yang diselenggarakan pada 31 Oktober 2023 di Hotel Borobudur Jakarta Pusat ini merupakan wujud komitmen dalam membangun iklim investasi yang kondusif dan menguntungkan bagi para pelaku usaha. Kegiatan ini juga sejalan dengan amanat dari Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 43, yang menekankan pentingnya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban dan tanggung jawab mereka.

Melalui *Jakarta Investment Award* 2023, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan kepada para penanam modal yang telah menunjukkan realisasi investasi tertinggi dan tingkat kepatuhan terbaik dalam menjalankan usahanya. Penghargaan ini tidak hanya menjadi apresiasi bagi para pelaku usaha yang berkontribusi dalam membangun ekonomi Jakarta, tetapi juga menjadi dorongan bagi para investor lainnya untuk terus berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dengan mengadakan acara ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berharap dapat menjalin kerja sama yang lebih erat dengan para pelaku usaha, memperkuat iklim investasi, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berdaya saing tinggi. Selain itu, penghargaan ini juga menjadi momentum untuk merayakan pencapaian dan kontribusi para investor dalam memajukan perekonomian Jakarta, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta Investment Award 2023
Sumber: Setda Provinsi DKI Jakarta (2023)

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Capaian target pada Tujuan 1 sejumlah 6 indikator diantaranya berkaitan dengan gizi, akta kelahiran, perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan formal dan informal. Hal ini menunjukan adanya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi semua anggota masyarakat, serta memperkuat infrastruktur sosial yang mendukung inklusi dan keadilan. Dalam hal penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sanitasi yang layak memerlukan komitmen jangka panjang, kerja sama yang erat antar berbagai pihak, serta pendekatan yang holistik yang tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri dapat terwujud secara berkelanjutan.

Capaian target pada Tujuan 2 sejumlah 3 indikator berkaitan dengan kerawanan pangan, konsumsi pangan, anemia pada ibu hamil. Isu strategis yang disoroti pada Tujuan 2 ini adalah bahwa penanggulangan stunting dan peningkatan kecukupan pangan memerlukan kerja keras, kolaborasi antar berbagai pihak, dan komitmen jangka panjang. Kesuksesan strategi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesejahteraan pangan masyarakat mencerminkan pentingnya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah serta upaya berkelanjutan dalam menyediakan akses pangan yang cukup bagi semua warga.

Capaian target pada Tujuan 3 sejumlah 11 indikator yang berkaitan dengan angka kematian ibu, eliminasi malaria, eliminasi kusta, penggunaan kontrasepsi, KB, kelahiran total, cakupan jaminan kesehatan nasional, fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial, puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, RSUD Kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis lainnya. Pembelajaran yang diperoleh dari capaian ini adalah bahwa kesadaran akan pentingnya perawatan medis yang tepat dan imunisasi bagi kesehatan individu menjadi kunci dalam mencapai progres yang signifikan. Langkah-langkah pemerintah, dukungan dari lembaga kesehatan, dan peran aktif dari masyarakat dalam mensosialisasikan pentingnya kesehatan dan imunisasi telah membuktikan keberhasilannya.

Capaian target pada Tujuan 4 sejumlah 23 indikator yang berkaitan dengan proporsi anak-anak dan remaja di kelas 5,8, usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam membaca dan matematika, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/SMP/SMA sederajat, angka anak tidak sekolah jenjang, angka partisipasi kasar, angka melek aksara, proporsi sekolah dengan akses terhadap listrik, proporsi sekolah dengan akses terhadap komputer untuk pengajaran, proporsi sekolah dengan akses terhadap fasilitas cuci tangan, persentase guru pada jenjang TK/RA/BA, dan SMA. Pembelajaran yang dapat diambil dari capaian ini adalah bahwa upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan dan keterampilan TIK. Kolaborasi yang kokoh antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan era digital saat ini.

Capaian target pada Tujuan 5 sejumlah 6 indikator yang berkaitan dengan perempuan berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun, proporsi kursi legislatif pada DPRD Provinsi, perempuan yang berada di posisi manajerial di eselon II, proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam. Pembelajaran yang dapat diambil dari capaian ini adalah bahwa perjuangan melawan praktik pernikahan dini dan paksa membutuhkan komitmen yang kuat, tindakan terkoordinasi, dan pendekatan yang holistik. Hanya dengan kolaborasi antara semua pihak terlibat, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat luas, praktik berbahaya ini dapat dieliminasi sepenuhnya. Dengan terus menggalang dukungan dan mengambil tindakan yang tepat, DKI Jakarta dapat bergerak menuju terwujudnya lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak untuk berkembang tanpa tekanan perkawinan yang tidak sesuai.

Beberapa indikator pada tujuan 6 sudah mencapai targetnya di tahun 2023, diantaranya persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman sebesar 66,73 persen dan indikator indeks kualitas lahan sebesar 27,17. Kemudian untuk indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami perbaikan dari 92,79 persen menjadi 98,53 persen. Lalu pada subindikator persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka pada tahun 2023 sebesar 0,13 persen hal ini sudah mencapai target-

di 2023 dan sub indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T juga sudah tercapai dengan realisasi di tahun 2023 sebesar 23,1 persen. Namun subindikator kelima yakni persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja justru memburuk karena capaiannya mengalami penurunan dari 3,14 persen menjadi 3,06 persen pada tahun 2023.

Untuk memenuhi kekurangan layanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur termasuk juga berupaya untuk memperluas cakupan pelayanan dengan memperluas cakupan pelayanan melalui penambahan penyediaan air bersih baik dari pengembangan fasilitas pengolahan air bersih di wilayah Jakarta maupun pemenuhan pasokan air bersih dari luar Jakarta, penurunan tingkat kebocoran air juga memperbaiki kualitas layanan air bersih yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

Dalam rangka menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern di DKI Jakarta, sejumlah indikator menunjukkan capaian yang terus membaik. Rasio Elektrifikasi Jakarta telah mencapai 100 persen sejak tahun 2018 dan terus terjaga hingga tahun 2023, mengindikasikan bahwa setiap rumah tangga di Jakarta telah memiliki akses terhadap energi listrik. Selain itu, rasio penggunaan gas rumah tangga di Jakarta konsisten mengalami kenaikan sejak 2019, mencerminkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta telah memiliki akses terhadap gas sebagai sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan. Konsumsi listrik per kapita tercatat mengalami peningkatan, menunjukkan perbaikan dalam upaya peningkatan konsumsi listrik di Jakarta.

Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam pencapaian Tujuan 7, utamanya terkait dengan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah di sektor energi, dan minimnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk sektor energi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewenangan dan alokasi anggaran dalam sektor energi guna mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan regulasi yang lebih jelas dan dukungan finansial yang memadai, Provinsi DKI Jakarta dapat mempercepat transisi menuju penggunaan energi bersih dan berkelanjutan.

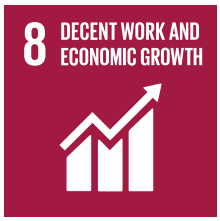

Meski mengalami sedikit perlambatan, ekonomi Jakarta tetap tumbuh positif pada tahun 2023. Kondisi tersebut juga mendorong penciptaan lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan partisipasi angkatan kerja dan berkurangnya pengangguran. Meski demikian, produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta tercatat mengalami penurunan, tercermin dari laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejumlah tantangan masih mempengaruhi pencapaian Tujuan 8 di DKI Jakarta, terutama karena tahun 2023 merupakan tahun politik, yang menyebabkan potensi tertahannya investasi seperti yang terjadi pada periode pemilu sebelumnya. Tantangan lainnya meliputi perlambatan pertumbuhan ekonomi global, ketegangan geopolitik yang masih berlanjut, serta kenaikan suku bunga bank sentral negara-negara di dunia yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta.

Untuk tetap mendorong momentum pemulihan ekonomi di tengah tantangan dan risiko yang ada, penguatan peran Jakarta sebagai lokomotif utama perekonomian nasional menjadi sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui optimalisasi sektor ekonomi utama dengan mendorong hilirisasi, serta menggali sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta yang mendukung penguatan posisi Jakarta sebagai kota global juga dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah, pertumbuhan sektor industri manufaktur Provinsi DKI Jakarta melambat pada tahun 2023. Tantangan utama yang dihadapi sektor ini berasal dari penurunan volume ekspor akibat turunnya permintaan global, yang dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung.

Untuk meningkatkan peran sektor industri manufaktur dalam ekonomi Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu merancang rencana strategis industri manufaktur yang sesuai dengan transformasi ekonomi Jakarta menjadi pusat jasa dan perdagangan. Selain itu, diperlukan upaya lebih besar untuk mendukung pengembangan industri manufaktur yang ramah lingkungan (industri manufaktur hijau) di Jakarta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor industri manufaktur Jakarta dapat lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, tingkat ketimpangan di DKI Jakarta pada Maret 2023 justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa tantangan dalam mengatasi kesenjangan masih besar, terutama di tengah dampak yang masih dirasakan dari Pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan dan kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah strategis dengan menggunakan strategi fiskal sebagai alat utama untuk menanggapi tantangan ketimpangan, seperti memberikan subsidi pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Namun, upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal.

Perumusan kebijakan terkait ketimpangan memerlukan pemetaan yang akurat dan terukur, serta pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi Commitment to Equity (CEQ) Tools untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan yang lebih efektif. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih berdampak terhadap masalah ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan bantuan sosial pemerintah menyasar semua lapisan masyarakat yang membutuhkan, termasuk kelas pekerja umumnya yang belum mendapatkan program bantuan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan mereka. Evaluasi dan penyesuaian kebijakan juga diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut mencapai semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Capaian yang signifikan telah terjadi dalam aspek akses terhadap perumahan yang layak dan akses terhadap transportasi publik, dengan capaian melampaui target yang ditetapkan. Namun, upaya untuk menjaga warisan budaya belum mencapai target di tahun 2023 meskipun ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Selain itu, masih ada aspek lain dalam tujuan 11, meskipun beberapa indikator seperti luas ruang terbuka perkotaan telah mencapai target.

Untuk beberapa indikator, seperti persentase sisa makanan dan pengurangan merkuri, data tidak tersedia pada tahun ini karena tidak dilakukan perhitungan. Selain itu, terkait dengan pengurangan produksi limbah, data tentang jumlah timbulan sampah yang didaur ulang juga tidak tersedia. Namun, terdapat peningkatan dalam jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli lingkungan hidup pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi pencapaian masih di bawah target yang ditetapkan untuk tahun tersebut.

Kesimpulan dari pengukuran capaian tujuan 13 menunjukkan bahwa dari 6 indikator yang diukur, 5 indikator telah mencapai target yang ditetapkan, sementara 1 indikator berstatus perlu perhatian khusus. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pencapaian target terkait dengan rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana. Meskipun beberapa dokumen telah disahkan, ada beberapa dokumen lainnya yang masih dalam proses atau belum terealisasi sepenuhnya. Namun, ada kemajuan signifikan dalam adopsi dan penerapan strategi pengurangan risiko bencana oleh pemerintah daerah, serta peningkatan jumlah peserta dalam program pendidikan dan komunitas peduli lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian, 4 indikator berada dalam status tercapai. Pertama, untuk indikator jumlah luas kawasan konservasi perairan laut yakni 107.496 hektare sudah sesuai dengan target di tahun 2023. Kedua, pada indikator persentase kepatuhan pelaku usaha sudah mencapai 82 persen hal ini sudah melampaui dari target di tahun 2023. Begitu juga pada indikator ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil saat ini sudah terdapat regulasi tersebut. Kemudian pada indikator jumlah nelayan yang terlindungi sudah seluruhnya terlindungi yakni sebanyak 5.383 orang.

Tujuan 15 memiliki 1 target dan 1 indikator yang diukur capaiannya. Berdasarkan hasil pengukuran capaian, proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan) satu-satunya indikator yang diadopsi dan tidak tersedia datanya. Tujuan 15 salah satunya fokus dari sisi keanekaragaman hayati. Di Jakarta, semakin beragam struktur vegetasinya maka keanekaragaman flora dan fauna semakin tinggi. Keanekaragaman hayati diantaranya dipengaruhi oleh keragaman struktur vegetasi, keberadaan sumber air, ataupun upaya konservasi keanekaragaman hayati secara eks-stu. RTHK (Ruang Terbuka Hijau Kota) dapat diisi dengan berbagai jenis tanaman endemik/langka/dilindungi. RTHK juga menjadi habitat satwa perkotaan seperti burung.

Tujuan 16 memiliki 10 target dan 24 indikator. Berdasarkan hasil capaian selama tahun 2023 menunjukan tren yang meningkat. Sebanyak 13 indikator atau 54,16 persen telah mencapai target tahun 2023, 1 indikator atau sebesar 4,17 persen yakni indikator Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥B terpantau membaik, 1 indikator atau sebesar 4,17 persen dari total seluruh indikator, yakni Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media memerlukan perhatian khusus, dan sebanyak 9 indikator atau sebesar 37,5 persen data yang tidak tersedia dikarenakan adanya indikator baru dan perolehan data dari sumber data masih dalam proses pengumpulan.

Dalam upaya terus mendukung pembangunan berkelanjutan, komitmen Pemprov DKI Jakarta pada Tujuan 16 di tahun 2023, pada sektor keamanan, terus bekerjasama dengan aparat keamanan, yakni kepolisian dan TNI dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif menjelang pemilu. Pada sektor layanan publik, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kualitas melalui inovasi-inovasi digital dan pembukaan posko di sekitar lingkungan masyarakat untuk pencatatan registrasi kependudukan. Selanjutnya, untuk mendorong aksi anti korupsi, Pemprov DKI Jakarta juga melaksanakan berbagai sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan tindakan korupsi kepada para aparatur dan masyarakat yang bekerja sama dengan institusi KPK.

Keuangan daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2023 menunjukkan kinerja yang solid, dengan pertumbuhan pendapatan yang kuat. Capaian tersebut utamanya ditopang oleh peningkatan komponen Pajak Daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya akselerasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 telah optimal, tercermin dari capaian target pendapatan yang melebihi target. Meski demikian, kinerja ekspor non migas DKI Jakarta tercatat mengalami penurunan, dengan pertumbuhan yang melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tantangan utama yang mempengaruhi perlambatan ini adalah penurunan pada ekspor barang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang melambat dan meningkatnya tensi geopolitik terutama di jalur distribusi ekspor melalui Laut Merah. Meskipun mengalami perlambatan, peran ekspor Jakarta tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan upaya-upaya yang tepat, seperti peningkatan daya saing produk dan adaptasi terhadap dinamika global, diharapkan ekspor Jakarta dapat kembali mengalami pertumbuhan yang positif di masa mendatang.

Referensi

Antara News. (2023, October 18). *Progres pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Harmoni sudah 62 persen*. ANTARA News. Retrieved March 25, 2024, from https://www.antaranews.com/berita/3780312/progres-pembangunan-mrt-fase-2a-bundaran-hi-harmoni-sudah-62-persen

Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta Februari 2024*. Retrieved March 26, 2024, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-DKI-Jakarta-Februari-2024.aspx

Berita Jakarta. (2023, Januari 26). Berita Jakarta. Retrieved Januari 25, 2024, from https://www.beritajakarta.id/read/116157/paljaya-pam-jaya-kerja-sama-pemanfaatan-lahan-di-tb-simatupang-untuk-ipal

Berita Jakarta. (2023, August 11). *Pj Gubernur Serahkan 186 KDO Motor Listrik untuk Personel Dishub*. Beritajakarta.id. Retrieved March 25, 2024, from https://m.beritajakarta.id/read/126500/pj-gubernur-serahkan-186-kdo-motor-listrik-untuk-personel-dishub

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023, October 16). *Dinsos DKI Jakarta Verifikasi Validasi DTKS untuk Pastikan Kelayakan Penerima - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Retrieved March 25, 2024, from https://biroumum.jakarta.go.id/news_web/detailnews/dinsos-dki-jakarta-verifikasi-validasi-dtks-untuk-pastikan-kelayakan-penerima

Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2023, October 31). *Groundbreaking Pembangunan LRT Fase 1B, Pj. Gubernur Heru Harap Hasil Berkualitas dan Tepat Waktu - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Retrieved March 25, 2024, from https://biroumum.jakarta.go.id/news_web/detailnews/groundbreaking-pembangunan-lrt-fase-1b-pj-gubernur-heru-harap-hasil-berkualitas-dan-tepat-waktu

Biro Umum dan ASD Setda. (2023). *Pj. Gubernur Heru Harap Percepatan Investasi Dorong Transformasi Jakarta Kota Bisnis Skala Global*. Biro Umum dan ASD. Retrieved March 26, 2024, from https://biroumum.jakarta.go.id/news_web/detailnews/pj-gubernur-heru-harap-percepatan-investasi-dorong-transformasi-jakarta-kota-bisnis-skala-global

Biro Umum dan ASD Setda. (2023, October 16). *Dinsos DKI Jakarta Verifikasi Validasi DTKS untuk Pastikan Kelayakan Penerima - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 26, 2024, from https://biroumum.jakarta.go.id/news_web/detailnews/dinsos-dki-jakarta-verifikasi-validasi-dtks-untuk-pastikan-kelayakan-penerima

Biro Umum dan ASD Setda. (2023, October 31). *Groundbreaking Pembangunan LRT Fase 1B, Pj. Gubernur Heru Harap Hasil Berkualitas dan Tepat Waktu - Biro*

Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 26, 2024, from https:// biroumum.jakarta.go.id/ news_web/ detailnews/ groundbreaking-pembangunan-lrt-fase-1b-pj-gubernur-heru-harap-hasil-berkualitas-dan-tepat-waktu

Biro Umum dan ASD Setda. (2023, December 4). *Hadir di COP28 Local Climate Action Summit 2023, Pj. Gubernur Heru Komitmen Jakarta Turunkan Emisi Karbon - Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 26, 2024, from https://biroumum.jakarta.go.id/news_web/detailnews/hadir-di-cop28-local-climate-action-summit-2023-pj-gubernur-heru-komitmen-jakarta-turunkan-emisi-karbon

Bisnis.com. (2022). *PT MRT Jakarta Hadirkan Tiga Solar Charging Station di Kawasan TOD Dukuh Atas*. Retrieved March 25, 2024, from https://foto.bisnis.com/view/20221110/1596686/pt-mrt-jakarta-hadirkan-tiga-solar-charging-station-di-kawasan-tod-dukuh-atas

BPS. (2023). *Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved March 26, 2024, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4NiMy/persentase-usia-muda--15-24-tahun--yang-sedang-tidak-sekolah--bekerja-atau-mengikuti-pelatihan--persen-.html

BPS. (2023, March 7). *Persentase anak usia 10-17 tahun yang bekerja menurut provinsi - Tabel Statistik*. Badan Pusat Statistik. Retrieved March 26, 2024, from https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAwOCMy/persentase-anak-usia-10-17-tahun-yang-bekerja-menurut-provinsi--persen-.html

BPS. (2024). *Berita Resmi Statistik 5 Februari 2024*. Retrieved March 26, 2024, from https://jakarta.bps.go.id/backend/materi_ind/materiBrsInd-20240205120342.pdf

BPS. (2024). *Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Daerah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2021-2023*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 26, 2024, from https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html

BPS. (2024). *Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta 2021-2023*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 26, 2024, from https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/909/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-menurut-kabupaten-kota-di-dki-jakarta.html

BPS. (2024). *Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta 2021-2023*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 26, 2024, fromhttps://jakarta.bps.go.id/indicator/23/910/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Ringkasan Eksekutif Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023*. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Retrieved Januari 25, 2024, from https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/dikplh/Ringkasan_Eksekutif_DIKPLHD_Tahun2023_Rev1.pdf

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. (2023, Agustus 4). *Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023*. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Retrieved Januari 25, 2024, from https://lingkunganhidup.jakarta.go.id/files/hayati/LAporan_Final_%20Profil_%20Keanekaragaman_%20Hayati.pdf

DPPKUKM. (2023, November 19). *DKI Jakarta Gelar Harvesting Ceremony Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia*. Dinas PPKUKM. Retrieved March 26, 2024, from https://disppkukm.jakarta.go.id/berita/1311-dki-jakarta-gelar-harvesting-ceremony-gerakan-nasional-bangga-buatan-indonesia-dan-bangga-berwisata-di-indonesia

Jakarta Tourism. (2024). *Malam Muda Mudi - Jakarta Kota Global*. Jakarta Tourism. Retrieved March 26, 2024, from https://jakarta-tourism.go.id/event/malam-muda-mudi-jakarta-kota-global

Katadata. (2023). *The Fed Tahan Suku Bunga sampai September 2023, Ada Potensi Naik?* Databoks. Retrieved March 26, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/10/the-fed-tahan-suku-bunga-sampai-september-2023-ada-potensi-naik

Katadata. (2023, October 4). *Stok Berkurang, Harga Minyak Dunia Naik Sepanjang Kuartal III 2023*. Databoks. Retrieved March 26, 2024, from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/04/stok-berkurang-harga-minyak-dunia-naik-sepanjang-kuartal-iii-2023

Kementerian Hukum dan HAM RI. (n.d.). *PERPRES No. 11 Tahun 2023 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Subbidang Energi Baru Terbarukan*. PERATURAN.GO.ID. Retrieved March 25, 2024, from https://peraturan.go.id/id/perpres-no-11-tahun-2023

Kementerian Hukum dan HAM RI. (n.d.). *UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. PERATURAN.GO.ID. Retrieved March 25, 2024, from https://peraturan.go.id/id/uu-no-23-tahun-2014

Kompas.id. (2023, July 19). *Angka Kemiskinan Turun, Jakarta Didorong Sentuh Akar Masalah*. Kompas.id. Retrieved March 26, 2024, from https://www.kompas.id/baca/metro/2023/07/19/intervensi-kemiskinan-jakarta-didorong-sentuh-akar-masalah

MRT Jakarta. (2022). *MRT Jakarta Menuju 25 Persen Energi Terbarukan pada 2025*. MRT Jakarta. Retrieved March 20, 2024, from https://jakartamrt.co.id/id/info-terkini/mrt-jakarta-menuju-25-persen-energi-terbarukan-pada-2025

Perumda Paljaya. (2023, January 26). *Paljaya-PAM Jaya Kerja Sama Pemanfaatan Lahan di TB Simatupang untuk IPAL*. Perumda Paljaya. Retrieved Januari 25, 2024, from https://paljaya.com/paljaya-pam-jaya-kerja-sama-pemanfaatan-lahan-di-tb-simatupang-untuk-ipal/

Lampiran

Form 1
Sasaran Capaian Indikator TPB/SDGs

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan											
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.											
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari)	BPS Susenas Kor - Sept	%	1,37 (2021)	1,06	0,88	0,83	0,68	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.											
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS Susenas Kor	%	4,61 (September 2022)	4,13	3,79	3,25	2,91	4,44 (Mar)	↗	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
	1. Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan, terjadi deprivasi jika ada penduduk usia 12- 23 tahun yang tidak mendapatkan imunisasi dasar	BPS Susenas Kor	%	68,03 (2018)	68	71	73	76	N/A	●	Dinas Kesehatan
	2. Gizi : Prevalence of Undernourishment (tingkat kekurangan gizi), terjadi deprivasi jika ada anggota rumah tangga yang kekurangan gizi	BPS Susenas Kor	%	3,42	2,5	2,5	2,5	2,5	2,57	↗	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; Dinas Kesehatan
	3. Indikator Morbiditas: persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan	BPS Susenas Kor	%	4,31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Kesehatan
	5. Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah, terjadi deprivasi jika ada anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS Susenas Kor _ Disdik	%	9,8	0	0	0	0	N/A	●	Dinas Pendidikan
	6. Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik, terjadi deprivasi jika tanpa listrik	BPS Susenas Kor	%	0	0	0	0	0	0	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	7. Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih, terjadi deprivasi jika rumahtangga tanpa akses pada air minum bersih atau air bersih yang dapat diperoleh tidak lebih dari 30 menit jalan kaki dari rumah.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Sumber Daya Air
	8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai WC layak, terjadi deprivasi jika jika rumahtangga tidak mempunyai WC layak atau menggunakan WC bersama	BPS Susenas Kor	%	5,1	5,1	5,0	4,9	4,8	5,47	↓	Dinas Kesehatan
	9. Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah atau luas lantai per kapita kurang dari 8 m2, terjadi deprivasi jika rumah berlantai tanah, pasir atau lantai tercampur kotoran ternak atau luas lantai per kapita kurang dari 8m2.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	10. Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji 3kg, terjadi deprivasi jika memasak menggunakan elpiji 3kg	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif, terjadi deprivasi jika rumahtangga tidak mempunyai sepeda atau sepeda motor, ternak, lahan, TV, tabung gas, lemari es, emas, mobil.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	12. Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran, terjadi deprivasi jika ada anggota rumahtangga yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran.	BPS Susenas Kor	%	2,17	1,5	1,4	1,3	1,2	0,05	↑	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	14. Pekerjaan: Persentase rumah tangga dengan anggota rumah tangga bekerja, terjadi deprivasi jika tidak ada anggota rumah tangga yang bekerja atau semua anggota rumah tangga yang bekerja kurang dari 20 jam seminggu.	BPS Susenas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.											
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.	BDT dan BPJS Kesehatan	%	98,39 (2021)	98	98	98	98	98,56	↑	Dinas Kesehatan
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan (PBI); Dewan Jaminan Sosial Nasional	%	2204 (2021)	2237,56	2255,40	2273,24	2291,08	2334,31	↑	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan									
	Formal		%	112,04 (2021)	112,04	112,04	112,04	112,04	168,92	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Informal		%	20,25 (2021)	30,43	32,51	34,73	37,11	66,66	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru,											
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
	1. Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum	BPS Susenas Kor	%	N/A	99,86	99,86	99,86	99,86	99,42	↗	Dinas Sumber Daya Air
	2. Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi	BPS Susenas Kor	%	95,1	95,19	95,96	96,73	97,51	93,5	↓	Dinas Kesehatan
	4. Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas kesehatan Dasar	BPS Susenas Kor	%	79,5	79,64	80,19	80,64	81,19	N/A	●	Dinas Kesehatan
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.										
	1. Proporsi rumahtangga dengan Rumah milik	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	48,48	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2. Proporsi rumahtangga dengan Rumah Sewa/Kontrak	BPS: SP dan Susenas; SDKI	%	34,62	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.											

1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BNPB DIBI; (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1. Jumlah korban meninggal	BNPB DIBI; (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0	97	↓	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Jumlah korban hilang	BNPB DIBI; (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Jumlah korban terkena dampak bencana	BNPB DIBI; (Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana)	per 100.000 jiwa	N/A	0	0	0	0	10.467	↓	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap PDRB	BNPB (Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	%	5,06 (2021)	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030										
	1. Rencana	BNPB	Dokumen	2	5	5	3	1	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Implementasi	BNPB (Direktorat Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana)	Dokumen	2	5	5	3	1	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana	BNPB dan Bappenas	%	100	100	100	100	100	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan											
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.											
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS	%	3,42	2,5	2,5	2,5	2,5	2,57	↗	Dinas Kesehatan
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (FIES)	BPS	%	3,77	3,77	3,67	3,57	3,47	3,36	↑	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.											
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendekan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	SSGI	%	14,8	13,7	13,2	12,7	12,2	17,6	↓	Dinas Kesehatan
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe	SSGI	%	6,9	5,8	4,7	3,6	2,5	N/A	●	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).	Badan Pangan Nasional - Bapanas dan BPS	Skor 1-100	89,9 (2019)	90	90	90,5	91	92,7	↑	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.	Riskesdas	%	6,12	6,0	5,5	5	4,5	5,4	↑	Dinas Kesehatan
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya,											
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	22,15 / Rp 105.385	23,43	24,75	26,11	27,47	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2.3.1.(a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.	BPS	Rp. juta/tenaga kerja	72,45	74,43	76,42	78,41	80,41	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor.	Biro Perencanaan, Kementan	USD PPP	498,77 / Rp 2.373.501	521,89	545,02	568,15	591,27	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap											
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.	Komnas Plasma Nuffah/BB Biogen, Balitbangtan, Kementan	Jumlah aksesi SDG tanaman	148 (2019)	148	149	150	151	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; BPTP/BRIN
Target 2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara											
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	Bappenas/ Kemenkeu	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.											
2.c.1*	Indikator anomali harga pangan.	BPS	Nilai	-0,32	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Tujuan 3
Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera											
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.											
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI) / Jumlah Kasus Kematian Ibu	Sensus Penduduk (SP); Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS)	Kematian per 100.000 Kelahiran Hidup	76,49	76	74	72	70	43,56	↑	Dinas Kesehatan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Susenas	%	86,69 (2022)	97,27	98,77	98,80	98,84	98,15	↑	Dinas Kesehatan
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.											
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Perhitungan data program Dinkes	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	1,64	1,62	1,61	1,60	1,59	3,11	↓	Dinas Kesehatan
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Perhitungan data program Dinkes	Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	1,33	1,31	1,30	1,29	1,28	2,6	↓	Dinas Kesehatan
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.											
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	6	6	6	6	6	6	↑	Dinas Kesehatan
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.	Kementerian Kesehatan: Laporan Program Subdit Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan (Riskesdas)	%	0,48 (2018)	1	0,8	0,6	0,5	1,263	↓	Dinas Kesehatan
3.3.5.(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Kusta.	Laporan tahunan Ditjen P2P (Kemenkes)	Kab/Kota	5	5	5	5	5	5	↑	Dinas Kesehatan
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.											
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	8.39 (2018)	8,8	8,7	8,6	8,5	N/A	●	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	33,43 (2018)	33,43	33,43	33,43	33,43	N/A	●	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)	%	29,78 (2018)	29,8	29,3	28,7	28,0	N/A	●	Dinas Kesehatan
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.											
3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis	Laporan Tahunan P2MKJN, Ditjen P2P	Orang	1169	1227	1285	1343	1401	296	↓	Dinas Kesehatan
		BNN Provinsi DKI Jakarta	Orang	250	200	250	300	350	N/A	●	Dinas Kesehatan
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.											
3.7.1*	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR)	SDKI (BPS dan BKKBN)	%	57,66	58,33	58,99	59,66	60,32	60,2	↑	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	SDKI (BPS dan BKKBN)	%	14,8	14,3	13,8	13,3	12,8	11,7	↑	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
3.7.2*	Angka kelahiran remaja umur 15- 19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	SDKI dalam laporan tahunan BKKBN	Kelahiran per 1000 perempuan usia 15-19 tahun	21,85	21,35	20,85	20,35	19,85	5,4	↑	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
3.7.2.(a)	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR)/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	SDKI (BPS dan BKKBN)	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,26 (2017)	2,25	2,23	2,22	2,21	1,84	↑	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.											
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Kementerian Kesehatan- Profil kesehatan; BPJS Kesehatan	%	98,39	98	98	98	98	98,56	↑	Dinas Kesehatan
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang											
3.b.1*	Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan	Kementerian Kesehatan: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).	%	62,77	65	68	71	74	65,76	↑	Dinas Kesehatan
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.	Kementerian Kesehatan: Laporan rutin Farmalkes	%	99,69	100	100	100	100	100	↑	Dinas Kesehatan
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.											
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan										
	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	86	90	93	95	100	100	↑	Dinas Kesehatan
	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	Laporan tahunan BPPSDM (Kemenkes)	%	97	97	97	100	100	100	↑	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas											
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.											
4.1.1(a)	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:										
	(i) membaca	AKM	%	85,53	86,2	87,56	88,56	89,56	90,21	↑	Dinas Pendidikan
	(ii) matematika	AKM	%	67,84	69,05	72,4	74,5	77,1	79,8	↑	Dinas Pendidikan
	Proporsi anak-anak dan remaja: (b) di kelas 8 yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:										
	(i) membaca	AKM	%	85,29	86,2	87,4	88,5	89,3	88,7	↑	Dinas Pendidikan
	(ii) matematika	AKM	%	64,61	45,7	47,9	49,4	51,2	84,16	↑	Dinas Pendidikan
	Proporsi anak-anak dan remaja: (c) di usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam:										
	(i) membaca	AKM	%	77,89	79,44	81,8	83,2	85,5	87,18	↑	Dinas Pendidikan
	(ii) matematika	AKM	%	65,88	69,4	71,7	74,6	77,9	80,25	↑	Dinas Pendidikan
	(iii) sains	PISA	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat										
	(a) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SD/sederajat	BPS RKP 2021	%	98,58	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
	(b) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan SMP/sederajat	BPS RKP 2021	%	95,4	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
	(c) Persentase siswa yang menyelesaikan pendidikan jenjang SMA/sederajat	BPS RKP 2021	%	87,71	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
4.1.2.(a)	Angka anak tidak sekolah jenjang:										
	SD/sederajat	Susenas, BPS	%	0,47	0	0	0	0	N/A	●	Dinas Pendidikan
	SMP/sederajat	Susenas, BPS	%	4,6	0	0	0	0	5,54	↓	Dinas Pendidikan
	SMA/sederajat	Susenas, BPS	%	16,4	0	0	0	0	12,06	↗	Dinas Pendidikan
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.											
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin	Riskesdas	%	89,44 (2018)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin	Susenas, BPS	%	89,09	100	100	100	100	83,93	↓	Dinas Pendidikan
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.											
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
	(1) usia 15-24 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	47,21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(2) usia 15-59 tahun	Susenas MSBP, BPS	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	Susenas Kor	%	39,56	39,86	40,16	40,46	40,76	40,05	↑	Dinas Pendidikan
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.											
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
	(1) usia 15-24 tahun	Susesnas Kor	%	97,37	100	100	100	100	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(2) usia 15-59 tahun	Susesnas Kor	%	92,36	91,99	92,09	92,19	92,29	N/A	●	Dinas Pendidikan
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.											
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas										
	(i.a) Rasio APM-SD Perempuan/Laki-laki	Susesnas Kor	%	98,37	100	100	100	100	99,32	↓	Dinas Pendidikan
	(i.c) Rasio APM-SD Kuintil Terendah/ Kuintil Tertinggi	Susesnas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(i.d) Rasio APM-SD Disabilitas / Tanpa Disabilitas	Susesnas Kor / Disdik(Raport Pendidikan- Kemendikbudristek)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(ii) Rasio APK Perempuan / Laki-laki pada tingkat:										
	SMP/Sederajat	Susesnas Kor	%	93,5	100	100	100	100	95,78	↗	Dinas Pendidikan
	SMA/SMK/ Sederajat	Susesnas Kor	%	76,91	100	100	100	100	77,4	↗	Dinas Pendidikan
	(ii) Rasio APK Kuintil Terendah / Kuintil Tertinggi pada tingkat:										
	SMP/Sederajat	Susesnas Kor	%	98,8	100	100	100	100	N/A	●	Dinas Pendidikan

	SMA/SMK/Sederajat	Susesnas Kor	%	80,3	100	100	100	100	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(ii) Rasio APK Disabilitas/Tanpa Disabilitas pada tingkat:										
	SMP/Sederajat	Susesnas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
	SMA/SMK/ Sederajat	Susesnas Kor	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pendidikan
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.											
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Susesnas Kor	%	99,77	99,78	99,79	99,80	99,81	99,91	↑	Dinas Pendidikan
Target 4.a. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.											
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)										
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik										
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
	(4) PLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Pendidikan
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (b) internet untuk tujuan pengajaran										
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	99,4	100	100	100	100	96,82	↓	Dinas Pendidikan
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	98,7	100	100	100	100	95,53	↓	Dinas Pendidikan
	(3) SMA	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	99,5	100	100	100	100	95,58	↓	Dinas Pendidikan
	(4) SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	99,3	100	100	100	100	96,62	↓	Dinas Pendidikan
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (c) komputer untuk tujuan pengajaran										
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	41,6	45	50	55	60	92,56	↑	Dinas Pendidikan
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	88,7	90	92	94	96	97,39	↑	Dinas Pendidikan
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	59,39	63	67	70	73	97,46	↑	Dinas Pendidikan
	(4) PLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	36,3	40	45	50	55	78,65	↑	Dinas Pendidikan
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (d) air minum layak										
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	74,9	79	84	89	92	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	78,1	83	85	87	90	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	78,5	82	85	88	90	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(4) PLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	65,9	67	69	71	73	N/A	●	Dinas Pendidikan
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin										
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	65,32	68	71	74	76	73,7	↑	Dinas Pendidikan
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	68,05	71	73	75	77	76,93	↑	Dinas Pendidikan
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	66	68	70	72	74	73,3	↑	Dinas Pendidikan
	(4) PLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	50	53	56	59	62	41,57	↓	Dinas Pendidikan
	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)										
	(1) SD	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	86,8	89	92	93	94	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(2) SMP	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	86,3	89	92	93	94	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(3) SMA dan SMK	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	86,1	89	92	93	94	N/A	●	Dinas Pendidikan
	(4) PLB	Dapodik, PDSP Kemdikbud	%	84,4	87	89	90	91	N/A	●	Dinas Pendidikan
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Kemdikbud, OECD (PISA)	%	9,85	0	0	0	0	N/A	●	Dinas Pendidikan
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.											
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan										
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memiliki sertifikat pendidik										
	(i) TK/RA/BA	Dapodik (Kemdikbud)	%	7,27	10,3	14,2	17,5	20,1	16,88	↑	Dinas Pendidikan
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	38,15	40,5	43,2	47,5	50,2	39,54	↗	Dinas Pendidikan
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	46,29	49,2	52,6	55,7	58,8	47,79	↗	Dinas Pendidikan
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	41,5	43,4	47,9	50,2	53,4	47,5	↑	Dinas Pendidikan
	(v) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	35,11	39,5	43,5	47,9	50,3	38,99	↗	Dinas Pendidikan
4.c.1	(vi) PLB		%	44,02	47,5	49,8	50,5	21,2	44,02	↓	Dinas Pendidikan
	Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan										
	(i) TK/RA/BA	Dapodik (Kemdikbud)	%	72,81	73,4	74,6	75,9	77	54,18	↓	Dinas Pendidikan
	(ii) SD	Dapodik (Kemdikbud)	%	96,5	97,1	97,6	98,1	98,5	93,46	↓	Dinas Pendidikan
	(iii) SMP	Dapodik (Kemdikbud)	%	97,8	98,2	98,7	99,2	99,7	95,72	↓	Dinas Pendidikan
	(iv) SMA	Dapodik (Kemdikbud)	%	98,7	99	99,3	99,5	99,7	96,75	↓	Dinas Pendidikan
	(v) SMK	Dapodik (Kemdikbud)	%	96,5	96,8	97,1	97,4	97,7	94,26	↓	Dinas Pendidikan
	(vi) PLB		%	90,89	91,1	91,9	92,5	93	90,89	↓	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender											
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.											
5.3.1	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.	Susenas Kor (BPS)	%	4,68 (2021)	4,32	3,96	3,6	3,24	2,12	↑	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.											
5.5.1	(b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)										
	DPRD Provinsi	KPU	%	21,69 (2019)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.5.2*	(a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan										
	Gubernur dan Wakil Gubernur	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota	Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah Kemendagri (diolah Bappenas)	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Eselon I	BKD	%	0	N/A	N/A	N/A	N/A	27,08	↗	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	Eselon II	BKD	%	23,95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	(b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan publik atau swasta	Sakernas BPS	%	33,15 (2021)	37,21	37,31	37,81	37,91	33,15	↓	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi											
5.6.1*	(1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	%	24,43 (2017)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	(2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus kawin yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (hanya Pasangan Usia Subur/PUS)	SDKI (BKKBN dan BPS)	%	39,15 (2017)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	Kemen PPPA Kemenkumham BKKBN Kemenkes Kemendikbud	Dokumen	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.											
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian;	SITASI (BPS)	%								Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	Laki-laki			21,88	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	Perempuan			3,54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	(2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.	SITASI (BPS)	%	11,47	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.											
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Susenas Kor (BPS)	%	67,83 (2021)	68,83	69,83	70,83	71,83	82,47	↑	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Laki-laki		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Perempuan		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan 6
Air Bersih dan Sanitasi yang Layak

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 6 - Air Bersih dan Sanitasi yang layak											
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.											
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Susenas BPS	Persen	65,41	65,97	70,03	81,95	89,02	66,73	↑	Dinas Sumber Daya Air
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan											
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun										
	a. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Susenas BPS	Persen	79,13	80,37	82,45	84,53	86,60	N/A	●	Dinas Kesehatan
	b. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Susenas BPS	Persen	92,79	95,62	97,16	97,82	98,53	93,5	↗	Dinas Sumber Daya Air
	c. Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka	Susenas BPS	Persen	0,59	0,13	0,12	0,11	0,1	0,13	↑	Dinas Kesehatan
	d. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T		Persen	21,40	23,09	25,25	26,59	28,01	23,1	↑	Dinas Sumber Daya Air
	e. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan lumpur tinja		Persen	3,14	3,15	3,16	3,17	3,18	3,06	↓	Dinas Sumber Daya Air
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau											
6.6.1*	Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu: Indeks Kualitas Lahan	KLHK	Indeks	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	27,17	↑	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau											
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN; DTKTE; BPS	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM; BPS	kWh	3.237	3.406	3.508	3.614	3.722	3.432	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	95,59	100	100	100	100	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau											
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.											
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	PLN; DTKTE; BPS	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM; BPS	kWh	3.237	3.406	3.508	3.614	3.722	3.432	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	%	95.59	100	100	100	100	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

Tujuan 8
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi											
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang											
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	%	4,55	4,45	4,68	4,72	4,76	5,04	↑	Biro Perekonomian dan Keuangan
8.1.1.(a)	PDRB per kapita	BPS; Bappenas	Rupiah	298.359.970	317.259.570	340.745.062	364.981.610	390.516.366	322620000	↑	Biro Perekonomian dan Keuangan
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.											
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	2,27	2,14	2,31	2,67	2,68	0,88	↓	Biro Perekonomian dan Keuangan
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.											
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	%	36,82	39,30	39,82	40,36	40,90	36,23	↓	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Laki-Laki		%	N/A	36,70	37,19	37,69	38,20	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Perempuan		%	N/A	43,48	44,06	44,65	45,25	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Pertanian		%	N/A	53,95	54,68	55,41	56,16	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Manufaktur		%	N/A	24,70	25,03	25,37	25,71	NA	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Jasa-Jasa		%	N/A	42,14	42,71	43,28	43,86	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.											
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah/jam	32.685	33.743	35.219	36.606	37.906	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	%	7,18	7,00	7,07	6,54	6,12	6,53	↓	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Laki-Laki		%	7,50	7,40	7,43	6,81	6,39	7,76	↓	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Perempuan		%	6,65	6,50	6,60	6,23	5,78	4,55	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Usia 15-24		%	27,57	28,03	28,77	29,41	29,98	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Usia 25+		%	3,75	5,65	5,76	5,85	5,94	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8.5.2.(a)*	Persentase setengah pengangguran	BPS	%	2,71	2,42	2,36	2,31	2,26	2,96	↓	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.											
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	%	17,19	17,09	17,00	16,86	16,69	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala											
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	0,61	0,80	1,10	1,08	1,03	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Laki-Laki		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Perempuan		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Usia 10-24		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Usia 13-14		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Usia 15-17		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.											
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	BPS	Orang	56.008.041	56.000.000	60.000.000	64.284.000	68.873.878	32.391.067	↓	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.											
8.10.1*	Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia; Kemendagri	Unit	191	183	180	177	174	N/A	●	Biro Perekonomian dan Keuangan
8.10.2*	Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa	Bank Indonesia	Unit	6	5	5	5	5	N/A	●	Biro Perekonomian dan Keuangan

Tujuan 9
Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur											
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.											
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.	1. Kementerian Perhubungan; 2. BPS									
	Jumlah Penumpang:										
	i. kendaraan penumpang (berbasis jalan)		Orang	989.862.480	955.934.635	1.080.852.168	1.119.774.375	1.180.864.790	1.126.868.455	↑	Dinas Perhubungan
	ii. kereta api (berbasis rel)		Orang	331.114.860	319.713.720	372.320.454	394.353.665	419.078.035	370.908.535	↑	Dinas Perhubungan
	iii. pesawat		Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perhubungan
	iv. kapal		Orang	1.070.545	805.920	870.348	934.765	1.006.670	1.350.865	↑	Dinas Perhubungan
	Jumlah Barang:										
	i. kereta api		Kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perhubungan
	ii. pesawat		Kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perhubungan
	iii. kapal		Kg	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perhubungan
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	1. Kementerian Perhubungan; 2. BPS; 3. PT. Angkasa Pura	Bandara	1	1	1	1	1	1	↑	Dinas Perhubungan
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan	Kementerian Perhubungan	Unit	1	5	7	9	11	N/A	●	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Kementerian Perhubungan	Unit	1	1	1	1	1	1	↑	Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.											
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	BPS	%	11,72	11,79	12,05	12,49	13,03	N/A	●	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	BPS	%	5,95	6,50	7,00	7,50	8,00	N/A	●	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan 10
Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan											
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.											
10.1.1*	Rasio Gini	BPS	Nilai	0,412 (Sep)	0,411	0,410	0,410	0,409	0,431 (Mar)	↓	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	BPS	%	4,61	4,13	3,79	3,25	2,91	4,44 (Mar)	↗	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.											
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).	%	0,75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Laki-Laki		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Perempuan		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Penyandang difabilitas		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.											
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan: Laporan Data Pengaduan.	Aduan	30	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Biro Hukum
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kasus	687	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan	Kebijakan/ Dokumen	0	0	0	0	0	N/A	●	Biro Hukum
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.											
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan BPS	%								Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Formal			N/A	100	112,04	112,04	112,04	168,92	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
	Informal			N/A	30,43	32,51	34,73	37,11	66,66	↑	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan											
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh											
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS Susenas	%	40,21 (2021)	40,36	40,41	40,53	40,9	38,80	↓	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam											
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapat akses yang nyaman pada transportasi publik	BPS Susenas	%	N/A	88,0	90,3	92,6	95,0	88,8	↑	Dinas Perhubungan
11.2.1. (b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum	BPS Susenas; Kementerian Perhubungan	%	18,45	18,78	20,97	21,87	23,01	18,86	↑	Dinas Perhubungan
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.											
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)	Dinas Kebudayaan	Miliar Rupiah	114,64	351,06	385,92	402,43	446,14	229,86	↗	Dinas Kebudayaan
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan											
11.5.1*	1. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	2. Jumlah korban hilang akibat terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Jumlah korban terluka akibat terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4. Jumlah korban mengungsi akibat terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang	BNPB (DIBI)	Per 100.000 orang	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	BNPB	Rasio	N/A	0	0	0	0	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.											
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	99,00	99	99	100	100	99,61	↑	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10	Dinas Lingkungan Hidup	ugram/m3	58,47	58,42	58,37	58,32	58,27	59,24	↓	Dinas Lingkungan Hidup
*	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 2.5	Dinas Lingkungan Hidup	ugram/m3	37,71	37,70	36,69	36,68	36,67	36,64	↑	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.2.(b)	Indeks kualitas udara	Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	66,52	67,02	67,52	68,02	68,52	68,46	↑	Dinas Lingkungan Hidup
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas											
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	KLHK, KemenPUPR	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Hektare	1.409	1.421	1.433	1.445	1.457	1641,73	↑	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.											
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS	Dinas Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan											
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	100	100	100	N/A	●	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memfaatkan bahan lokal.											
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan,Berketahanan menggunakan Material Lokal	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	↑	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab											
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen											
12.3.1.(a)	Persentase Sisa makanan	Dinas Lingkungan Hidup	%	49,87	NA	NA	NA	NA	N/A	●	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak											
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari *baseline* 50 ton penggunaan merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	%								
	Persentase pengurangan emisi merkuri dan lepasan merkuri	Dinas Lingkungan Hidup	%	0 (25,5 kg)	NA	2 (0,5 kg)	7 (1,8 kg)	13 (3,3 kg)	NA	●	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase penghapusan alat kesehatan bermerkuri	Dinas Kesehatan	%	0	25	50	100	NA	NA	●	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali											
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	%	NA	NA	NA	NA	NA	N/A	●	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah pengurangan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	%	26,1	27	28	30	30	27,12	↑	Dinas Lingkungan Hidup
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.											
12.8.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	Dinas Pendidikan	Unit	573	673	773	873	973	613	↗	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 13 - Penanganan Perubahan Iklim											
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara											
13.1.2 *	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030	BPBD	Dokumen	2	5	5	3	1	2	↓	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional	BPBD	%	100	100	100	100	100	100	↑	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional											
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications	Dinas Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	1	1	1	↑	Dinas Lingkungan Hidup
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Dinas Lingkungan Hidup	MTon CO2e	63,732	68,267	70,632	73,111	73,436	63,074	↓	Dinas Lingkungan Hidup
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dinas Lingkungan Hidup	%	17,90	19,30	20,00	20,50	22,30	25,4	↑	Dinas Lingkungan Hidup
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim											
13.3.1.(a)	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
	i. Jumlah peserta Sekolah Adiwiyata	KLHK	Peserta	75	150	225	300	375	192	↑	Dinas Lingkungan Hidup
	ii. Jumlah kampung iklim	KLHK	Lokasi	170	185	200	215	230	197	↑	Dinas Lingkungan Hidup
	iii. Jumlah peserta Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	BPBD	Peserta	12.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1000	↑	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	iv. Jumlah peserta yang ditingkatkan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana	BPBD	Peserta	5.760	1.600	1.600	1.600	1.600	2000	↑	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 14 - Ekosistem Lautan											
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.											
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut	DKPKP	Hektare	107.496	107.496	107.496	107.496	108.579	107.496	↑	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui											
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DKPKP	%	70,93	71	72	73	74	82	↑	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar											
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil	DKPKP	Dokumen kebijakan, regulasi, pedoman/ dokumen teknis lainnya pada tingkat nasional	ada	ada	ada	ada	ada	ada	↑	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	DKPKP	Nelayan	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	5.383	↑	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 15 - Ekosistem Daratan											
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.											
15.1.1*	Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (% tutupan lahan berhutan)	KLHK	%	1,7 (2021)	1,7	1,7	1,7	1,7	N/A	●	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

Tujuan 16
Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh											
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.											
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Biro Pengendalian Operasi, Polri	Orang	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,046	↑	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Statistik Kriminal, BPS	Persentase	N/A	N/A	NA	NA	NA	N/A	●	Satuan Polisi Pamong Praja
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.											
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja - SNPHAR)	Persentase	Indikator baru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selaku Sektretariat Gugus Tugas Tindak Pidana Perda- gangan Orang (TPPO)	Persentase	Indikator baru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.											
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS	Persentase	787 (kasus)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	%	749 Orang	472 orang	583 orang	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.											
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi, BPS	Indeks	73,3	70	75	80	85	76,96	↑	Inspektorat
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.											
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui	Kementerian Keuangan	%	75,11 (2020)	77,87	80,99	81,83	83,71	92,55	↑	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(a)	Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	↑	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	%	80,51 (A)	82,00 (A)	84,00 (A)	87,00 (A)	90,50 (AA)	81,06 (A)	↗	Biro ORB
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	%	78,98	82,00	83,00	84,00	85,00	82,47 (A-)	↑	Biro ORB
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.	Ombudsman	%	81,86	82,00	82,30	82,50	82,70	89,06	↑	Biro ORB
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan											
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Laporan Badan Kepegawaian Daerah	%	26,19	21,43	21,43	21,43	21,43	26,5	↑	Badan Kepegawaian Daerah
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	73,12	73,10	73,00	73,25	73,50	N/A	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	87,39	87,30	87,25	87,50	87,75	N/A	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7.2.(c)	Indeks Kesetaraan	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan didukung oleh Badan Pusat Statistik (Indeks Demokrasi Indonesia - IDI)	Indeks	85,34	85,40	85,50	85,75	86,00	N/A	●	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.											
16.8.1.(a)	Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional	Biro Kerja Sama Daerah	Jumlah lembaga/forum/program kerja sama	N/A	5	6	7	8	5	↑	Biro Kerja Sama Daerah
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.											
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,59	98,5	98,6	98,7	98,8	99,99	↑	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	98,5	98,6	98,7	98,8	99,99	↑	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.											
16.10.1.(a)	Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media	Survei Indeks Kemerdekaan Pers, Dewan Pers	Indeks	79,42	N/A	N/A	N/A	N/A	71,73	↓	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Jumlah	687	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif	Komisi Informasi	Jumlah	1 BP	20 BP	25 BP	30 BP	35 BP	33 BP	↑	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.	Komisi Informasi	%	27 (Kasus)	N/A	N/A	N/A	N/A	32 Registrasi	↗	Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.											
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kebijakan/ dokumen	0	0	0	0	0	0	↑	Biro Hukum

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (2022)	Target Pencapaian				Realisasi Pencapaian	Status Pencapaian	OPD Kunci
					2023	2024	2025	2026	2023		
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan											
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.											
17.1.1*	Pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya										
	Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPKD	Miliar Rupiah	45.608,38	52.773,52	51.946,86	54.297,37	57.364,22	49.139,93	↗	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	i. Jumlah penerimaan pajak daerah	BPKD	Miliar Rupiah	40.275,14	43.600,00	45.890,26	47.895,88	50.443,01	43.517,64	↗	Badan Pendapatan Daerah
	ii. Jumlah penerimaan retribusi daerah	BPKD	Miliar Rupiah	376,97	600,00	483,03	507,19	532,55	454,69	↗	Badan Pendapatan Daerah
	iii. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	BPKD	Miliar Rupiah	402,42	542,50	623,00	774,00	957,00	545,87	↑	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	iv. Lain-lain PAD yang Sah	BPKD	Miliar Rupiah	4.553,85	8.031,02	4.950,57	5.120,30	5.431,66	4.621,72	↗	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	vi. Proporsi PAD terhadap PDRB	BPKD	%	1,43	1,53	1,39	1,35	1,32	1,43	↓	Badan Pengelola Keuangan Daerah
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	Bapenda	%	1,26	1,26	1,23	1,19	1,16	1,26	↑	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2*	Proporsi Anggaran Domestik Daerah yang didanai oleh PAD	BPKD	%	70,84	71,07	73,50	74,27	74,62	73,99	↑	Badan Pengelola Keuangan Daerah
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.											
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS	%	2,03	2,81	3,01	3,16	3,28	-4	↓	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.											
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPDBU (Daftar Rencana KPDBU/DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	Bappeda	Dokumen	N/A	1	1	1	1	1	↑	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).	Bappeda	Proyek	N/A	N/A	1	1	1	1	↑	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPDBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.	Bappeda	Nilai investasi (Rp Milyar)	N/A	>500	>500	>500	>500	>500	↑	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.											
17.19.2.(a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	BPS	Sensus Penduduk (Terlaksana/ Tidak)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	●	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
17.19.2 (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Kemendagri	Data Registrasi	N/A	1	1	1	1	1	↑	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lampiran

Form 2b
Program/Kegiatan
Pemerintah Daerah

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 1 - Tanpa Kemiskinan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar amerika per hari.													
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari)													
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	Rp876.035.640.000	Rp864.573.800.000	APBD	Jakarta	DINSOS
	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	Jakarta	
7.02.02.6.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi													
7.02.02.6.03	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp19.695.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp1.620.000	Rp1.620.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Barat
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp13.000.000	Rp13.000.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2			APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp12.340.000	Rp12.340.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp5.040.000	Rp5.040.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.07.04.1.01	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	Jakarta	DTKTE
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.													
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													
2.14.04.2.01	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	Rp296.430.000	Rp263.130.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	Rp876.035.640.000	Rp864.573.800.000	APBD	Jakarta	DINSOS
	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	Jakarta	
7.02.02.6.03 Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.02.02.6.03	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp19.695.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp1.620.000	Rp1.620.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Barat
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp12.340.000	Rp12.340.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Timur
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp5.040.000	Rp5.040.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Utara
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp13.000.000	Rp13.000.000	APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Selatan
	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2			APBD	Jakarta	Kota Administrasi Jakarta Pusat
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan													
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	2	1	Rp18.902.783.078	Rp3.723.762.118	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.2.04	1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	0	0	0	Rp5.185.866.334	Rp4.557.758.695	APBD	Jakarta	Disdik
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.07.04.1.01	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	Jakarta	DTKTE
2.17.07.1.01													
2.17.07.1.01	2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	Rp41.345.762.453	Rp40.582.253.922	APBD	Jakarta	DPPKUKM
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
2.09.03.1.01	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	4	4	4	4	Rp1.051.363.869.070	Rp1.046.105.737.427	APBD	Jakarta	DKPKP
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan													
5.05.02.1.02	5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	0	1	0			APBD	Jakarta	Bappeda
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.													
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.02.1.01	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB													
2.14.03.2.04	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	Rp876.035.640.000	Rp864.573.800.000	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	Disdik
	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	Rp10.914.670.965	Rp7.555.953.360	APBD	Jakarta	
	1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	Rp231.874.584	Rp210.399.800	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	Rp806.232.264.808	Rp787.197.118.382	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													
1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	Disdik
	1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	
	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	Rp7.482.317.290	Rp3.126.068.477	APBD	Jakarta	
	1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	Rp7.478.503.423	Rp7.310.758.080	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1051	1051	1051	1051			APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar													
1.01.02.2.01	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	Rp381.382.156.438	Rp110.777.198.958	APBD	Jakarta	Disdik
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	Rp44.764.516.349	Rp19.488.396.823	APBD	Jakarta	
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	Rp1.045.928.850.000	Rp1.007.609.200.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama													
	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	Rp28.093.127.595	Rp6.081.358.230	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.2.02	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	Rp10.230.621.421	Rp9.014.974.516	APBD	Jakarta	Disdik
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	Rp817.231.350.000	Rp813.717.130.000	APBD	Jakarta	
2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
2.07.04.1.01	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	Jakarta	DTKTE
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.02	1.02.02.1.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	4	4	4	4	Rp26.010.000	Rp26.010.000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.02	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	Rp35.152.565.952	Rp28.614.889.008	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	879045	896626	914559	932850	Rp1.988.187.280	Rp1.663.675.536	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	295296	301202	307226	313371	Rp2.590.252.049	Rp2.079.477.058	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	18261	18615	18989	19168	Rp434.814.940	Rp419.008.499	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	107032	107974	108924	109883	Rp991.866.840	Rp853.331.200	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi													
	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.03.1.02	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.													
1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok anak berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja,													
1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi													
1.06.05.1.02	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	Rp876.035.640.000	Rp864.573.800.000	APBD	Jakarta	DINSOS
	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	Jakarta	
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial													
1.06.04.2.01	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1591	1586	1596	1606	Rp17.653.503.681	Rp17.362.194.275	APBD	Jakarta	Dinsos
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas													
1.01.02.1.01	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	Rp806.232.264.808	Rp787.197.118.382	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.02	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	Rp928.440.683.500	Rp917.538.034.200	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus													
1.01.02.1.03	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1051	1051	1051	1051			APBD	Jakarta	Disdik
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.													
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02.2.01	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	**1.02.02.1.02.16**	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	Rp2.135.837.549.200	Rp2.132.548.987.475	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD													
1.02.01.1.10	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.09.03.1.01	2.09.03.1.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	4	4	4	4	Rp1.051.363.869.070	Rp1.046.105.737.427	APBD	Jakarta	DKPKP
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.													
2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)													
2.07.05.1.03	2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	200	200	200	200	Rp48.720.000	Rp48.720.000	APBD	Jakarta	DTKTE
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas													
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.													
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1.04.02.1.01	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2			APBD	Jakarta	DPRKP
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	Jakarta	DPRKP
	1.04.02.1.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	7495	7445	7472	8935	Rp194.997.421.911	Rp186.942.693.367	APBD	Jakarta	DPRKP

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi	3	1	1	3			APBD	Jakarta	DPRKP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.01	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi													
1.02.02.1.02	**1.02.02.1.02.08**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	Rp523.759.220	Rp476.843.757	APBD	Jakarta	Dinkes
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.02.1.01	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.311.331.515	Rp349.816.780	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	Rp513.999.976	Rp200.282.400	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6.4	7.5	7.5	7.5	Rp13.296.590.166	Rp12.395.986.130	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	Rp23.623.758.355	Rp10.117.348.571	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.05.1.01	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	Rp5.812.255.768	Rp5.078.677.541	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	Rp303.955.999.663	Rp249.073.000.280	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	Rp1.999.989.320	Rp1.463.750.000	APBD	Jakarta	DSDA
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi													
3.29.02.1.01	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp399.999.786	Rp397.990.500	APBD	Jakarta	DSDA
	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp15.741.797.818	Rp14.434.039.420	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	Rp1.910.000.200	Rp1.676.893.278	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1106	1900	2727	3361	Rp26.809.619.864	Rp21.154.960.364	APBD	Jakarta	DSDA

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	Rp14.453.550.136	Rp8.969.376.834	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	Rp32.462.397.041	Rp29.527.713.948	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	Rp5.180.413.529	Rp3.252.902.500	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	Rp88.020.907.998	Rp61.204.550.000	APBD	Jakarta	DSDA
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.													
1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1.04.02.1.01	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2			APBD	Jakarta	DPRKP
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi													
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	Jakarta	DPRKP
	1.04.02.1.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	7495	7445	7472	8935	Rp194.997.421.911	Rp186.942.693.367	APBD	Jakarta	DPRKP

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi	3	1	1	3			APBD	Jakarta	DPRKP
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus													
1.04.02.2.05	1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	395	382	3400	3786			APBD	Jakarta	DPRKP
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan													
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.													
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	Rp490.900.000	Rp448.610.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	Rp11.536.582.477	Rp6.353.573.822	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	Rp12.331.012.113	Rp11.471.919.609	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana													
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	Rp1.608.900.000	Rp1.600.417.000	APBD	Jakarta	BPBD
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	Jakarta	BPBD
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	Rp490.900.000	Rp448.610.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	Jakarta	BPBD
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030													
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													
2.08.03.1.03	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	Rp490.900.000	Rp448.610.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	Rp11.536.582.477	Rp6.353.573.822	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	Rp12.331.012.113	Rp11.471.919.609	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	Jakarta	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.06.2.02	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	Jakarta	BPBD
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.02.1.01	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	1	1	1	Rp421.850.000	Rp370.500.000	APBD	Jakarta	Diskominfotik
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.02.1.01	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.311.331.515	Rp349.816.780	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	Rp513.999.976	Rp200.282.400	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6.4	7.5	7.5	7.5	Rp13.296.590.166	Rp12.395.986.130	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	Rp23.623.758.355	Rp10.117.348.571	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
1.03.05.1.01	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	Rp5.812.255.768	Rp5.078.677.541	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	Rp303.955.999.663	Rp249.073.000.280	APBD	Jakarta	DSDA

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	Rp1.999.989.320	Rp1.463.750.000	APBD	Jakarta	DSDA
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi													
3.29.02.1.01	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp399.999.786	Rp397.990.500	APBD	Jakarta	DSDA
	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp15.741.797.818	Rp14.434.039.420	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													
1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	Rp1.910.000.200	Rp1.676.893.278	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/P erluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1106	1900	2727	3361	Rp26.809.619.864	Rp21.154.960.364	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	Rp14.453.550.136	Rp8.969.376.834	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	Rp32.462.397.041	Rp29.527.713.948	APBD	Jakarta	DSDA

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	Rp5.180.413.529	Rp3.252.902.500	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	Rp88.020.907.998	Rp61.204.550.000	APBD	Jakarta	DSDA
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana													
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama													
2.13.05.1.01	2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	Rp2.056.224.585	Rp1.803.873.331	APBD	Jakarta	DPPAPP
	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	6	6	6	6	Rp61.600.000	Rp61.600.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03.1.03	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	Rp490.900.000	Rp448.610.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	Rp11.536.582.477	Rp6.353.573.822	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	Rp12.331.012.113	Rp11.471.919.609	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	Jakarta	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
1.06.06.2.02	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	Jakarta	DInsos
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi													
2.16.02.1.01	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	1	1	1	Rp421.850.000	Rp370.500.000	APBD	Jakarta	Diskominfotik

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 2 - Tanpa Kelaparan														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.														
2.1.1* Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).														
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	80	80	80			APBD	Jakarta	DPPAPP
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. (FIES)														
2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi														
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen	7	7	7	7			APBD	Jakarta	DKPKP
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan														
2.2.1* Prevalensi stunting (pendekan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4551	4551	4551	4551	Rp67.253.774.978	Rp63.243.065.478	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1243	1243	1243	1243	Rp89.745.338.701	Rp84.872.415.209	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2770	2770	2770	2770	Rp91.136.973.904	Rp88.594.642.983	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10628	10628	10628	10628	Rp118.020.692.266	Rp116.867.808.617	APBD	Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	192	192	192	192	Rp5.885.703.017	Rp5.678.803.024	APBD	Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**1.02.02.1.02.06**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.093.613.343	Rp948.181.733	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	Rp1.466.131.116	Rp1.293.485.160	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	Rp35.152.565.952	Rp28.614.889.008	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	250	300	350	400	Rp170.804.291	Rp132.874.000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	4	4	4			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**1.02.02.1.02.06**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.093.613.343	Rp948.181.733	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	Rp1.466.131.116	Rp1.293.485.160	APBD	Jakarta	Dinkes
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	Rp35.152.565.952	Rp28.614.889.008	APBD	Jakarta	Dinkes
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	250	300	350	400	Rp170.804.291	Rp132.874.000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4	4	4	4			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp170.804.291	Rp132.874.000	APBD	Jakarta	Dinkes
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi														
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	7	7	7	7	Rp426.769.165	Rp401.185.500	APBD	Jakarta	DKPKP
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.														
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	Rp447.648.176	Rp407.757.439	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2	1	1	Rp738.092.614	Rp551.208.240	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	2	2	2	2			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**1.02.02.1.02.06**	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.093.613.343	Rp948.181.733	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	206607	200610	194613	188616	Rp4.235.099.897	Rp3.774.771.831	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1792705	1860831	1928957	1997082	Rp1.809.233.563	Rp1.677.478.520	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	Rp9.421.779.069	Rp7.385.577.982	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber														
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan														
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	5	5	5			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	0	0	1	Rp193.141.133	Rp189.553.700	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	8	8	8	8	Rp9.704.674.017	Rp9.071.404.554	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	Rp267.066.000	Rp253.805.850	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian														
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	45	45	45	45			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian														
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	7	7	7	7	Rp8.718.942.039	Rp8.609.338.507	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan														
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	7	7	7	7			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	Rp5.956.251.593	Rp5.053.356.973	APBD	Jakarta	DKPKP
2.3.1.(a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan.														
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	5	5	5			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian														
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	0	0	1	Rp193.141.133	Rp189.553.700	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	Rp5.956.251.593	Rp5.053.356.973	APBD	Jakarta	DKPKP
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut sub sektor.														
3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian														
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	5	5	5	5			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian														
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	3	0	0	1	Rp193.141.133	Rp189.553.700	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	8	8	8	8	Rp9.704.674.017	Rp9.071.404.554	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian														
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	7	7	7	7	Rp8.718.942.039	Rp8.609.338.507	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan														
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	7	7	7	7			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	Rp5.956.251.593	Rp5.053.356.973	APBD	Jakarta	DKPKP
Target 2.5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan														
2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.														
3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian														
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	1	0	0			APBD	Jakarta	DKPKP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	3.27.03.1.01.10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	0	1	1			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi														
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	50	50	50	Rp645.311.618	Rp636.665.691	APBD	Jakarta	DKPKP
Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas														
2.c.1* Indikator anomali harga pangan.														
2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi														
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0	6	0	0			APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman														
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	12	12	12	12	Rp188.775.647	Rp187.627.740	APBD	Jakarta	DKPKP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.														
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) / Jumlah Kasus Kematian Ibu														
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	Rp447.648.176	Rp407.757.439	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	Rp136.874.000	Rp135.354.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	1	1	1	Rp2.287.003.636	Rp2.264.441.185	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	206607	200610	194613	188616	Rp4.235.099.897	Rp3.774.771.831	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	197220	191496	185772	180048	Rp953.256.569	Rp829.633.726	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	Rp9.421.779.069	Rp7.385.577.982	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	879045	896626	914559	932850	Rp1.988.187.280	Rp1.663.675.536	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	295296	301202	307226	313371	Rp2.590.252.049	Rp2.079.477.058	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	443935	447842	451783	455759	Rp4.965.589.066	Rp4.363.493.848	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	206607	200610	194613	188616	Rp4.235.099.897	Rp3.774.771.831	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	197220	191496	185772	180048	Rp953.256.569	Rp829.633.726	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	Rp1.466.131.116	Rp1.293.485.160	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH.														
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.														
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	Rp447.648.176	Rp407.757.439	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	Rp136.874.000	Rp135.354.000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	Rp1.466.131.116	Rp1.293.485.160	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	685.696	685.696	685.696	685.696	Rp35.152.565.952	Rp28.614.889.008	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Dokumen	7	7	7	7	Rp447.648.176	Rp407.757.439	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	2	2	2	2	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	202027	208645	215262	221881	Rp1.466.131.116	Rp1.293.485.160	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.														
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	Rp523.759.220	Rp476.843.757	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.02	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	2	2	Rp219.028.320	Rp205.650.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2	1	1	Rp738.092.614	Rp551.208.240	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	2	2	2	2			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.02	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	2	2	Rp219.028.320	Rp205.650.000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.3.5.(a) Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Kusta.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	2	2	1	1	Rp738.092.614	Rp551.208.240	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	2	2	2	2			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	2	2	2	2	Rp219.028.320	Rp205.650.000	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.														
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1792705	1860831	1928957	1997082	Rp1.809.233.563	Rp1.677.478.520	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	Rp9.421.779.069	Rp7.385.577.982	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1792705	1860831	1928957	1997082	Rp1.809.233.563	Rp1.677.478.520	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	Rp9.421.779.069	Rp7.385.577.982	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	998691	1026337	1053982	1081628	Rp28.588.061.108	Rp20.718.560.449	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	879045	896626	914559	932850	Rp1.988.187.280	Rp1.663.675.536	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	4	4	4	4	Rp916.056.040	Rp667.284.889	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	7629227	7781811	7937447	8096196	Rp9.421.779.069	Rp7.385.577.982	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	998691	1026337	1053982	1081628	Rp28.588.061.108	Rp20.718.560.449	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.														
3.5.1.(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.														
3.7.1* Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate/mCPR) dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)														
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	84	84	84	84	Rp271.200.000	Rp238.890.645	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
	Pelaksanaan Advokasi,	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	80	80	80			APBD	Jakarta	DPPAPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.01	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	Rp1.036.199.998	Rp985.182.380	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	4	4	4			APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	Rp109.050.000	Rp109.050.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969			APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														
	Pengendalian dan Pendistribusian	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	Rp53.400.000	Rp38.800.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	Rp97.355.000	Rp86.535.000	APBD	Jakarta	DPPAPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.03	Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	Rp42.250.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	Rp1.403.856.000	Rp1.377.901.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	Rp253.800.000	Rp114.130.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	95	98	102	5,29E+09	Rp52.335.814	Rp45.283.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Dokumen	14	14	14	14	Rp56.350.000	Rp56.350.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
	Pemberdayaan dan	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.04	Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	Rp2.110.037.960	Rp2.096.817.660	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	Rp27.800.000	Rp25.700.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120	90	90	60	Rp2.160.000.000	Rp1.408.908.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	Rp296.430.000	Rp263.130.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	6	6	6	Rp149.940.000	Rp100.260.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	Rp490.500.000	Rp167.850.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
3.7.2* Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama														
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	95	98	102	5,29E+09	Rp52.335.814	Rp45.283.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	Rp2.110.037.960	Rp2.096.817.660	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	Rp27.800.000	Rp25.700.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120	90	90	60	Rp2.160.000.000	Rp1.408.908.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	Rp296.430.000	Rp263.130.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	6	6	6	Rp149.940.000	Rp100.260.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
3.7.2.(a) Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR)/TFR) per WUS usia 15-49 tahun														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.02.1.01.04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	38	40	42	44	Rp98.000.000	Rp92.950.000	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.11	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Dokumen	14	14	14	14	Rp56.350.000	Rp56.350.000	APBD	Jakarta	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	84	84	84	84	Rp271.200.000	Rp238.890.645	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	80	80	80	80			APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	Rp1.036.199.998	Rp985.182.380	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	4	4	4	4			APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969			APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	Rp53.400.000	Rp38.800.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	Rp97.355.000	Rp86.535.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	Rp42.250.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	Rp490.500.000	Rp167.850.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	Rp1.403.856.000	Rp1.377.901.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	Rp253.800.000	Rp114.130.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	95	98	102	5,29E+09	Rp52.335.814	Rp45.283.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	28	28	28	28	Rp90.000.000	Rp66.877.944	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	Rp2.110.037.960	Rp2.096.817.660	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	Rp27.800.000	Rp25.700.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	120	90	90	60	Rp2.160.000.000	Rp1.408.908.000	APBD	Jakarta	DPPAPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	450	630	810	990	Rp296.430.000	Rp263.130.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	6	6	6	6	Rp149.940.000	Rp100.260.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan														
3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.b. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS														
3.b.1* Imunisasi Dasar Lengkap anak usia 12-23 bulan														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	22	22	22	22	Rp4.742.998.068	Rp4.293.980.172	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi														
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.03.1.02.01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	8875	9497	9944	10589	Rp1.357.082.250	Rp1.337.482.323	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat	1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	355	359	362	366	Rp12.114.832.591	Rp9.952.241.183	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp20.544.565.610	Rp15.148.133.630	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes
Target 3.c. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.														
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan														
1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi														
		1.02.02.1.01.01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3	10	7	6	Rp36.776.300.655	Rp36.165.680.627	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	32	32	32	32	Rp385.375.000	Rp374.835.000	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	32	32	32	32	Rp3.279.455.928	Rp3.103.593.900	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	5103	3714	4370	3193	Rp362.728.295.737	Rp341.633.038.024	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.1.01.17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	36564	38133	40155	42221	Rp12.642.663.275	Rp9.928.748.838	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	29	36	40	30	Rp118.782.910.661	Rp90.841.615.498	APBD	Jakarta	Dinkes
		1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	44	44	44	44			APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota														
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	25106	25706	26306	26906	Rp1.224.724.155.166	Rp1.189.046.552.871	APBD	Jakarta	Dinkes
1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD														
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	79	80	80	80	Rp4.783.971.425.876	Rp4.268.555.980.769	APBD	Jakarta	Dinkes

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.														
4.1.1(a) Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 5, (b) di kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: membaca, matematika, dan sains														
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	103	103	Rp289.096.404.716	Rp276.314.342.971	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	19836	19836	Rp4.614.615.073	Rp4.006.228.472	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	2314	2314	2314	2314	Rp212.806.486.954	Rp204.570.051.835	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19350	19365	19770	19980	Rp4.051.695.000	Rp3.083.045.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	20387	20127	20487	20127	Rp7.199.272.950	Rp6.009.403.360	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	93	93	93	93	Rp197.838.449.337	Rp185.896.895.142	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	23845	23845	23845	23845	Rp8.436.368.980	Rp7.634.059.825	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2176	2176	2176	2176	Rp166.571.609.380	Rp160.848.003.445	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus														
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	13	13	13	13	Rp23.684.133.040	Rp22.561.581.389	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3595	3595	3595	3595	Rp1.376.117.661	Rp1.158.928.393	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	391	391	391	391	Rp24.043.441.775	Rp22.614.480.727	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1502	1552	1552	1552	Rp412.500.000	Rp25.000.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	3275	3275	3275	3275	Rp624.395.946.977	Rp603.335.768.796	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	5764	5764	5764	5764	Rp1.913.745.894	Rp1.712.024.643	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	53049	53114	52634	53114	Rp11.172.215.000	Rp9.302.215.000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2240	2240	2240	2240	Rp11.172.215.000	Rp9.302.215.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	920	935	950	965	Rp412.424.090.000	Rp398.639.394.166	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	28904	28883	29068	29338	Rp5.669.005.000	Rp5.121.505.000	APBD	Jakarta	
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	Rp10.914.670.965	Rp7.555.953.360	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	Rp231.874.584	Rp210.399.800	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	Rp7.482.317.290	Rp3.126.068.477	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	Rp7.478.503.423	Rp7.310.758.080	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	Rp928.440.683.500	Rp917.538.034.200	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	Rp381.382.156.438	Rp110.777.198.958	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	Rp44.764.516.349	Rp19.488.396.823	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	##########	Rp1.007.609.200.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	Rp28.093.127.595	Rp6.081.358.230	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	Rp10.230.621.421	Rp9.014.974.516	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	Rp817.231.350.000	Rp813.717.130.000	APBD	Jakarta	
4.1.2.(a) Angka anak tidak sekolah jenjang: SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	Dsdik
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	Rp7.482.317.290	Rp3.126.068.477	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	Rp7.478.503.423	Rp7.310.758.080	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	Rp7.478.503.423	Rp7.310.758.080	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	Rp381.382.156.438	Rp110.777.198.958	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	Rp44.764.516.349	Rp19.488.396.823	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	##########	Rp1.007.609.200.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	Rp28.093.127.595	Rp6.081.358.230	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	Rp10.230.621.421	Rp9.014.974.516	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	Rp817.231.350.000	Rp813.717.130.000	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	165308	165308	165308	165308	Rp315.401.911.750	Rp304.034.814.918	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	8973	8973	8973	8973	Rp2.986.840.150	Rp2.569.734.264	APBD	Jakarta	
Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.														
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin														
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	139	151	153	155	Rp1.790.441.100	Rp1.740.327.100	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	7033	7033	7033	7033	Rp15.141.287.356	Rp14.962.965.896	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19330	19964	20462	20954	Rp2.423.823.454	Rp1.965.671.500	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4030	4030	4030	4030	Rp79.645.350.000	Rp77.772.802.104	APBD	Jakarta	
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin														
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	4	4	5	Rp8.983.026.055	Rp2.070.154.039	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	3	1	0	Rp7.434.951.261	Rp6.194.777.887	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	6	7	8	9	Rp36.000.000	Rp36.000.000	APBD	Jakarta	
Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.														
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.04	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen	38	40	42	44	Rp98.000.000	Rp92.950.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	Rp928.440.683.500	Rp917.538.034.200	APBD	Jakarta	Disdik
4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)														
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	Rp806.232.264.808	Rp787.197.118.382	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	19836	19836	Rp4.614.615.073	Rp4.006.228.472	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	1	1	2	1	Rp18.902.783.078	Rp3.723.762.118	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	4	0	0	0	Rp5.185.866.334	Rp4.557.758.695	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.04.07	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	108	108	108	108	Rp809.821.596	Rp682.583.080	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	4018	4018	4018	4018	Rp6.840.000.000	Rp6.809.400.000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	484	484	484	484	Rp97.528.615.560	Rp95.946.149.815	APBD	Jakarta	
Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.														
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)														
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	14	14	14	14	Rp43.479.942.944	Rp35.955.114.246	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	20387	20127	20487	20127	Rp7.199.272.950	Rp6.009.403.360	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	577	577	577	577	Rp217.149.214	Rp164.890.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus														
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	13	13	13	13	Rp23.684.133.040	Rp22.561.581.389	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	1502	1552	1552	1552	Rp412.500.000	Rp25.000.000	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	7956	8354	8771	9210	Rp11.335.855.447	Rp11.148.004.627	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	279	279	279	279	Rp36.646.510.000	Rp35.994.231.758	APBD	Jakarta	Disdik
2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi														
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	Rp72.039.299.869	Rp69.604.131.703	APBD	Jakarta	DTKTE
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam														
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d)														
2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	Rp10.914.670.965	Rp7.555.953.360	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	Rp231.874.584	Rp210.399.800	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	379	379	Rp289.031.960.000	Rp282.264.135.936	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	53346	53346	53346	53346	Rp806.232.264.808	Rp787.197.118.382	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	576	576	576	576	Rp351.512.430.000	Rp338.507.261.631	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	206866	206866	206866	206866	Rp928.440.683.500	Rp917.538.034.200	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus														
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1051	1051	1051	1051			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	Rp29.754.570.000	Rp28.636.939.291	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	Rp381.382.156.438	Rp110.777.198.958	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	Rp44.764.516.349	Rp19.488.396.823	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	##########	Rp1.007.609.200.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	Rp28.093.127.595	Rp6.081.358.230	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	0	0	0			APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	1	3	4	5	Rp28.093.127.595	Rp6.081.358.230	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	10	6	4	4	Rp10.230.621.421	Rp9.014.974.516	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	252821	252822	252823	252824	Rp817.231.350.000	Rp813.717.130.000	APBD	Jakarta	
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.														
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	379	379	Rp289.031.960.000	Rp282.264.135.936	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	103	103	Rp289.096.404.716	Rp276.314.342.971	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	19836	19836	19836	19836	Rp4.614.615.073	Rp4.006.228.472	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	576	576	576	576	Rp351.512.430.000	Rp338.507.261.631	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus														
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	3595	3595	3595	3595	Rp1.376.117.661	Rp1.158.928.393	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	Rp29.754.570.000	Rp28.636.939.291	APBD	Jakarta	
4.a.1.(a) Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.														
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1			APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	4	3	3	3	Rp10.914.670.965	Rp7.555.953.360	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	416	416	416	416	Rp643.462.587	Rp537.042.100	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	1	1	1	Rp654.250.802	Rp635.256.000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1	1	1	1	Rp49.800.061	Rp44.166.320	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	11	11	11	11	Rp231.874.584	Rp210.399.800	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	379	379	379	379	Rp289.031.960.000	Rp282.264.135.936	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	103	103	103	103	Rp289.096.404.716	Rp276.314.342.971	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.01.52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	157	157	157	157	Rp371.682.825	Rp327.646.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan														
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	0	1	1	1	Rp7.482.317.290	Rp3.126.068.477	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	Rp7.482.317.290	Rp3.126.068.477	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	2	1	1	2	Rp7.482.317.290	Rp3.126.068.477	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	7	7	7	7			APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	14	14	14	14	Rp43.479.942.944	Rp35.955.114.246	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	196	196	196	196	Rp282.823.000	Rp274.639.000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	576	576	576	576	Rp351.512.430.000	Rp338.507.261.631	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.02.35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	14	14	14	14	Rp7.478.503.423	Rp7.310.758.080	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus														
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.35	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	3280	3280	3280	3280	Rp662.716.040	Rp572.054.870	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.03.51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	Rp686.888.000	Rp612.878.400	APBD	Jakarta	
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	89	89	Rp29.754.570.000	Rp28.636.939.291	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	26	35	34	34	Rp381.382.156.438	Rp110.777.198.958	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	25	32	21	22	Rp44.764.516.349	Rp19.488.396.823	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	19.931	19.931	19.931	19.931	Rp35.385.662.496	Rp29.848.569.280	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	414055	414055	414055	414055	##########	Rp1.007.609.200.000	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	3.122	3.122	3.122	3.122	Rp39.918.040.711	Rp39.083.047.400	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	2240	2240	2240	2240	Rp727.543.780.000	Rp709.874.399.324	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	7979	5469	5469	5469	Rp11.793.599.171	Rp9.964.642.190	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	920	935	950	965	Rp412.424.090.000	Rp398.639.394.166	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	279	279	279	279	Rp36.646.510.000	Rp35.994.231.758	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	200	200	200	200	Rp411.656.550	Rp402.223.000	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)														
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	1	4	4	5	Rp8.983.026.055	Rp2.070.154.039	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	8	3	1	0	Rp7.434.951.261	Rp6.194.777.887	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	1835	1835	1835	1835	Rp1.335.689.798	Rp1.040.312.600	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	139	151	153	155	Rp1.790.441.100	Rp1.740.327.100	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	2474	2479	2479	2479	Rp2.527.884.488	Rp2.427.656.563	APBD	Jakarta	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	4030	4030	4030	4030	Rp79.645.350.000	Rp77.772.802.104	APBD	Jakarta	
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.														
4.c.1 Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan dan Persentase guru pada jenjang (i) TK/RA/BA, (ii) SD/sederajat, (iii) SMP/sederajat, (iv) SMA/ SMK/sederajat, dan (v) PLB yang memenuhi kualifikasi akademik														
1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas														
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.01.02.1.01.50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang	2314	2314	2314	2314	Rp212.806.486.954	Rp204.570.051.835	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.1.01.51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	19350	19365	19770	19980	Rp4.051.695.000	Rp3.083.045.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.01.02.1.02.43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	20387	20127	20487	20127	Rp7.199.272.950	Rp6.009.403.360	APBD	Jakarta	Disdik

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.01.02.1.02.42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	2176	2176	2176	2176	Rp166.571.609.380	Rp160.848.003.445	APBD	Jakarta	
1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus														
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.03.49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang	391	391	391	391	Rp24.043.441.775	Rp22.614.480.727	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar														
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	12544	12544	12544	12544	Rp684.577.813.288	Rp659.676.246.301	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	53049	53114	52634	53114	Rp11.172.215.000	Rp9.302.215.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	4648	4648	4648	4648	Rp398.113.422.915	Rp383.209.351.947	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	28904	28883	29068	29338	Rp5.669.005.000	Rp5.121.505.000	APBD	Jakarta	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	17257	17257	10447	10447	Rp170.432.721.502	Rp168.235.861.367	APBD	Jakarta	Disdik
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan														
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	484	484	484	484	Rp97.528.615.560	Rp95.946.149.815	APBD	Jakarta	Disdik
		1.01.02.2.04.15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	3044	3190	3339	3491	Rp816.600.000	Rp802.580.000	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 5 - Kesetaraan Gender														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.														
5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun.														
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	Rp1.036.199.998	Rp985.182.380	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	Rp109.050.000	Rp109.050.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969			APBD	Jakarta	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	Rp53.400.000	Rp38.800.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	Rp97.355.000	Rp86.535.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	Rp42.250.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	Rp490.500.000	Rp167.850.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	Rp1.403.856.000	Rp1.377.901.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	Rp253.800.000	Rp114.130.000	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	Rp2.110.037.960	Rp2.096.817.660	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	Rp27.800.000	Rp25.700.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.														
5.5.1 (b) Proporsi kursi legislatif dan jabatan pemerintah yang diduduki perempuan di pemerintah daerah yang dipilih melalui pemilu (DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota)														
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi														
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputen/Kota	Organisasi	415	415	415	415	Rp122.143.530	Rp113.529.650	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	30	35	40	45	Rp7.400.000	Rp6.500.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
5.5.2* (a) Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial di pemerintahan dan (b) Proporsi perempuan yang menduduki posisi manajerial di perusahaan publik atau swasta														
2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	415	415	415	415	Rp122.143.530	Rp113.529.650	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi														
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	30	35	40	45	Rp7.400.000	Rp6.500.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-														
5.6.1* (1) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan (seluruh wanita usia subur/WUS) dan (2) Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun berstatus														
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	Rp8.494.530.430	Rp8.383.929.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	Jakarta	
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp1.485.610.899	Rp1.415.288.622	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03.1.03	Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	6	6	6	6	Rp1.036.199.998	Rp985.182.380	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	Rp109.050.000	Rp109.050.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969	Rp109.050.000	Rp109.050.000	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	Rp53.400.000	Rp38.800.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	Rp97.355.000	Rp86.535.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	Rp42.250.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	Rp490.500.000	Rp167.850.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	Rp1.403.856.000	Rp1.377.901.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	Rp253.800.000	Rp114.130.000	APBD	Jakarta	
2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.896.565.617	Rp1.823.885.860	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	136	137	138	140	Rp2.110.037.960	Rp2.096.817.660	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB														
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	28	28	28	28	Rp27.800.000	Rp25.700.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan														
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5.05.02.1.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen	0	0	1	0	Rp27.800.000	Rp25.700.000	APBD	Jakarta	Bappeda
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.														
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	Rp8.494.530.430	Rp8.383.929.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	Jakarta	
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	Jakarta	
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)														
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	2	2	2	2	Rp109.050.000	Rp109.050.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2969	2969	2969	2969			APBD	Jakarta	
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														
		2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	900	950	1000	1050	Rp53.400.000	Rp38.800.000	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	934	954	984	1014	Rp97.355.000	Rp86.535.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
		2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	28	28	28	28	Rp42.250.000	Rp19.500.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	32	32	32	32	Rp490.500.000	Rp167.850.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	384146	387969	391792	395615	Rp1.403.856.000	Rp1.377.901.000	APBD	Jakarta	
		2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	84	84	84	84	Rp253.800.000	Rp114.130.000	APBD	Jakarta	
2.08.04.1.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan	10	11	12	13	Rp2.595.600.000	Rp2.317.800.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum														
5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; dan (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.														
1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56250	56250	56250	56250	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	Jakarta	DPRKP
3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi														
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	50	50	50	50	Rp645.311.618	Rp636.665.691	APBD	Jakarta	DKPKP
3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian														
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	Rp5.956.251.593	Rp5.053.356.973	APBD	Jakarta	DKPKP
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.														
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.														
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah														
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	1	1	Rp592.804.844	Rp562.371.200	APBD	Jakarta	DPPAPP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.														
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.														
01:02:02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	JAKARTA	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	Rp523.759.220	Rp476.843.757		JAKARTA	DINAS KESEHATAN
1:03:02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)														
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.311.331.515	Rp349.816.780	APBD	JAKARTA	DINAS SUMBER DAYA AIR
1:03:03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM														
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	Rp513.999.976	Rp200.282.400		JAKARTA	
		1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6,4	7,5	7,5	7,5	Rp13.296.590.166	Rp12.395.986.130	APBD	JAKARTA	DINAS SUMBER DAYA AIR
		1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	Rp16.017.611.496	Rp2.719.184.111		JAKARTA	
3:29:02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN														
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam	Dokumen	1	1	1	1	Rp399.999.786	Rp397.990.500	APBD	JAKARTA	DINAS SUMBER DAYA AIR
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah	Laporan	1	1	1	1	Rp15.741.797.818	Rp14.434.039.420		JAKARTA	
02:11:02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	7	6	6	6	Rp2.607.505.242	Rp2.402.712.792	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media	Dokumen	9	9	9	9	Rp28.692.059.455	Rp28.183.069.996	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan	Dokumen	4	4	4	4	Rp88.138.400	Rp87.815.000	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,	Laporan	1631	1657	1688	1714	Rp1.247.463.507	Rp1.226.081.500		JAKARTA	
02:11:10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	Dokumen	12	12	12	12	Rp197.876.668	Rp159.454.500	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan														
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk sarana cuci tangan dengan air dan sabun														
01:02:02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.02.02.1.01.24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	keluarga	1890957	2040957	2190957	2333781			APBD	JAKARTA	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.1.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	4	4	4	4	Rp523.759.220	Rp476.843.757		JAKARTA	
1:03:05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH														
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	Rp5.812.255.768	Rp5.078.677.541	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	Rp303.955.999.663	Rp249.073.000.280	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	Rp1.999.989.320	Rp1.463.750.000	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.1.01.06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	40	100	200	100	Rp476.994.804	Rp440.710.076	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.1.01.07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah personil yang mendapatkan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	264	156	108	108			APBD	JAKARTA	
1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan	1.03.06.1.01.05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	120	120	120	120	Rp329.357.774.935	Rp316.776.514.018	APBD	JAKARTA	
		1.03.06.1.01.06	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	350	350	350	350	Rp525.572.468.019	Rp492.243.362.089	APBD	JAKARTA	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp399.999.786	Rp397.990.500	APBD	JAKARTA	
		3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp15.741.797.818	Rp14.434.039.420	APBD	JAKARTA	DINAS SUMBER DAYA AIR
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	Rp1.910.000.200	Rp1.676.893.278	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perlu	Jumlah penambahan rumah	Rumah	1106	1900	2727	3361	Rp26.809.619.864	Rp21.154.960.364	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	Rp14.453.550.136	Rp8.969.376.834	APBD	JAKARTA	

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok	22	29	33	40	Rp1.667.603.750	Rp1.004.913.200	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	Rp32.462.397.041	Rp29.527.713.948	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	Rp5.180.413.529	Rp3.252.902.500	APBD	JAKARTA	
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	Rp88.020.907.998	Rp61.204.550.000	APBD	JAKARTA	
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau														
6.6.1* Perubahan tingkat kualitas dan kuantitas sumber daya air pada ekosistem perairan dari waktu ke waktu: Indeks Kualitas Lahan														
02:11:02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	7	6	6	6	Rp2.607.505.242	Rp2.402.712.792	APBD	JAKARTA	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9	9	9	9	Rp28.692.059.455	Rp28.183.069.996	APBD	JAKARTA	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4	4	4	4	Rp88.138.400	Rp87.815.000	APBD	JAKARTA	Dinas Lingkungan Hidup
		2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	1631	1657	1688	1714	Rp1.247.463.507	Rp1.226.081.500	APBD	JAKARTA	
02:11:10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	Dokumen	12	12	12	12	Rp197.876.668	Rp159.454.500	APBD	JAKARTA	Dinas Lingkungan Hidup
02:11:04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)														
2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka	Luas RTH yang Dikelola Lingkup	Ha	1409	1421	1433	1445	Rp904.443.930.629	Rp870.225.569.067	APBD	JAKARTA	DINAS
		2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	147	147	147	147	Rp95.365.290.449	Rp92.835.863.520	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
03:28:03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan	Luas Hutan yang Dilakukan	Ha	202,86	202,86	202,86	202,86	Rp304.993.141	Rp247.433.320	APBD	JAKARTA	DINAS

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	Rp313.627.330	Rp241.342.722	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	4	3	3	3	Rp45.166.382.097	Rp42.894.694.430	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
03:28:06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)														
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1	Rp148.836.242	Rp137.995.500	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
		3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	1	1	1	1	Rp148.836.242	Rp139.056.500	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
		3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	1	1	1	1	Rp199.300.741	Rp194.222.750	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 7 - Energi Bersih dan Terjangkau														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi														
03.29.06. PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN														
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit	1	2	2	2			APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASIDAN ENERGI
Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita														
05.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp1.621.407.426	Rp1.054.140.600	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp168.871.239	Rp165.179.211	APBD	DKI Jakarta	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	Rp9.927.863.132.264	Rp9.272.047.913.908	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASIDAN ENERGI

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita (ADHK)														
03.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	15	15	15	15	Rp6.324.124.712	Rp6.241.238.500	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	250	250	250	250			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	100	100	100	100			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	13060	13222	13393	13572	Rp26.458.620.607	Rp25.569.475.314	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	Rp1.298.177.280	Rp1.248.370.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	20	25	30	35	Rp241.776.000	Rp116.976.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	70	70	80	80	Rp767.169.891	Rp762.714.650	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
03.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	8	8	8	Rp32.985.374.237	Rp27.481.593.522	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	Rp3.007.677.041	Rp2.669.857.200	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	22	22	22	22	Rp250.486.485	Rp220.333.574	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	13	13	13	Rp4.395.926.501	Rp4.019.787.382	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	1	1	Rp396.883.712	Rp381.865.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	100	100	100	100			APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp474.179.262	Rp394.705.245	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	8	8	8	8	Rp12.213.840.742	Rp11.818.050.267	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	Rp66.843.863.426	Rp62.453.420.994	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	45	45	45	45	Rp39.882.260.969	Rp37.308.635.976	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	Rp1.097.370.834	Rp887.171.043	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
04.01.06. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	2	2	Rp3.101.357.760	Rp2.770.371.300	APBD	DKI Jakarta	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN SETDA
02.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	Rp4.023.351.093	Rp3.956.149.952	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
8.1.1.(a) PDRB per kapita (ADHB)														
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	2.07.03.1.03.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	70	70	80	80	Rp767.169.891	Rp762.714.650	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.06. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	20	25	30	35	Rp241.776.000	Rp116.976.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	Rp1.298.177.280	Rp1.248.370.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	15	15	15	15	Rp6.324.124.712	Rp6.241.238.500	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	250	250	250	250			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Pelaku Usaha	100	100	100	100			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.30.07. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	13060	13222	13393	13572	Rp26.458.620.607	Rp25.569.475.314	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	100	100	100	100			APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp474.179.262	Rp394.705.245	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	8	8	8	8	Rp12.213.840.742	Rp11.818.050.267	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	Rp66.843.863.426	Rp62.453.420.994	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	45	45	45	45	Rp39.882.260.969	Rp37.308.635.976	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	Rp1.097.370.834	Rp887.171.043	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	8	8	8	Rp32.985.374.237	Rp27.481.593.522	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	Rp3.007.677.041	Rp2.669.857.200	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	22	22	22	22	Rp250.486.485	Rp220.333.574	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	13	13	13	Rp4.395.926.501	Rp4.019.787.382	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	1	1	Rp396.883.712	Rp381.865.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	Rp4.023.351.093	Rp3.956.149.952	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
04.01.06. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	4.01.06.1.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	2	2	2	2	Rp3.101.357.760	Rp2.770.371.300	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
8.2.1* Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.														
02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	Rp96.900.000	Rp96.900.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin														
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp3.844.925.809	Rp3.809.931.060	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.577.444	Rp123.400.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	Rp72.039.299.869	Rp69.604.131.703	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja														
03.26.05. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF														
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	3.26.05.1.01.04	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	700	700	700	700	Rp1.411.341.180	Rp1.404.924.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.02.03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang	100	100	100	100			APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	Rp48.720.000	Rp48.720.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	Rp500.248.980	Rp500.187.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	Rp72.039.299.869	Rp69.604.131.703	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur														
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	100	100	100	Rp52.800.000	Rp49.897.100	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	Rp192.581.280	Rp189.797.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp3.844.925.809	Rp3.809.931.060	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.577.444	Rp123.400.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	Rp96.900.000	Rp96.900.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	Rp1.298.177.280	Rp1.248.370.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	Rp41.345.762.453	Rp40.582.253.922	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	Rp72.039.299.869	Rp69.604.131.703	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
02.13.05. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT														
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	1	1	Rp4.023.351.093	Rp3.956.149.952	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
8.5.2.(a)* Persentase setengah pengangguran														
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	2.07.04.1.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	100	100	100	100	Rp52.800.000	Rp49.897.100	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp3.844.925.809	Rp3.809.931.060	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.577.444	Rp123.400.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.02. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA														
2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.1.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1	1	1	1	Rp96.900.000	Rp96.900.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	Rp41.345.762.453	Rp40.582.253.922	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).														
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	Rp192.581.280	Rp189.797.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.03	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp3.844.925.809	Rp3.809.931.060	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.1.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.577.444	Rp123.400.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	Rp72.039.299.869	Rp69.604.131.703	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur														
03.26.03. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN														
2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan	250	250	250	250	Rp218.100.000	Rp217.450.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara														
03.26.03. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA														
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	8	8	8	8	Rp32.985.374.237	Rp27.481.593.522	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	1	1	1	1	Rp3.007.677.041	Rp2.669.857.200	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	22	22	22	22	Rp250.486.485	Rp220.333.574	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.03.1.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	13	13	13	13	Rp4.395.926.501	Rp4.019.787.382	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.02. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA														
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.04.05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	100	100	100	100			APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp474.179.262	Rp394.705.245	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Laporan	8	8	8	8	Rp12.213.840.742	Rp11.818.050.267	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	Rp66.843.863.426	Rp62.453.420.994	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.03.1.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Provinsi Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	45	45	45	45	Rp39.882.260.969	Rp37.308.635.976	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	3.26.02.1.01.02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	Rp1.097.370.834	Rp887.171.043	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	1	1	1	Rp396.883.712	Rp381.865.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
02.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	6	4	0	0	Rp201.533.878.686	Rp191.671.824.469	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	3	1	3	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	Rp3.413.791.134	Rp3.358.452.455	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi														
02.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan	2	1	2	1	Rp1.772.807.674	Rp1.750.414.500	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	Unit	5064	5220	5370	5471	Rp335.824.069.654	Rp286.526.250.582	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2.15.02.1.05.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan	78	84	84	84	Rp156.233.263.504	Rp154.549.543.753	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	60	60	60	60	Rp176.005.348	Rp159.483.449	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.15.02.1.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit	610	324	324	280	Rp16.686.576.913	Rp15.462.100.877	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
02.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	2	2	2	2	Rp17.789.404.868	Rp16.536.043.686	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
02.15.02. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)														
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	12	12	12	12	Rp26.450.929.771	Rp23.686.792.644	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	6957	8820	11021	10980	Rp5.010.677.936.750	##################	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2.(b) Jumlah Pelabuhan Penyebrangan														
02.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	6	4	0	0	Rp201.533.878.686	Rp191.671.824.469	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.05	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	3	1	3	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2.15.03.2.12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	9	9	9	9	Rp3.413.791.134	Rp3.358.452.455	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit	2	2	2	2	Rp17.789.404.868	Rp16.536.043.686	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	2.15.03.1.09.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit	2	1	1	1	Rp7.866.206.531	Rp7.865.088.880	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERHUBUNGAN
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB														
03.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	Rp68.311.508.137	Rp62.847.870.941	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	Rp42.223.145.881	Rp39.873.750.428	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	30	30	30	Rp4.312.350	Rp4.229.655	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur														
03.31.02. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	1	1	Rp68.311.508.137	Rp62.847.870.941	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1	1	1	1	Rp42.223.145.881	Rp39.873.750.428	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.31.03. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI														
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	3.31.03.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	Dokumen	30	30	30	30	Rp4.312.350	Rp4.229.655	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 10 - Berkurangnya Kesenjangan														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
10.1.1* Rasio Gini														
01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	Rp876.035.640.000	Rp864.573.800.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	Rp1.298.177.280	Rp1.248.370.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	Rp41.345.762.453	Rp40.582.253.922	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	Rp48.720.000	Rp48.720.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	Rp500.248.980	Rp500.187.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional														
01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	Rp192.581.280	Rp189.797.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang	10	10	10	10	Rp114.579.700	Rp112.546.500	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	Rp48.720.000	Rp48.720.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	Rp500.248.980	Rp500.187.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	Rp41.345.762.453	Rp40.582.253.922	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
07.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI														
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp13.000.000	Rp13.000.000	APBD	DKI Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp5.040.000	Rp5.040.000	APBD	DKI Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.12	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp12.340.000	Rp12.340.000	APBD	DKI Jakarta	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas														
02.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang	6452	6452	6452	6452	Rp72.039.299.869	Rp69.604.131.703	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.1.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit	8	8	8	8	Rp27.990.359.074	Rp27.423.266.603	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.04. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	500	500	500	500	Rp192.581.280	Rp189.797.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.1.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	7815	7815	7815	7815	Rp36.702.129.623	Rp35.900.105.639	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.07.05. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	200	200	200	200	Rp48.720.000	Rp48.720.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan	1	1	1	1	Rp500.248.980	Rp500.187.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	2.07.05.1.02.05	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan	100	100	100	100	Rp48.720.000	Rp48.720.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI
02.17.07. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)														
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	468	468	500	600	Rp1.298.177.280	Rp1.248.370.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07.1.01		2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha	37150	38750	38750	38750	Rp41.345.762.453	Rp40.582.253.922	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
01.06.05. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL														
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Keluarga	39468	43121	46785	50460	Rp876.035.640.000	Rp864.573.800.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang	1157	1157	1157	1157	Rp3.076.438.598	Rp3.045.899.831	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
01.06.04. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.06.04.1.01.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	51	33	43	43	Rp67.951.714	Rp65.911.800	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang	20	20	20	20			APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1591	1586	1596	1606	Rp17.653.503.681	Rp17.362.194.275	APBD	DKI Jakarta	DINAS SOSIAL
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir														
02.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	Rp2.175.469.137	Rp2.110.786.610	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
04.01.05. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM														
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.05.1.02.02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus	44	46	48	50	Rp313.720.000	Rp311.400.000	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
07.03.02. PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN														
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	7.03.02.6.02.01	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten	Orang	350	350	400	400	Rp57.613.453	Rp54.410.000	APBD	DKI Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	7.03.02.6.02.02	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)	Dokumen	2	2	2	2	Rp9.450.000	Rp9.450.000	APBD	DKI Jakarta	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu satu tahun tertentu atau 12 bulan terakhir														
02.08.02. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	4005	4405	4845	5329	Rp1.989.137.777	Rp1.921.588.277	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
02.08.03. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	275	280	285	290	Rp114.595.000	Rp107.495.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	Rp8.494.530.430	Rp8.383.929.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp1.485.610.899	Rp1.415.288.622	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	Rp490.900.000	Rp448.610.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan													
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH													
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh													
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.													
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.01	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.02	1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Kajian Pengembangan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kajian	9	9	10	10	Rp4.725.654.321	Rp4.122.593.947	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.1.02.03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Sengketa Perumahan dan Rumah Susun diselesaikan	Perkara	18	20	22	24			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	7.495	7.445	7.472	8.935	Rp194.997.421.911	Rp186.942.693.367	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	395	382	3.400	3.786			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01:04:03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN													
1.04.03.1.02	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	453	0	0	150			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.1.02	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kajian Skema Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	1	0	0			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.1.02	1.04.03.1.02.03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Lokasi Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Lokasi	3	1	1	3			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.03.2.02	1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	0	1	0			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
01:04:05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
1.04.05.1.01	1.04.05.1.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	29	26	15	0	Rp10.551.005.375	Rp9.483.870.750	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.1.01	1.04.05.1.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	48	72	53	35	Rp681.812.683.508	Rp613.945.789.601	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	1.04.02.2.05.03	Pembangunan Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	395	382	3.400	3.786			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	2	2	2	2	Rp6.501.728.826	Rp5.753.895.644	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum													
01:03:10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN													
1.03.10.1.01	1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Penambahan luas pejalan kaki	M2	1.368.594	1.483.594	1.633.594	1.808.594	Rp1.021.916.085.593	Rp983.702.176.605	APBD	JAKARTA	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	1.03.10.1.01.05	Pembangunan Jalan	Penambahan jumlah titik pencahayaan kota	titik	313.042	330.595	348.148	365.701			APBD	JAKARTA	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	1.03.10.1.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M	30	30	30	30	Rp94.248.468.321	Rp89.800.722.513	APBD	JAKARTA	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	1.03.10.1.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	M^2	18.000	18.000	18.000	18.000			APBD	JAKARTA	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	1.03.10.1.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	KM	107	115	124	134	Rp483.108.695.691	Rp472.539.932.847	APBD	JAKARTA	DINAS BINA MARGA
1.03.10.1.01	1.03.10.1.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	KM	48	51	55	58	Rp151.237.395.731	Rp141.596.723.924	APBD	JAKARTA	DINAS BINA MARGA
02:15:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)													
2.15.02.6.04	2.15.02.6.04.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	3	2	2	2	Rp3.429.828.355	Rp3.405.064.538	APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.15.02.6.04	2.15.02.6.04.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A yang Dikembangkan	Unit	4	4	4	4	Rp26.014.057.085	Rp25.084.613.779	APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.03	2.15.02.1.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	Unit	14	14	14	14			APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.03	2.15.02.1.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7	7	7	7			APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.08	2.15.02.1.08.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	12	12	12	12	Rp26.450.929.771	Rp23.686.792.644	APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.1.08	2.15.02.1.08.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit	6.957	8.820	11.021	10.980	Rp5.010.677.936.750	Rp4.621.975.094.384	APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN
02:15:03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN													
2.15.03.1.09	2.15.03.1.09.05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit	2	1	1	1	Rp7.866.206.531	Rp7.865.088.880	APBD	JAKARTA	DINAS PERHUBUNGAN
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.													
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)													
02:22:02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													
2.22.02.1.01	2.22.02.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Objek	235	335	435	535	Rp73.278.977.308	Rp68.327.273.242	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.01	2.22.02.1.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	16	16	17	18	Rp51.942.864.586	Rp50.184.260.088	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.02	2.22.02.1.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	35	40	45	50	Rp264.845.369	Rp258.979.000	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.22.02.1.02	2.22.02.1.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	18	24	30	36	Rp28.504.519.978	Rp25.388.191.786	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02.1.02	2.22.02.1.02.03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat	2.000	2.000	2.000	2.500	Rp1.919.037.731	Rp1.479.096.240	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2:22:05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA													
2.22.05.1.01	2.22.05.1.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	199	223	247	271			APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	2.22.05.1.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	266	276	286	296			APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	2.22.05.1.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek	250	300	350	400	Rp4.027.099.240	Rp3.314.046.062	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	2.22.05.1.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	40	50	60	70	Rp5.640.543.121	Rp5.145.434.969	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	2.22.05.1.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	30	35	40	45	Rp5.956.366.440	Rp4.970.484.003	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.05.1.01	2.22.05.1.02.04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	70	70	70	70	Rp199.985.985	Rp197.489.430	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2:22:06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN													
2.22.06.1.01	2.22.06.1.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit	3.910	4.497	5.171	5.947	Rp7.144.564.315	Rp7.075.485.792	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	2.22.06.1.01.02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang	342	342	342	342	Rp1.913.970.636	Rp1.826.952.017	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	2.22.06.1.01.03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit	38	38	38	38	Rp9.487.405.477	Rp9.247.202.358	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	2.22.06.1.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit	3	3	3	3	Rp48.831.668.310	Rp46.297.726.176	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06.1.01	2.22.06.1.01.05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	2	1	1	2	Rp6.397.803.866	Rp6.142.761.860	APBD	JAKARTA	DINAS KEBUDAYAAN
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-													
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp588.943.646	Rp585.521.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	Rp18.567.153.060	Rp18.301.829.044	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	Rp1.854.116.792	Rp1.784.546.334	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	Rp1.199.906.337	Rp1.199.188.500	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp195.719.337	Rp195.689.700	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	Rp461.305.138	Rp455.884.950	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	Rp1.608.900.000	Rp1.600.417.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	Rp195.000.000	Rp194.164.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94.978	94.978	94.978	94.978	Rp5.738.719.404	Rp5.347.417.373	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	Rp156.000.000	Rp151.810.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	Rp5.409.894.109	Rp5.397.220.259	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	1.200	1.200	1.200	1.200	Rp11.536.582.477	Rp6.353.573.822	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	500	500	500	500	Rp12.474.058.863	Rp11.614.614.609	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
07:01:02 PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN													
7.01.02.6.02	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	Rp4.200.332.440	Rp501.786.856	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
7.01.02.6.02	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	Rp4.200.332.440	Rp501.786.856	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
7.01.02.6.02	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	Rp4.200.332.440	Rp501.786.856	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
7.01.02.6.02	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	Rp4.200.332.440	Rp501.786.856	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
7.01.02.6.02	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	Rp4.200.332.440	Rp501.786.856	APBD	JAKARTA	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
7.01.02.6.02	7.01.02.6.02.06	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Jumlah Laporan Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan	Laporan	1	1	1	1	Rp4.200.332.440	Rp501.786.856	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	Rp59.223.980.348	Rp56.964.529.565	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	Rp11.176.956.957	Rp11.054.563.257	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	Rp63.267.850.522	Rp45.741.346.597	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1.100	0	6.461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56.250	56.250	56.250	56.250			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp588.943.646	Rp585.521.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	Rp18.567.153.060	Rp18.301.829.044	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	Rp1.854.116.792	Rp1.784.546.334	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	Rp1.199.906.337	Rp1.199.188.500	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp195.719.337	Rp195.689.700	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	Rp461.305.138	Rp455.884.950	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	Rp1.608.900.000	Rp1.600.417.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	Rp195.000.000	Rp194.164.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94.978	94.978	94.978	94.978	Rp5.738.719.404	Rp5.347.417.373	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	Rp156.000.000	Rp151.810.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	Rp5.409.894.109	Rp5.397.220.259	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	Rp63.267.850.522	Rp45.741.346.597	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1.100	0	6.461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56.250	56.250	56.250	56.250	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.													
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya													
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2.11.08.1.01	2.11.08.1.01.03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	378.000	404.000	429.500	444.000	Rp2.548.046.245	Rp2.349.438.911	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN													
2.11.11.1.01	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	2.578.092	2.578.092	2.578.092	2.578.092	Rp1.551.639.128.914	Rp1.509.168.629.572	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.1.01	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	10	10	10	14	Rp191.175.381.706	Rp183.046.803.850	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.1.01	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	18	17	17	22	Rp15.177.184.177	Rp12.324.238.002	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	7	7	7	7	Rp34.055.661.355	Rp30.275.640.799	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	500	750	1.000	1.250	Rp189.910.000	Rp177.811.000	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM10													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.11.03.1.01	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9	9	9	9	Rp28.692.059.455	Rp28.183.069.996	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	4	4	Rp15.713.352.704	Rp14.836.054.544	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.2.(b) Indeks kualitas udara													
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP													
2.11.03.1.01	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	9	9	9	9	Rp28.692.059.455	Rp28.183.069.996	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	4	4	4	4	Rp15.713.352.704	Rp14.836.054.544	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas													
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua													
Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi													
02:11:04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)													
2.11.04.1.01	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	3	3	4	4	Rp904.443.930.629	Rp870.225.569.067	APBD	JAKARTA	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU
2.11.04.1.01	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	1.409	1.421	1.433	1.445			APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
2.11.04.1.01	2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	147	147	147	147	Rp95.365.290.449	Rp92.835.863.520	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.													
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan													
01:03:12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG													
1.03.12.1.01	1.03.12.1.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Dokumen	4	5	5	5	Rp1.604.662.200	Rp1.299.250.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.1.01	1.03.12.1.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	6	6	6	6	Rp6.024.784.200	Rp4.625.078.438	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.12.1.01	1.03.12.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	1	1	1	Rp826.628.036	Rp751.117.000	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.12.1.03	1.03.12.1.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	8	9	10	11	Rp100.317.213.385	Rp90.143.741.241	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan													
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi													
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp588.943.646	Rp585.521.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	Rp18.567.153.060	Rp18.301.829.044	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	Rp1.854.116.792	Rp1.784.546.334	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	Rp1.199.906.337	Rp1.199.188.500	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp195.719.337	Rp195.689.700	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	Rp461.305.138	Rp455.884.950	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	Rp1.608.900.000	Rp1.600.417.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	Rp195.000.000	Rp194.164.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94.978	94.978	94.978	94.978	Rp5.738.719.404	Rp5.347.417.373	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	Rp156.000.000	Rp151.810.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	Rp5.409.894.109	Rp5.397.220.259	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													
1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	Rp59.223.980.348	Rp56.964.529.565	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01	1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	2.945	2.945	2.945	2.945	Rp11.176.956.957	Rp11.054.563.257	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA													
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	Rp63.267.850.522	Rp45.741.346.597	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1.100	0	6.461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.1.03	1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56.250	56.250	56.250	56.250	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan													
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal													
01:03:08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG													
1.03.08.1.01	1.03.08.6.01.08	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	120	120	120	120	Rp552.134.443	Rp346.507.900	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.03.08.2.01	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	6.000	6.000	6.000	6.000	Rp12.332.715.840	Rp9.088.672.514	APBD	JAKARTA	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	Rp11.536.582.477	Rp6.353.573.822	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	Rp12.331.012.113	Rp11.471.919.609	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	Jakarta	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
1.06.06.2.02	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana													
1.05.03.1.04	1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	Jakarta	BPBD
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi													
2.16.02.1.01	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	1	1	1	Rp421.850.000	Rp370.500.000	APBD	Jakarta	Diskominfotik
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.02.1.01	1.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.311.331.515	Rp349.816.780	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota													
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	Dokumen	2	1	1	1	Rp513.999.976	Rp200.282.400	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional	Liter/Detik	6.4	7.5	7.5	7.5	Rp13.296.590.166	Rp12.395.986.130	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.03.1.01	1.03.03.1.01.09	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	Unit	16	16	18	16	Rp23.623.758.355	Rp10.117.348.571	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional													
1.03.05.1.01	1.03.05.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Air Limbah domestik yang Tersusun	Dokumen	5	5	5	5	Rp5.812.255.768	Rp5.078.677.541	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.1.01.03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Rumah Tangga	0	0	0	23	Rp303.955.999.663	Rp249.073.000.280	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.1.01.05	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perlua san Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	Dokumen	2	3	3	3	Rp1.999.989.320	Rp1.463.750.000	APBD	Jakarta	DSDA
3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi													
3.29.02.1.01	3.29.02.1.01.01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp399.999.786	Rp397.990.500	APBD	Jakarta	DSDA
	3.29.02.1.01.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp15.741.797.818	Rp14.434.039.420	APBD	Jakarta	DSDA
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.05.2.01	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	7	5	3	3	Rp1.910.000.200	Rp1.676.893.278	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	1106	1900	2727	3361	Rp26.809.619.864	Rp21.154.960.364	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Rumah Tangga	2000	2000	2000	2000	Rp14.453.550.136	Rp8.969.376.834	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	Unit	67	84	101	118	Rp32.462.397.041	Rp29.527.713.948	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Dokumen	6	6	6	6	Rp5.180.413.529	Rp3.252.902.500	APBD	Jakarta	DSDA
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	9850	9800	9800	9800	Rp88.020.907.998	Rp61.204.550.000	APBD	Jakarta	DSDA
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana													
2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah													
2.13.05.1.01	2.13.05.1.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1	1	1	1	Rp2.056.224.585	Rp1.803.873.331	APBD	Jakarta	DPPAPP
	2.13.05.1.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	6	6	6	6	Rp61.600.000	Rp61.600.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi													

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03.1.03	2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	1000	1150	1300	1500	Rp490.900.000	Rp448.610.000	APBD	Jakarta	DPPAPP
1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi													
1.06.06.1.01	1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang	265664	266067	266067	266067	Rp11.536.582.477	Rp6.353.573.822	APBD	Jakarta	Dinsos
	1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang	130400	136650	136650	136650	Rp12.331.012.113	Rp11.471.919.609	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	Jakarta	
	1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	Jakarta	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota													
1.06.06.2.02	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	Jakarta	DInsos
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi													
1.05.03.1.01	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	Jakarta	
1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	

Program/Kegiatan/Subkegiatan			Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2023	2024	2025	2026					
(1)			(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.02	1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	BPBD
	1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	
2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi													
2.16.02.1.01	2.16.02.1.01.09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	1	1	1	1	Rp421.850.000	Rp370.500.000	APBD	Jakarta	Diskominfotik

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk														
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri														
02:11:05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)														
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	14	14	14	14	Rp3.755.224.811	Rp2.552.805.923	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali														
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang														
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	378000	404000	429500	444000	Rp2.548.046.245	Rp2.349.438.911	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diitangani	Dokumen	12	12	12	12	Rp197.876.668	Rp159.454.500	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02:11:11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN														
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	2578092	2578092	2578092	2578092	Rp1.551.639.128.914	##################	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	10	10	10	14	Rp191.175.381.706	Rp183.046.803.850	APBD	JAKARTA	
2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	18	17	17	22	Rp15.177.184.177	Rp12.324.238.002	APBD	JAKARTA	
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Laporan	7	7	7	7	Rp34.055.661.355	Rp30.275.640.799	APBD	JAKARTA	
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	500	750	1000	1250	Rp189.910.000	Rp177.811.000	APBD	JAKARTA	
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.														
12.8.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan Lembaga / komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup														
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	335	425	515	605	Rp1.822.924.541	Rp1.746.539.024	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara														
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp588.943.646	Rp585.521.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	Rp18.567.153.060	Rp18.301.829.044	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	Rp1.854.116.792	Rp1.784.546.334	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	Rp1.199.906.337	Rp1.199.188.500	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp195.719.337	Rp195.689.700	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	Rp461.305.138	Rp455.884.950	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	Rp1.608.900.000	Rp1.600.417.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	Rp195.000.000	Rp194.164.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94978	94978	94978	94978	Rp5.738.719.404	Rp5.347.417.373	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	Rp156.000.000	Rp151.810.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	Rp5.409.894.109	Rp5.397.220.259	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Orang	50	50	50	50			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
01:06:04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL														
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang	2945	2945	2945	2945	Rp59.223.980.348	Rp56.964.529.565	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
		1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang	2945	2945	2945	2945	Rp11.176.956.957	Rp11.054.563.257	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Unit	25	25	25	25	Rp2.533.704.870	Rp2.503.700.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
		1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang	480	480	480	480	Rp260.347.743	Rp255.026.800	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	Rp63.267.850.522	Rp45.741.346.597	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56250	56250	56250	56250			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi pengurangan risiko bencana daerah yang selaras dengan strategi pengurangan risiko bencana nasional														
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.05.03.1.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.01		1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	Orang	329	329	329	329	Rp2.056.827.895	Rp2.041.180.600	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalkan	Dokumen	0	0	0	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp588.943.646	Rp585.521.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen	12	12	12	12	Rp18.567.153.060	Rp18.301.829.044	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	Unit	267	267	267	267	Rp1.854.116.792	Rp1.784.546.334	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	5	5	5	5	Rp1.199.906.337	Rp1.199.188.500	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp195.719.337	Rp195.689.700	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan	Laporan	3	3	3	3	Rp461.305.138	Rp455.884.950	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Laporan	12	12	12	12	Rp1.608.900.000	Rp1.600.417.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan	1	1	1	1	Rp195.000.000	Rp194.164.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	94978	94978	94978	94978	Rp5.738.719.404	Rp5.347.417.373	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1	1	1	Rp156.000.000	Rp151.810.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen	12	12	12	12	Rp5.409.894.109	Rp5.397.220.259	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan dan Bencana	Laporan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.06	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	60	60	60	60			APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		1.05.03.1.04.07	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.255.998.670	Rp1.234.357.235	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01:06:06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	90	90	90	90	Rp7.510.563.759	Rp7.410.349.413	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	25	25	25	25	Rp1.321.449.617	Rp1.302.457.000	APBD	JAKARTA	DINAS SOSIAL
01:04:02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen	12	7	6	4	Rp63.267.850.522	Rp45.741.346.597	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah	340	1100	0	6461	Rp223.389.922.397	Rp100.296.764.305	APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		1.04.02.1.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah lahan yang tersedia	m2	56250	56250	56250	56250			APBD	JAKARTA	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional														
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications														
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	Rp1.982.121.782	Rp1.975.469.477	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun														
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	Rp1.982.121.782	Rp1.975.469.477	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)														
02:11:03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP														
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	3	3	3	3	Rp1.982.121.782	Rp1.975.469.477	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	1	1	1	Rp4.109.842.223	Rp3.872.174.883	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim														
13.3.1.(a) Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup														
1:05:03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang	267	267	267	267	Rp588.943.646	Rp585.521.000	APBD	JAKARTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
02:11:08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	335	425	515	605	Rp1.822.924.541	Rp1.746.539.024	APBD	JAKARTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 14 Ekosistem Lautan														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.														
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut														
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Hektare	200	200	100	100	Rp396.001.468	Rp175.210.468	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	0	0	0			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Hektare	1	1	1	1	Rp4.109.842.223	Rp3.872.174.883	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.01	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan	2	2	2	2					
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan														
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha														
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.09.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.03.1.09.02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.04.1.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi	34	35	36	37	Rp352.294.798	Rp331.835.680	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	4	4	4	Rp545.309.936	Rp480.795.349	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	4	4	4			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.25.05.1.02.03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp63.268.568	Rp62.135.250			
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*small-scale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar														
14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan														
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.1.03	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	3.25.03.1.03.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	2	2	Rp405.456.150	Rp404.097.119	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi														
03:25:02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.01.04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana	Orang	50	50	50	50			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	3.25.02.1.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	2	2	2	Rp57.918.880	Rp51.250.000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	80	90	100	100	Rp589.240.032	Rp573.814.800	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)		(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	3.25.02.1.03.02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	19	19	19	19	Rp637.133.956	Rp633.601.000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.02.1.03.03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau	Orang	500	500	500	500			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.02.1.03.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta	Kelompok	1	1	1	1			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP														
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	3.25.03.1.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	7	7	1	1			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.03.1.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	2150	2150	2252	2252	Rp1.707.180.859	Rp1.486.106.379	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	3.25.03.1.06.02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	18	21	18	18	Rp27.393.922.724	Rp25.564.650.952	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA														
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	3.25.04.1.05.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	Rp631.798.191	Rp553.391.780	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	5	7	9	10	Rp2.896.292.795	Rp2.846.307.741	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	48	53	58	63			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	6	6	6	6	Rp195.874.400	Rp195.142.384	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.05.07	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola	Jumlah Pembudidaya	Orang	68	70	72	74	Rp263.439.902	Rp238.190.000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.04.1.06.02	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah	Unit	161	138	172	176	Rp3.636.121.823	Rp3.474.375.399	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.25.05.1.01.03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	4	4	4	4			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.05.1.01.04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	15	15	15	15	Rp84.504.740	Rp83.292.000	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	140	140	140	140	Rp713.297.521	Rp704.235.450	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
03:25:06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN														
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	31	31	31	31	Rp1.953.006.317	Rp1.910.597.114	APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN
		3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	60	60	60	60			APBD	JAKARTA	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 15 Ekosistem Daratan														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan														
15.1.1*. Proporsi tutupan lahan berhutan terhadap total luas daratan (%														
03:28:03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN														
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektare	4	3	3	3	Rp45.166.382.097	Rp42.894.694.430	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Hektare	202,9	202,9	203	202,9	Rp304.993.141	Rp247.433.320	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
		3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12	12	12	12	Rp313.627.330	Rp241.342.722	APBD	JAKARTA	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk														
8:01:06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	20	20	20	20	Rp20.200.000	Rp20.200.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	48	48	48	48	Rp3.389.400.000	Rp3.342.250.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp639.123.906.800	Rp638.922.110.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya														
8:01:06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp6.838.400.000	Rp6.795.800.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp1.423.736.940	Rp1.401.082.400	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	20	20	20	20	Rp20.200.000	Rp20.200.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	48	48	48	48	Rp3.389.400.000	Rp3.342.250.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp639.123.906.800	Rp638.922.110.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya														
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	2568	2654	2740	2826	Rp122.750.000	Rp121.550.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.896.565.617	Rp1.823.885.860	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100,000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi														
2:08:03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	Rp2.175.469.137	Rp2.110.786.610	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp1.485.610.899	Rp1.415.288.622	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	2568	2654	2740	2826	Rp122.750.000	Rp121.550.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.896.565.617	Rp1.823.885.860	APBD	Jakarta	
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi														
2:08:03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	Rp2.175.469.137	Rp2.110.786.610	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp1.485.610.899	Rp1.415.288.622	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Organisasi	2568	2654	2740	2826	Rp122.750.000	Rp121.550.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	Rp16.550.000	Rp16.150.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi														
2:08:02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabuputaen/Kota	Organisasi	415	415	415	415	Rp122.143.530	Rp113.529.650	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK														
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Dokumen	7	7	7	7	Rp16.550.000	Rp16.150.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)														
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	Rp119.900.000	Rp75.929.800	APBD	Jakarta	SATUAN POLISI
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.661.707.071	Rp10.930.336.068	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp6.764.400.000	Rp3.899.000.000	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	Rp741.458.622	Rp494.963.623	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	Rp36.672.505.500	Rp9.514.590.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	Rp4.543.200.000	Rp194.310.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	Rp15.131.317.251	Rp5.235.525.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	2	2	2	2	Rp7.915.813.030	Rp5.102.211.299	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	Rp11.468.754.399	Rp9.260.881.388	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
7:02:02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI														
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp90.694.322	Rp90.694.322	APBD	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp90.694.322	Rp90.694.322	APBD	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp90.694.322	Rp90.694.322	APBD	Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp90.694.322	Rp90.694.322	APBD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp90.694.322	Rp90.694.322	APBD	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.42	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp90.694.322	Rp90.694.322	APBD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7:03:02 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGEMBANGAN														
7.03.02.6.02	Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	7.03.02.6.02.11	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan	Dokumen	1	1	1	1	Rp22.929.558	Rp21.600.000	APBD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	Rp35.004.200	Rp34.965.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.650.000.000	Rp9.650.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	Rp304.356.400	Rp299.708.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp94.280.000	Rp94.280.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)														
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	Rp119.900.000	Rp75.929.800	APBD	Jakarta	SATUAN POLISI
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	Rp36.672.505.500	Rp9.514.590.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	2	2	2	2	Rp1.186.295.250	Rp926.525.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.482.526.512	Rp1.194.362.500	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	Rp4.543.200.000	Rp194.310.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	Rp15.131.317.251	Rp5.235.525.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	Rp11.468.754.399	Rp9.260.881.388	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	Rp35.004.200	Rp34.965.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.661.707.071	Rp10.930.336.068	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp6.764.400.000	Rp3.899.000.000	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	Rp741.458.622	Rp494.963.623	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
07:02:02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI														
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.20	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp36.660.000	Rp34.362.000	APBD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥B														
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	Rp119.900.000	Rp75.929.800	APBD	Jakarta	SATUAN POLISI
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	Rp36.672.505.500	Rp9.514.590.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	Rp4.543.200.000	Rp194.310.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	Rp15.131.317.251	Rp5.235.525.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	Rp11.468.754.399	Rp9.260.881.388	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	Rp35.004.200	Rp34.965.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.661.707.071	Rp10.930.336.068	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp6.764.400.000	Rp3.899.000.000	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	Rp741.458.622	Rp494.963.623	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
4:01:02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI														
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	1	1	Rp24.700.000	Rp24.700.000	APBD	Jakarta	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B														
1:05:01 Program Peningkatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi														
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan	1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	4	Rp119.900.000	Rp75.929.800	APBD	Jakarta	SATUAN POLISI
6:01:02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN														
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	244	244	244	244	Rp36.672.505.500	Rp9.514.590.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	25	29	33	37	Rp4.543.200.000	Rp194.310.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	Rp15.131.317.251	Rp5.235.525.000	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
6:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	277	277	277	277	Rp11.468.754.399	Rp9.260.881.388	APBD	Jakarta	INSPEKTORAT
8:01:01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI														
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	6	6	6	Rp35.004.200	Rp34.965.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.661.707.071	Rp10.930.336.068	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp6.764.400.000	Rp3.899.000.000	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	Rp741.458.622	Rp494.963.623	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
07:02:02 PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI														
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp41.239.360	Rp41.215.000	ABPD	Jakarta Pusat	Kota Administrasi Jakarta Pusat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp41.239.360	Rp41.215.000	ABPD	Jakarta Utara	Kota Administrasi Jakarta Utara
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp41.239.360	Rp41.215.000	ABPD	Jakarta Barat	Kota Administrasi Jakarta Barat

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp41.239.360	Rp41.215.000	ABPD	Jakarta Selatan	Kota Administrasi Jakarta Selatan
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp41.239.360	Rp41.215.000	ABPD	Jakarta Timur	Kota Administrasi Jakarta Timur
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.26	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	1	1	1	1	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7.02.02.6.03	Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	7.02.02.6.03.25	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen	4	4	4	4	Rp30.211.150	Rp30.111.000	ABPD	Kepulauan Seribu	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4:01:02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI														
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	2	2	2	Rp255.249.579	Rp254.689.695	ABPD	Jakarta	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.														
4:01:02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI														
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	4.01.02.1.02.05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	1	1	Rp133.650.000	Rp133.650.000	ABPD	Jakarta	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi														
8:01:02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp5.142.900.000	Rp4.996.500.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp1.779.629.585	Rp1.733.068.400	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	50	50	50			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp10.079.302.515	Rp9.853.455.100	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	15	15	15	15			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp379.260.000	Rp368.340.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp513.736.477.720	Rp513.736.477.720	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.650.000.000	Rp9.650.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	Rp304.356.400	Rp299.708.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp94.280.000	Rp94.280.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	12	12	12	Rp66.000.000	Rp66.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp639.123.906.800	Rp638.922.110.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan														
8:01:02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp5.142.900.000	Rp4.996.500.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp1.779.629.585	Rp1.733.068.400	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	50	50	50			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp10.079.302.515	Rp9.853.455.100	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	15	15	15	15			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp379.260.000	Rp368.340.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp513.736.477.720	Rp513.736.477.720	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.650.000.000	Rp9.650.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	Rp304.356.400	Rp299.708.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp94.280.000	Rp94.280.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp639.123.906.800	Rp638.922.110.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan														
8:01:02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp5.142.900.000	Rp4.996.500.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp1.779.629.585	Rp1.733.068.400	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	50	50	50	50			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	5000	5000	5000	5000	Rp10.079.302.515	Rp9.853.455.100	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	15	15	15	15			APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp379.260.000	Rp368.340.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp513.736.477.720	Rp513.736.477.720	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.650.000.000	Rp9.650.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1800	1800	1800	1800	Rp304.356.400	Rp299.708.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1000	1000	1000	1000	Rp304.356.400	Rp299.708.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA														
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	12	12	12	12	Rp66.000.000	Rp66.000.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8:01:04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN														
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	4	4	Rp639.123.906.800	Rp638.922.110.000	APBD	Jakarta	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2:08:02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	146	155	166	176	Rp254.395.000	Rp251.195.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	518	518	518	518	Rp30.000.000	Rp30.000.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur														
2:12:02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.726.240.828	Rp1.725.820.579	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	100	100	100	100	Rp50.700.000	Rp50.700.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.201.519.905	Rp1.197.389.825	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	Rp3.728.922.550	Rp3.718.705.612	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	6	6	Rp701.581.212	Rp690.582.981	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	Rp185.351.376	Rp185.351.352	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	3	3	3	Rp973.491.352	Rp973.491.352	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50	50	50	50			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.313.108	Rp122.306.560		Jakarta	
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	6	6	6	Rp159.284.401	Rp156.048.240		Jakarta	
2:14:02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.1.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp50.040.000	Rp50.040.000	APBD	Jakarra	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran														
2:12:02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.726.240.828	Rp1.725.820.579	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	100	100	100	100	Rp50.700.000	Rp50.700.000	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1	1	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.201.519.905	Rp1.197.389.825	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	Rp3.728.922.550	Rp3.718.705.612	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	6	6	Rp701.581.212	Rp690.582.981	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	Rp185.351.376	Rp185.351.352	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	3	3	3	Rp973.491.352	Rp973.491.352	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50	50	50	50			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2:12:05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.313.108	Rp122.306.560	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	6	6	6	Rp159.284.401	Rp156.048.240	APBD	Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.														
2:08:02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	146	155	166	176	Rp254.395.000	Rp251.195.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	518	518	518	518	Rp30.000.000	Rp30.000.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.02.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	30	35	40	45	Rp7.400.000	Rp6.500.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2:08:03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen	11	11	11	11	Rp2.175.469.137	Rp2.110.786.610	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Perangkat Daerah	275	280	285	290	Rp114.595.000	Rp107.495.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	Orang	1352	1367	1382	1397	Rp8.494.530.430	Rp8.383.929.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Layanan	1987	2186	2405	2646	Rp346.839.990	Rp303.969.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Laporan	1	1	1	1	Rp1.485.610.899	Rp1.415.288.622	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	303	303	303	303	Rp325.126.000	Rp324.460.000	APBD	Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi informatif														
2:16:02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	4	4	4	4	Rp13.689.521.467	Rp12.298.001.860	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	2	2	2	2	Rp4.332.543.568	Rp3.811.651.450	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp3.463.043.834	Rp2.764.466.513	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	1	1	1	1	Rp6.479.718.157	Rp6.075.099.560	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
5:02:04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2	2	2	2	Rp4.248.858.000	Rp3.971.540.484	APBD	Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.														
2:16:02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp3.463.043.834	Rp2.764.466.513	APBD	Jakarta	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN STATISTIK
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional														
4:01:05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM														
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen	100	95	90	85	Rp220.100.000	Rp208.530.000	APBD	Jakarta	BIRO HUKUM
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen	1500	1500	1500	1500	Rp90.100.000	Rp88.440.000	APBD	Jakarta	BIRO HUKUM
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	4.01.05.1.01.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	150	200	250	300	Rp353.067.106	Rp334.631.131	APBD	Jakarta	BIRO HUKUM

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tujuan 17 - Kemitraan untuk Mencapai Tujuan														
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH														
17.1.1* Pendapatan Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya														
05.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp6.764.400.000	Rp3.899.000.000	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.661.707.071	Rp10.930.336.068	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2	2	2	2	Rp4.248.858.000	Rp3.971.540.484	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	6	6	6	6	Rp2.936.385.832	Rp2.428.286.333	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp38.557.157.551	Rp36.424.232.995	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen LHP	1	1	1	1	Rp741.458.622	Rp494.963.623	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	2	2	2	2	Rp164.387.654.720	Rp162.219.958.341	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	6	6	6	Rp15.485.453.600	Rp13.896.041.848	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
05.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	Rp319.537.300	Rp193.823.280	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	Rp250.616.182	Rp139.371.182	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB														
05.02.04. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp6.764.400.000	Rp3.899.000.000	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	Dokumen	1	1	1	1	Rp12.661.707.071	Rp10.930.336.068	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan	2	2	2	2	Rp4.248.858.000	Rp3.971.540.484	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD	6	6	6	6	Rp2.936.385.832	Rp2.428.286.333	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	1	1	1	1	Rp38.557.157.551	Rp36.424.232.995	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	Dokumen LHP	1	1	1	1	Rp741.458.622	Rp494.963.623	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana	2	2	2	2	Rp164.387.654.720	Rp162.219.958.341	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.1.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	6	6	6	6	Rp15.485.453.600	Rp13.896.041.848	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2* Proporsi Anggaran Domestik Daerah yang didanai oleh PAD														
05.02.02. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH														
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	2	2	Rp319.537.300	Rp193.823.280	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	2	Rp250.616.182	Rp139.371.182	APBD	DKI Jakarta	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas														
03.30.05. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	15	15	15	15	Rp6.324.124.712	Rp6.241.238.500	APBD	DKI Jakarta	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
03.26.04. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL														
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	3.26.04.1.01.02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Laporan	0	0	0	1	Rp7.866.474.706	Rp5.684.329.003	APBD	DKI Jakarta	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
04.01.02. PROGRAM PENATAAN ORGANISASI														
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	2	2	2	2	Rp4.339.234.894	Rp3.605.114.081	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	2	2	2	Rp20.231.693.520	Rp18.288.887.756	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPDBU (Daftar Rencana KPDBU/DRK) yang diterbitkan setiap tahun.														
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	2	2	2	2	Rp4.339.234.894	Rp3.605.114.081	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	2	2	2	2	Rp20.231.693.520	Rp18.288.887.756	APBD	DKI Jakarta	SEKRETARIAT DAERAH
17.19.2.(a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020														
01.04.02. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN														
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.04.02.1.01.06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	3	3	2			APBD	DKI Jakarta	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
02.14.02. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK														
2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	2.14.02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen	1	1	1	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
17.19.2 (b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)														
02.12.02. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK														
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	1	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp163.258.056	Rp163.257.748	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen	1	1	1	1	Rp1.726.240.828	Rp1.725.820.579	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	2.12.02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1	1	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	100	100	100	100	Rp50.700.000	Rp50.700.000	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	12	12	12	12	Rp58.360.218.762	Rp58.253.729.876	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	4	4	4	4	Rp1.201.519.905	Rp1.197.389.825	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.03	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	0	0	0	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.03. PROGRAM PENCATATAN SIPIL														
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen	3	3	3	3	Rp3.728.922.550	Rp3.718.705.612	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	0	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	2.12.03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	0	0	0	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	6	6	6	6	Rp701.581.212	Rp690.582.981	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.04. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN														
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan	0	0	0	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	1	1	1	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1	1	1	Rp185.351.376	Rp185.351.352	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	3	3	3	3	Rp973.491.352	Rp973.491.352	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	2.12.04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang	50	50	50	50			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
02.12.05. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN														
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen penyediaan data kependudukan Provinsi	Dokumen	0	0	0	1			APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.313.108	Rp122.306.560	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program/Kegiatan/Subkegiatan				Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan				Alokasi Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2023	2024	2025	2026					
(1)				(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	6	6	6	Rp159.284.401	Rp156.048.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Dokumen	1	1	1	1	Rp123.313.108	Rp122.306.560	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dokumen	6	6	6	6	Rp159.284.401	Rp156.048.240	APBD	DKI Jakarta	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

bappeda